

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2008

Buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang, untuk menganalisis perkembangan ekonomi Jawa Tengah secara komprehensif. Isi kajian dalam buku ini mencakup perkembangan ekonomi makro, inflasi, moneter, perbankan, sistem pembayaran, keuangan daerah, dan prospek ekonomi Jawa Tengah. Penerbitan buku ini bertujuan untuk: (1) melaporkan kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Jawa Tengah kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai masukan pengambilan kebijakan, dan (2) menyampaikan informasi kepada *external stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

Kantor Bank Indonesia Semarang

<i>M. Zaeni Aboe Amin</i>	<i>Pemimpin</i>
<i>Mahdi Mahmudy</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Ekonomi Moneter</i>
<i>H. Yunnokusumo</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Perbankan</i>
<i>Moh. M. Toha</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran</i>
<i>Herdiana A.W.</i>	<i>Analisis Madya Senior Tim Ekonomi Moneter</i>
<i>Lukdir Gultom</i>	<i>Pengawas Bank Madya Senior</i>
<i>Tri Selo</i>	<i>Kepala Bidang Manajemen Intern</i>

*Softcopy buku ini dapat di-download dari
DIBI (Data dan Informasi Bisnis Indonesia) di website Bank Indonesia dengan alamat
<http://www.bi.go.id>*

Halaman Ini sengaja dikosongkan
(This page is intentionally blank)

Kata Pengantar

Dampak krisis keuangan global semakin terasa dalam triwulan IV-2008, indikasi perlambatan pada perekonomian Jawa Tengah sudah terlihat pada beberapa indikator ekonomi makro. Perekonomian Jawa Tengah triwulan IV-2008 tumbuh sebesar 3,99% (yoy), melambat dibandingkan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2007 sebesar 5,53% dan pertumbuhan triwulan III-2008 sebesar 6,39%.

Sementara itu, inflasi di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 adalah sebesar 9,55% (yoy), menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,21%. Walaupun masih cukup tinggi, namun laju inflasi di Jawa Tengah sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Penurunan harga BBM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan laju inflasi tersebut.

Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada 2008 mengalami perkembangan yang positif meskipun sempat melambat di triwulan IV-2008. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR). Kualitas kredit yang diberikan juga membaik, tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans* – NPLs Gross.

Perkembangan ekonomi makro regional tersebut di atas menuntut kita untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi dampak lanjutan dari krisis keuangan tersebut. Di sisi lain, Bank Indonesia semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas kajiannya. Kajian yang dihasilkan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan moneter dan perbankan secara nasional, dan diharapkan juga menjadi masukan bagi *external stakeholders* di Jawa Tengah.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kalangan perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya di Jawa Tengah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Februari 2009
KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG

Ttd

M. Zaeni Aboe Amin
Pemimpin

Halaman Ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vii	
DAFTAR GRAFIK	ix	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1	
BAB 1	PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	11
1.1	Analisis PDRB dari Sisi Penggunaan	12
	1.1. Konsumsi	12
	1.2. Investasi	16
	1.3. Ekspor	18
1.2	Analisis PDRB dari Sisi Penawaran	21
	2.1. Sektor Pertanian	22
	2.2. Sektor Industri Pengolahan	24
	2.3. Sektor Perdagangan Hotel dan Restauraan	27
	2.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	28
	2.5. Sektor Lainnya	29
BAB 2	PERKEMBANGAN INFLASI	33
2.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok	34
	2.1.1. Inflasi Kuartalan	35
	2.1.2. Inflasi Tahunan	39
2.2	Inflasi Empat Kota di Jawa Tengah	45
	2.1.1. Inflasi Kuartalan	45
	2.1.2. Inflasi Tahunan	48
BOKS	<i>Ringkasan Eksekutif Penelitian Jalur Distribusi Komoditas Penyumbang Terbesar di Kota Semarang, Purwokerto dan Tegal</i>	51
BAB 3	PERKEMBANGAN PERBANKAN	55
3.1	Fungsi Intermediasi Bank Umum	56
	3.1.1 Penghimpunan Dana Masyarakat	57
	3.1.2 Penyaluran Kredit	59
3.2	Risiko Kredit	62
3.3	Risiko Likuiditas	65
3.4	Risiko Pasar	67
3.5	Kredit UMKM (Lokasi Proyek)	67
3.6	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	69

	3.7	Perkembangan Bank Syariah	71
	3.8	Kredit UMKM	72
	3.9	Perkembangan Realisasi PMA/PMDN	75
BOKS		<i>TFPPED KBI Semarang 2008: "Sinergi Perwujudan Access To Finance Bagi Peternak Sapi Dan Industri Konveksi"</i>	77
BOKS		<i>Program Inkubasi Wirausaha Unggulan</i>	81
BOKS		<i>Profil UMKM Peserta Jateng Fair 2008</i>	83
BAB 4		KEUANGAN DAERAH	87
	4.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	87
	4.2	Belanja Daerah	90
BAB 5		PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	93
	5.1	Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai	93
		5.1.1. Kliring Lokal	93
		5.1.2. <i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i>	94
	5.2	Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	95
		5.2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	95
		5.2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	97
	5.3	Perkembangan Temuan Uang Palsu	98
BOKS		<i>Survei Pola Remitansi TKI Propinsi Jawa Tengah 2008</i>	100
BAB 6		KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	107
	6.1	Ketenagakerjaan	107
	6.2	Tingkat Kemiskinan	110
	6.2.1	Kemiskinan	110
BOKS		<i>Implementasi Program "Bali Ndeso Mbangun Deso"</i>	115
BAB 7		PROSPEK PEREKONOMIAN	117
	7.1	Pertumbuhan Ekonomi	117
		7.1.1. Sektor	118
		7.1.2. Sisi Penggunaan	121
	7.2	Inflasi	122
LAMPIRAN DATA			127



Daftar Tabel

TABEL 1.1	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan (YOY, Persen)	12
TABEL 1.2	Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Kelompok HS 2 Provinsi Jawa Tengah (USD Ribu)	20
TABEL 1.3	Perkembangan Realisasi Impor Non Migas Menurut Klasifikasi HS 2 Provinsi Jawa Tengah (USD Ribu)	21
TABEL 1.4	Perkembangan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha (YOY)	22
TABEL 1.5	Perkembangan Kegiatan Bank (Rp miliar)	29
TABEL 2.1	Inflasi Jawa Tengah Kuartalan Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa (Persen, qtq)	35
TABEL 2.2	Kebutuhan dan Posisi Stok Hingga Akhir Tahun 2008	37
TABEL 2.3	Kondisi Harga Beberapa Komoditas Bahan Makanan triwulan IV-2008	37
TABEL 2.4	Sub Kelompok Barang dan Jasa dengan Kenaikan Harga Kuartalan (qtq) Tertinggi	39
TABEL 2.5	Inflasi Jawa Tengah Tahunan Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa (Persen, yoy)	40
TABEL 2.6	Sub Kelompok Barang dan Jasa dengan Kenaikan Harga Tahunan (yoy) Tertinggi	41
TABEL 2.7	Beberapa Komoditas Penyebab Inflasi Tiap Bulan Pada Triwulan IV-2008	42
TABEL 2.8	Beberapa Komoditas Yang Mengalami Penurunan IHK (Deflasi) Pada Triwulan IV-2008	43
TABEL 2.9	Inflasi Kuartalan Empat Kota di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa (persen, qtq)	47
TABEL 2.10	Inflasi Tahunan Empat Kota di Jawa Tengah Menurut Kelompok Barang dan Jasa (persen, qtq)	50
TABEL 3.1	Perkembangan Indikator Perbankan Di Provinsi Jawa Tengah (Bank Umum & BPR)	55
TABEL 3.2	Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum Per Sektor Ekonomi	61
TABEL 3.3	Rasio NPLs Per Sektor Ekonomi	63
TABEL 3.4	Rasio NPLs Jenis Kredit Modal Kerja Per Sektor Ekonomi	64
TABEL 3.5	Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat Di Jawa Tengah	69
TABEL 3.6	Perkembangan Beberapa Indikator BPR di Jawa Tengah	70
TABEL 3.7	Perkembangan Indikator Perbankan Syariah di Provinsi Jawa Tengah	71
TABEL 3.8	Perkembangan Realisasi Nilai PMA/PMDN di Provinsi Jawa Tengah	75

TABEL 4.1	Realisasi APBD Desember 2007 – Desember 2008	87
TABEL 4.2	Realisasi Belanja APBD Desember 2007 – Desember 2008	90
TABEL 5.1	Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata – Rata Per Bulan Di Jawa Tengah (Rp Triliun)	94
TABEL 5.2	Perkembangan Transaksi RTGS Di Jawa Tengah	95
TABEL 5.3	Perkembangan Inflow Uang Kertas Dan Uang Logam Melalui Kantor Bank Indonesia Semarang	97
TABEL 6.1	Penduduk Usia Kerja di Jawa Tengah Menurut Keegiatannya	107
TABEL 6.2	Nilai Tukar Petani Di Jawa Tengah Bulan September Dan November 2008	113
TABEL 6.3	Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor Di Jawa Tengah Bulan September Dan November 2008	113
TABEL 7.1	Estimasi Laju Inflasi Jawa Tengah Hingga Akhir Tahun 2008 Menurut Kelompok Barang dan Jasa (YOY, Persen)	126

Daftar Grafik

GRAFIK 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Secara Tahunan	11
GRAFIK 1.2	Pertumbuhan Tahunan ndeks Riil Penjualan Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau	13
GRAFIK 1.3	Pertumbuhan Tahunan ndeks Riil Penjualan Kelompok Bahan Makanan	13
GRAFIK 1.4	Pertumbuhan Tahunan ndeks Riil Penjualan Kelompok Perumahan dan Bahan Bakar	13
GRAFIK 1.5	Perkiraan Produksi Migas Di Jawa Tengah	14
GRAFIK 1.6	Perkembangan Indeks Kepercayaan Konsumen	15
GRAFIK 1.7	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	15
GRAFIK 1.8	Perkembangan Kredit Konsumsi, NPL Jenis Kredit Konsumsi dan PertumbuhanQtQ Kredit Konsumsi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah	16
GRAFIK 1.9	Perkembangan Posisi Giro Milik Pemerintah pada Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah	16
GRAFIK 1.10	Penjualan Semen di Jawa Tengah	17
GRAFIK 1.11	Perkembangan Kredit dan NPL Jenis Kredit Investasi Bank Umum di Jawa Tengah	18
GRAFIK 1.12	Perkembangan Ekspor Jawa Tengah Bulanan	19
GRAFIK 1.13	Perkembangan Ekspor Jawa Tengah Triwulanan	19
GRAFIK 1.14	Perkembangan Impor Jawa Tengah	20
GRAFIK 1.15	Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Jawa Tengah Periode Jan-Nov 2007 dan Jan-Nov 2008	20
GRAFIK 1.16	Perkiraan Produksi Tabama di Jawa Tengah	23
GRAFIK 1.17	Perkembangan Ekspor Kelompok Komoditas Pertanian	23
GRAFIK 1.18	Indeks Produksi Industri Pengolahan Minyak di Jawa Tengah	24
GRAFIK 1.19	Perkembangan Ekspor Hasil Manufaktur Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi ISIC	25
GRAFIK 1.20	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri oleh Bank Umum di Jawa Tengah	26
GRAFIK 1.21	Hasil SKDU – Sektor Industri Pengolahan	27
GRAFIK 1.22	Perkembangan Indeks Riil Penjual Eceran	27
GRAFIK 1.23	Penyaluran Kredit Sektor PHR oleh Bank Umum di Jawa Tengah	28

GRAFIK 1.24	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Jasa oleh Bank Umum di Jawa Tengah	29
GRAFIK 1.25	Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor Bangunan	30
GRAFIK 1.26	Indeks Produksi Air Bersih di Wilayah Jawa Tengah	31
GRAFIK 1.27	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor LGA oleh Bank Umum di Jawa Tengah	31
GRAFIK 2.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan (YoY) Jawa Tengah dan Nasional	34
GRAFIK 2.2	Perkembangan Inflasi Jawa Tengah Secara Kuartalan (QtQ) dan Tahunan (YoY)	34
GRAFIK 2.3.	Grafik Beberapa Komoditas Hasil SPH di KBI Semarang	38
GRAFIK 2.4.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Strategis Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Mingguan Triwulan III & IV 2008 di Kota Semarang	44
GRAFIK 2.5.	Perkembangan Ekspektasi Inflasi Hasil Survei Konsumen dan Inflasi Tahunan Aktual di Jawa Tengah	45
GRAFIK 2.6.	Perkembangan Inflasi Kuartalan Empat Kota di Jawa Tengah	46
GRAFIK 2.7.	Perkembangan Inflasi Tahunan Empat Kota di Jawa Tengah	48
GRAFIK 3.1.	Perkembangan Aset Bank Umum	57
GRAFIK 3.2.	Perkembangan Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank	57
GRAFIK 3.3.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum	58
GRAFIK 3.4.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum menurut Kelompok Bank	58
GRAFIK 3.5.	Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Bank Umum	58
GRAFIK 3.6.	Perkembangan Komposisi Kepemilikan Dana Pihak Ketiga	58
GRAFIK 3.7.	Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan	60
GRAFIK 3.8.	Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Kelompok Bank	65
GRAFIK 3.9.	Perkembangan Kredit Bank Umum dan Rasio NPLs	63
GRAFIK 3.10.	Perkembangan Nominal NPLs Kredit Berdasar Jenis Penggunaan	63
GRAFIK 3.11.	Perkembangan Cash Ratio Bank Umum di Jawa Tengah	65
GRAFIK 3.12.	Komposisi DPK Bank Umum Triwulan IV-2008	66
GRAFIK 3.13.	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Lokasi Proyek	68
GRAFIK 3.14.	Perkembangan Kredit UMKM dan Total Kredit	73
GRAFIK 3.15.	Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Penggunaan	73
GRAFIK 3.16.	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi TW-IV 2008	73

GRAFIK 3.17.	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	73
GRAFIK 4.1.	Alokasi DAU Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005-2009	88
GRAFIK 4.2.	Komposisi Alokasi Penggunaan DAK di Wilayah Jawa Tengah tahun Anggaran 2008	89
GRAFIK 5.1.	Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Jawa Tengah	96
GRAFIK 5.2.	Perkembangan PTTB di Jawa Tengah	97
GRAFIK 5.3.	Perkembangan Cash Inflow dan PTTB di Jawa Tengah	98
GRAFIK 5.4.	Perkembangan Upal di Wilayah KKBI Semarang	98
GRAFIK 6.1.	Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Jawa Tengah	108
GRAFIK 6.2.	Jumlah Penduduk Bekerja di Jawa Tengah Menurut Lapangan Pekerjaan	108
GRAFIK 6.3.	Jumlah Penduduk di Jawa Tengah Menurut Status Pekerjaan	109
GRAFIK 6.4.	Komposisi Penduduk Bekerja di Jawa Tengah Menurut Status Pekerjaan Utama	109
GRAFIK 6.5.	Perkembangan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja di Jawa Tengah	110



Halaman Ini sengaja dikosongkan

A. GAMBARAN UMUM

Perekonomian Jawa Tengah triwulan ini mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat, di tengah-tengah dampak krisis global yang semakin terasa.

Dampak krisis keuangan global semakin terasa dalam triwulan IV-2008, indikasi perlambatan pada perekonomian Jawa Tengah sudah terlihat pada beberapa indikator ekonomi makro. Meskipun demikian, perekonomian Jawa Tengah masih menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif dibandingkan triwulan maupun akhir tahun sebelumnya. Sementara itu laju inflasi secara tahunan (yoy) walaupun masih relatif tinggi namun telah menunjukkan trend penurunan.

Kinerja perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah triwulan ini menunjukkan kinerja cukup baik, walaupun sedikit melambat akibat dampak negatif dari krisis keuangan global. Sebagian besar indikator utama kinerja perbankan mengalami perbaikan dibandingkan posisi Desember 2007, sebagaimana tercermin dari meningkatnya total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan penyaluran kredit. Seiring dengan penurunan konsumsi masyarakat pasca hari raya lebaran serta imbas krisis keuangan global, transaksi tunai maupun non tunai mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara umum peranan Keuangan Daerah dalam perekonomian meningkat pada tahun ini. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan angka realisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tengah-tengah krisis keuangan global yang sedang berlangsung. Kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan indikasi yang membaik.

Pada triwulan I-2009 PDRB Jawa Tengah diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,0%-5,0% (yoy), sementara inflasi pada triwulan I-2009 diperkirakan sedikit menurun, dalam kisaran 7,5%–8,5% (yoy).

B. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2008 tumbuh 3,99% (yoy)

Secara tahunan pada triwulan IV-2008¹, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh 3,99% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2007 sebesar 5,53% dan pertumbuhan triwulan III-2008 sebesar 6,39%. Angka pertumbuhan triwulanan ini merupakan angka pertumbuhan yang terendah selama 4 tahun terakhir.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masih menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian walau mengalami perlambatan. Investasi tumbuh moderat, sementara itu ekspor menunjukkan trend perlambatan dan impor diperkirakan meningkat.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,95% dan memberikan kontribusi sebesar 3,25% terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Pergeseran hari raya keagamaan dari periode triwulan IV ke triwulan III dan krisis keuangan global ditengarai menyebabkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan mencatat tingkat pertumbuhan relatif tinggi yaitu sebesar 13,6%. Konsumsi pemerintah tersebut terutama dipergunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, seperti misalnya beberapa proyek perbaikan fisik seperti ruas jalan utama Pantura dan ruas jalur utama lainnya. Selain itu periode triwulan IV-2008 merupakan periode akhir tahun anggaran 2008, sehingga cukup banyak konsumsi pemerintah yang terjadi pada periode ini.

Pertumbuhan investasi tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang pada triwulan IV-2008 diperkirakan mencapai 7,24% (yoy), mengalami peningkatan apabila dibandingkan posisi triwulan IV-2007 sebesar 5,56%. Pertumbuhan investasi ini diperkirakan berasal dari investasi dalam negeri khususnya sektor konstruksi.

Perkembangan ekspor² pada PDRB Jawa Tengah triwulan IV-2008 mengalami pertumbuhan sebesar 4,02% (yoy), sedangkan impor mengalami pertumbuhan sebesar 16,19% (yoy). Dari konfigurasi data ekspor dalam PDRB, diperkirakan perdagangan luar negeri mempunyai

¹ Berdasarkan PDRB harga konstan 2000

² Pengertian ekspor dan impor dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar propinsi

proporsi sebesar 20%-25% dari total angka ekspor PDRB, dan 75%-80% merupakan perdagangan antar provinsi. Dari data impor dalam perhitungan PDRB Jawa Tengah, diperkirakan 50%-55% merupakan impor dari luar negeri, sementara sisanya 45%-50% merupakan impor antar provinsi.

Pada triwulan IV-2008, ekspor luar negeri mulai menunjukkan trend perlambatan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi volume. Berdasarkan hasil *liaison* yang dilakukan KBI Semarang, para *contacts liaison* menyatakan permintaan pasar luar negeri pada periode Tw IV ini menunjukkan adanya penurunan khususnya pasar AS dan Eropa. Penurunan ini terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil dan furniture/mebel. Sementara itu nilai impor non migas pada posisi triwulan IV-2008 (posisi sampai dengan November 2008) tercatat sebesar USD 426,95 juta. Diperkirakan nilai impor ini akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Berdasarkan informasi dari hasil kegiatan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia Semarang, potensi penurunan impor disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika Serikat. Berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* (HS), komoditi impor non migas terbesar di Jawa Tengah adalah kapas, mesin/ pesawat mekanik dan gandum.

Data ekspor dan impor yang diolah dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia, kinerja ekspor non migas Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 (data sampai dengan posisi November 2008) tercatat sebesar USD 533 juta. Dari sisi volume juga terlihat adanya trend penurunan yang cukup signifikan. Beberapa produk ekspor nilai ekspornya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif).

Dari sisi penawaran secara sektoral, pada triwulan IV-2008 seluruh sektor perekonomian diperkirakan mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi diperkirakan dialami oleh sektor pertanian sebesar 13,35% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ini adalah sektor pertanian dan sektor

Krisis keuangan global mulai berdampak pada kinerja ekspor dan impor Jawa Tengah

Dari sisi penawaran, sektor pertanian

dan PHR memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan

Peningkatan Sektor Pertanian terutama didukung oleh faktor cuaca

perdagangan, hotel dan restaurant masing-masing sebesar 2,16% dan 0,96%. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang utama menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan karena memberikan kontribusi negatif sebesar -0,80% terhadap total pertumbuhan.

Sektor pertanian dalam triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 13,35% (yoy). Angka perkiraan pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan triwulanan yang tertinggi selama 2 tahun terakhir. *Share of growth* atau kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan adalah sebesar 2,16%, atau yang terbesar pada triwulan ini. Penyebab utama pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan ini adalah faktor cuaca yang lebih baik dibandingkan periode triwulan IV-2007.

Sektor Industri pengolahan pada triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -2,37% (yoy). Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan terkecil selama 3 tahun terakhir. Karena sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah, maka kontraksi pada sektor ini menyebabkan secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah mengalami perlambatan. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri non migas, yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik karena faktor musiman.

Pada triwulan IV-2008 sektor PHR diperkirakan tumbuh sebesar 4,40% (yoy), sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2007 yang tercatat sebesar 5,99% (yoy). Perlambatan pertumbuhan sektor PHR ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pergeseran hari raya lebaran dari triwulan IV ke triwulan III, sehingga puncak konsumsi masyarakat terjadi pada triwulan III-2008. Selain itu kondisi krisis keuangan internasional diperkirakan turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sehingga berdampak pula pada perlambatan sektor ini.

C. PERKEMBANGAN INFLASI

Secara kuartalan (qtq), tekanan terhadap harga-harga di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,28% (qtq), menurun dibandingkan dengan

Inflasi (qtq) dan (yoy) menurun cukup signifikan

Sumber deflasi triwulan laporan berasal dari kelompok transpor

inflasi triwulan sebelumnya (2,89%). Sementara itu, apabila dihitung secara tahunan, inflasi di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 adalah sebesar 9,55% (yoy), menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,21%.

Sumber inflasi kuartalan di triwulan laporan berasal dari kelompok kesehatan, kelompok perumahan, dan kelompok sandang. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi penurunan laju inflasi dalam triwulan ini adalah kelompok transpor yang mengalami penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) cukup signifikan dan stabilnya IHK kelompok bahan makanan. Penurunan IHK kelompok transpor terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM pada bulan Desember 2008. Sementara itu, stabilnya harga-harga bahan makanan antara lain disebabkan oleh stok yang masih mencukupi, serta perkembangan harga beberapa komoditas di pasar internasional yang masih mengalami *trend* penurunan.

Inflasi berdasarkan kelompok barang secara kuartalan menunjukkan kecenderungan yang makin menurun, setelah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2008. Kelompok kesehatan, kelompok perumahan, dan kelompok sandang menjadi sumber utama inflasi kuartalan Jawa Tengah triwulan ini. Hal itu menunjukkan bahwa perhatian lebih besar perlu diarahkan pada kelompok non makanan, karena bobot inflasi kelompok non makanan mengalami peningkatan sejak diterapkannya SBH 2007 sebagai dasar penghitungan inflasi. Kenaikan harga tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok kesehatan (2,56%), diikuti oleh kelompok perumahan (1,77%) dan kelompok sandang (1,76%). Kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi mengalami perubahan harga yang relatif stabil dalam triwulan ini, yaitu masing-masing 0,07% (qtq) dan 0,92% (qtq).

Secara tahunan, inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami penurunan (9,55%) dibandingkan triwulan sebelumnya (10,21%). Tekanan harga tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, kelompok bahan makanan, dan kelompok makanan jadi.

D. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada 2008 mengalami perkembangan yang positif meskipun sempat melambat di triwulan IV-2008. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total

aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR). Kualitas kredit yang diberikan juga membaik, tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans – NPLs Gross*.

Aset bank umum di Jawa Tengah sampai dengan akhir 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 20,25% apabila dibandingkan dengan Desember 2007, sehingga menjadi Rp103.922 miliar. Pertumbuhan tersebut lebih besar dari pertumbuhan aset 2007 sebesar 11,29%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum di Jawa Tengah tumbuh positif. Posisi DPK pada Desember 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 15,09% sehingga menjadi Rp80.681 miliar, lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK di 2007 sebesar 11,79%. Secara triwulanan meningkat dibanding dengan triwulan III-2008 juga mengalami pertumbuhan sebesar 6%.

Kredit yang disalurkan bank umum di Jawa Tengah tumbuh cukup baik, meski di bawah angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan kredit pada 2008 mencapai 27,86% (yoy) sedangkan pertumbuhan kredit secara nasional tumbuh sekitar 31%. Namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yang tumbuh sebesar 18,72%. Secara triwulanan, kredit pada triwulan IV ini tumbuh 3,16%, di bawah pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,04%. Pelambatan pertumbuhan kredit yang terjadi pada triwulan IV sebagai dampak krisis keuangan global. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPK tersebut berimplikasi pada peningkatan LDR, meningkat dari 81,34% pada tahun 2007 menjadi 90,37%. Hal ini menunjukkan masih baiknya fungsi intermediasi perbankan di Jawa Tengah. Meskipun pada triwulan IV-2008 ini terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan kredit sebagai akibat krisis keuangan global yang tercermin dari penurunan LDR bank umum dari 92,85% pada triwulan III-2008 menjadi 90,37% pada triwulan IV-2008.

Risiko kredit bank umum di Jawa Tengah cukup rendah. Pada akhir 2007 NPLs bank umum berada di angka 3,00%, dan pada akhir 2008 ini turun menjadi 2,39%, di bawah NPLs yang dihimbau Bank Indonesia sebesar 5%.

BPR di Jawa Tengah terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan bank umum. Total aset BPR pada Desember 2008 ini tercatat sebesar Rp7.889 miliar, meningkat sebesar 16,42% dibanding dengan Desember tahun sebelumnya, atau 5,28% dibanding triwulan

sebelumnya. DPK meningkat sebesar 15,04% (yoy) dan 6,47% (qtq) sehingga menjadi Rp5.459 miliar. Sementara itu kredit yang diberikan tumbuh sebesar 20,84% (yoy) dan -0,27 (qtq), menjadi Rp6.424 miliar. LDR BPR juga meningkat dari 112,06% pada triwulan IV-2007 menjadi 117,66% pada triwulan IV-2008. Namun sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan III-2008 yang sebesar 125,64%.

Perkembangan perbankan syariah di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Total aset perbankan syariah pada triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp2.417 miliar, meningkat sebesar 48,28% dibandingkan triwulan IV-2007 atau meningkat 4,54% dibanding triwulan sebelumnya. DPK yang dihimpun juga meningkat 36,95% (yoy) menjadi Rp1.701 miliar, dan pembiayaan yang disalurkan naik 58,48% (yoy) menjadi Rp2.027 miliar. Perkembangan tersebut relatif cukup menggembirakan, meskipun *share* aset perbankan syariah terhadap total perbankan masih di angka 2,33%, meningkat dibanding tahun 2007 yang sebesar 1,75%. Masih cukup jauh tentunya bila dibandingkan dengan target Bank Indonesia untuk mencapai *share* 5% secara nasional. Fungsi intermediasi berjalan baik, Rasio FDR 2008 sebesar 119,12%, meningkat dibandingkan 2007 sebesar 102,97% dan selalu berada di atas 100%. rasio *Non Performing Financing (NPF)* masih relatif rendah, sampai dengan triwulan IV-2008 masih di bawah 5%, yaitu 2,43%.

Sementara itu, jumlah penyaluran kredit kepada UMKM di Jawa Tengah terus meningkat meski dengan pertumbuhan yang terus melambat. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV-2008 mengalami peningkatan sebesar 22,03% dibandingkan triwulan IV-2007 sehingga menjadi Rp61.241 miliar. Peningkatan kredit UMKM tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya kredit perbankan, mengingat kontribusinya pada triwulan ini mencapai 77,19% dari total kredit perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 48,15% merupakan kredit modal kerja, sisanya sebesar 46,15% dan 5,70% merupakan kredit konsumsi dan investasi.

Perkembangan sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 secara umum mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan transaksi pembayaran non tunai melalui kliring lokal secara nominal maupun volume mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (nominal -0,05% dan volume -0,04%), namun secara yoy menunjukkan pertumbuhan

Penyaluran kredit UMKM tetap meningkat walaupun sedikit melambat sebesar 22,03% (yoy)

*Cash outflow
menurun
sementara cash
inflow mengalami
peningkatan*

*Jumlah temuan
UPAL menurun
dibanding
triwulan
sebelumnya*

*Realisasi
pendapatan dan
belanja APBD
Jateng 2008
meningkat
dibanding tahun
2007*

*Kesejahteraan
masyarakat
Jateng tahun
2008 relatif
membaik dilihat*

positif meskipun melambat (nominal 0,38% dan volume 0,16%). Dibandingkan triwulan lalu, perkembangan transaksi pembayaran tunai mengalami peningkatan yang signifikan dari sisi aliran kas masuk atau *cash inflow* sementara dari sisi aliran kas keluar atau *cash outflow* mengalami penurunan. Aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran bank umum di Jawa Tengah selama triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp7.574 miliar, meningkat 198% dari triwulan III-2008. Sementara itu, *cash outflow* dari kas Bank Indonesia Semarang pada triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp2.278 miliar atau menurun sebesar -52,94% dari triwulan sebelumnya.

Sementara itu, jumlah temuan uang rupiah palsu (UPAL) yang tercatat di Kantor Bank Indonesia se Jawa Tengah dalam triwulan IV-2008 tercatat sebanyak 2.563 lembar, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan yang lalu sebanyak 5.167 lembar.

E. KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peranan keuangan daerah terhadap perekonomian daerah Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2008. Realisasi pendapatan dalam APBD dari Januari 2008 hingga Desember 2008 mengalami peningkatan mencapai Rp. 5,27 triliun atau meningkat 102,65 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2007, tumbuh sebesar Rp. 903,7 miliar (20,71 %). Sedangkan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 yang sudah terealisasi sebesar 91,01%, sedikit lebih baik dibanding tahun 2007 yang sebesar 89,29%. Realisasi belanja tahun ini mencapai Rp 5,15 triliun, meningkat cukup signifikan sebesar Rp 1,42 triliun atau 31,90% dibandingkan tahun lalu.

Perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan menunjukkan perkembangan yang positif dengan sedikit koreksi pada akhir tahun. Hal tersebut tercermin dari menurunnya tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat yang relatif membaik. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2008 tercatat sebesar 7,35% atau sejumlah 1,227 juta jiwa, menurun dibanding angka tahun 2007 (8,10% atau 1,436 juta jiwa). Hasil survey BPS (Maret 2008) menyebutkan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Jawa Tengah sebesar 6,19 juta orang, menurun sebesar -5,6% dibandingkan tahun 2007 yang tercatat sejumlah 6,56 juta orang. Namun, triwulan IV-2008 ini diperkirakan jumlah penduduk miskin di

*dari tingkat
pengangguran
dan tingkat
kemiskinan
dengan sedikit
koreksi pada
akhir tahun.*

*Perekonomian
pada triwulan I-
2009
diperkirakan akan
mengalami
perlambatan*

*Tekanan inflasi
triwulan I-2009
diperkirakan*

Jawa Tengah semakin bertambah, terkait dengan lesunya sektor ekspor yang berimbas pada ancaman PHK masal akibat krisis keuangan global. Nilai Tukar Petani (NTP) bulan November 2008 tercatat sebesar 101,65 atau turun 1,62% dibandingkan September 2008.

F. PROSPEK PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2008, yaitu dalam kisaran 4,8-5,3%. Perlambatan pertumbuhan tahun 2009 tersebut terutama masih dipengaruhi oleh melambatnya kegiatan ekspor ke luar negeri, disebabkan lesunya permintaan dari negara AS dan Eropa seiring dengan masih terjadinya krisis keuangan global. Investasi swasta diperkirakan juga mengalami perlambatan, karena sikap investor yang masih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha. Adapun investasi pemerintah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan direalisasikan berbagai proyek infrastruktur seperti Jalan Tol Semarang-Solo, dan pelaksanaan program stimulus bagi sektor riil di Jawa Tengah.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2009 diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 4,0% - 5,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan triwulan I-2009 tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan kegiatan ekspor. Investasi melambat sejalan dengan permintaan internasional dan domestik yang melemah serta iklim investasi dan infrastruktur yang masih harus diperbaiki. Kegiatan ekspor yang melambat dipengaruhi oleh permintaan pasar dunia yang melemah. Indikasi dari perlambatan kedua kegiatan ekonomi tersebut adalah telah dilakukannya PHK ataupun dirumahnya sebagian karyawan di beberapa perusahaan yang berorientasi ekspor.

Tekanan inflasi Jawa Tengah triwulan I-2009 diperkirakan mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, dan diproyeksikan akan berada dalam kisaran 7,5%–8,5% (yoy). Tekanan inflasi triwulan I-2009 diperkirakan mengalami penurunan karena kebijakan penurunan harga BBM pada bulan Januari 2009, serta pasokan bahan makanan khususnya beras yang memadai pada bulan Maret 2009 setelah adanya masa panen raya di beberapa daerah. Sedangkan tekanan inflasi pada triwulan I-2009 diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari dan Maret 2009, namun dengan perkiraan laju inflasi

sedikit menurun

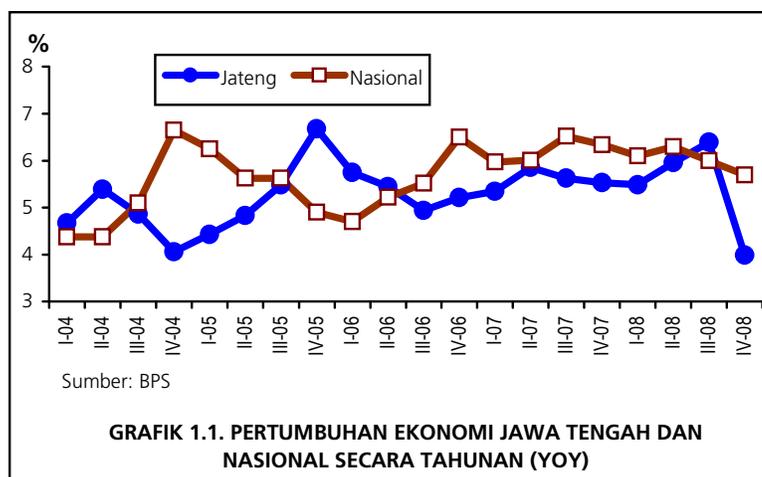
yang relatif rendah dalam kisaran 0,2% - 0,6% (mtm). Faktor pemicunya adalah kemungkinan terjadinya gangguan pasokan beberapa komoditas karena terjadinya banjir atau longsor di beberapa daerah. Di samping itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan berasal dari tingginya pembuatan berbagai atribut untuk melaksanakan Pemilu pada bulan April 2009 diperkirakan juga mulai meningkat pada bulan Februari dan Maret 2009.



Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro

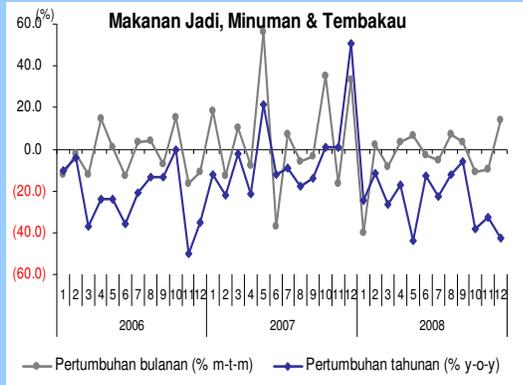
Perekonomian Jawa Tengah triwulan IV-2008 mengalami perlambatan yang cukup signifikan yang merupakan dampak dari krisis keuangan internasional. Secara tahunan pada triwulan IV-2008³, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh 3,99% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2007 sebesar 5,53% dan pertumbuhan triwulan III-2008 sebesar 6,39%. Angka pertumbuhan triwulanan ini merupakan angka pertumbuhan yang terendah selama 4 tahun terakhir.



Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masih menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian walaupun juga mengalami perlambatan. Investasi tumbuh moderat, sementara itu ekspor menunjukkan trend perlambatan dan impor diperkirakan meningkat.

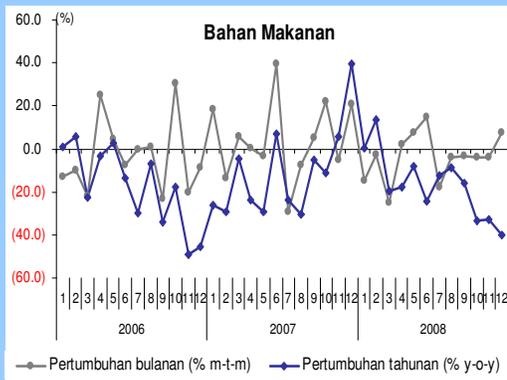
Dari sisi penawaran, kontraksi pada sektor industri pengolahan menjadi faktor utama perlambatan perekonomian Jawa Tengah dalam triwulan laporan ini. Sementara itu, sektor lain yang diperkirakan masih tumbuh cukup signifikan adalah sektor pertanian dan sektor bangunan.

³ Berdasarkan PDRB harga konstan 2000



Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

Grafik 1.2. Pertumbuhan Tahunan Indeks Riil Penjualan Kelompok Makanan Jadi, Minuman & Tembakau



Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

Grafik 1.3. Pertumbuhan Tahunan Indeks Riil Penjualan Kelompok Bahan Makanan



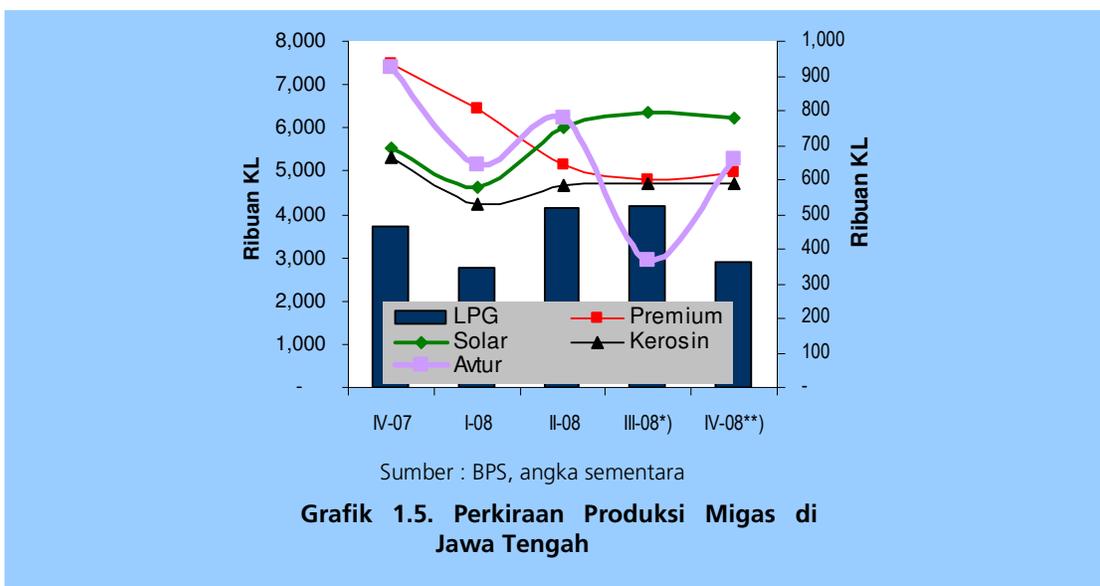
Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

Grafik 1.4. Pertumbuhan Tahunan Indeks Riil Penjualan Kelompok Perumahan dan Bahan Bakar

Perlambatan konsumsi rumah tangga diantaranya tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Semarang, dimana indeks riil penjualan eceran menunjukkan adanya perlambatan selama triwulan IV-2008. Perkembangan pertumbuhan indeks riil penjualan untuk beberapa kelompok komoditas, seperti kelompok makanan jadi, kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan dan bahan bakar menunjukkan adanya trend perlambatan pertumbuhan (Grafik 1.2, Grafik 1.3, dan Grafik 1.4).

Indikator lain dari perlambatan konsumsi masyarakat tercermin pula dari perkiraan produksi bahan bakar minyak Pertamina di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan adanya trend perlambatan di triwulan IV-2008. Dilihat dari jenisnya, produksi bahan bakar minyak yang mengalami penurunan yang signifikan adalah premium, kerosin, avtur dan LPG. Perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan

oleh proses pemeliharaan peralatan industri (overhaul) yang menyebabkan adanya gangguan pada produksi migas di Jawa Tengah,

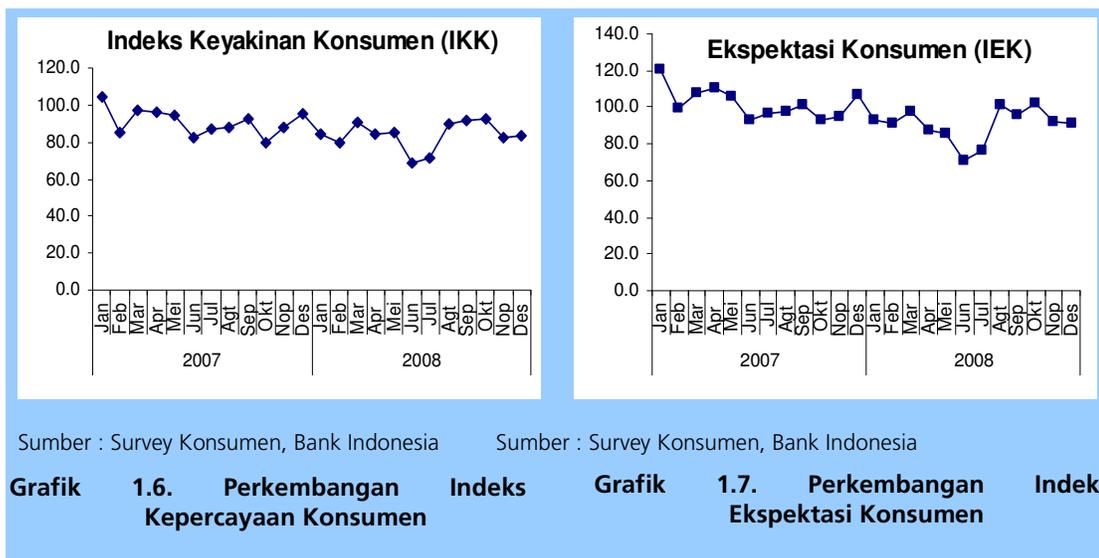


Sementara itu, hasil Survei Konsumen yang dilakukan KBI Semarang pada triwulan IV-2008 menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) menunjukkan trend melambat dan berada dalam wilayah pesimis (angka indeks di bawah 100) (grafik 1.6). Pada grafik tersebut, terlihat masyarakat lebih bersikap pesimis pada triwulan ini dibandingkan triwulan III-2008 maupun triwulan IV-2007. Kondisi tersebut diperkirakan merupakan sinyal perlambatan konsumsi masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa pada saat tersebut bukan merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan konsumsi. Berbagai informasi dan pemberitaan mengenai dampak krisis keuangan global diperkirakan menjadi penyebab peningkatan pesimisme masyarakat tersebut.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian 6 bulan ke depan cenderung melemah. Hal tersebut terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang cenderung melambat selama triwulan IV-2008 (grafik 1.7). Indeks ekspektasi konsumen ini sempat mengalami peningkatan pada triwulan III-2008, namun kembali melemah pada triwulan IV-2008 yang diperkirakan akibat munculnya pesimisme dari dampak krisis keuangan internasional, yang dikuatirkan akan berdampak pula pada perekonomian nasional dan regional.

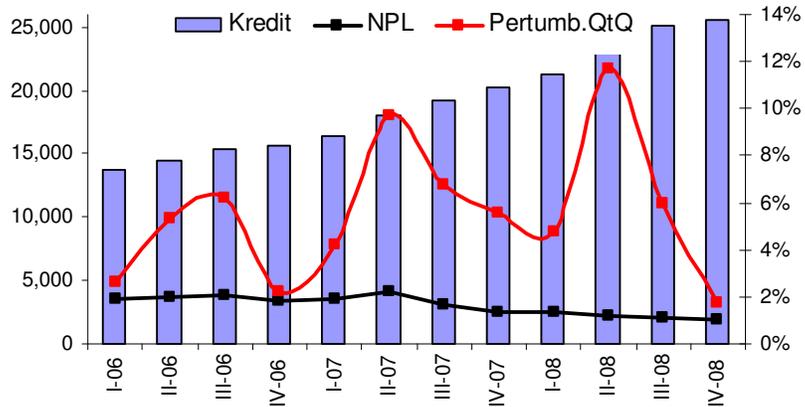
Dari hasil survei tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap optimis, karena optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian akan berdampak terhadap pola kegiatan konsumsi masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan untuk

menjaga tingkat optimisme masyarakat adalah dengan memberikan informasi terbuka dan jelas kepada masyarakat tentang langkah dan strategi kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Tersedianya informasi yang jelas dan terbuka juga diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap kondisi perekonomian ke depan.



Dari sisi pembiayaan, perlambatan konsumsi rumah tangga antara lain tercermin pula dari perlambatan pertumbuhan kredit secara quarter to quarter (QtQ) untuk jenis kredit konsumsi bank umum di Jawa Tengah (Grafik 1.8). Walaupun posisi kredit konsumsi mengalami peningkatan posisi dan rasio NPL kredit mengalami peningkatan kualitas, namun apabila dilihat laju pertumbuhan triwulanan kredit konsumsi terlihat adanya trend perlambatan. Perlambatan pertumbuhan triwulanan kredit konsumsi ini merupakan salah satu *prompt indikator* perlambatan konsumsi masyarakat.

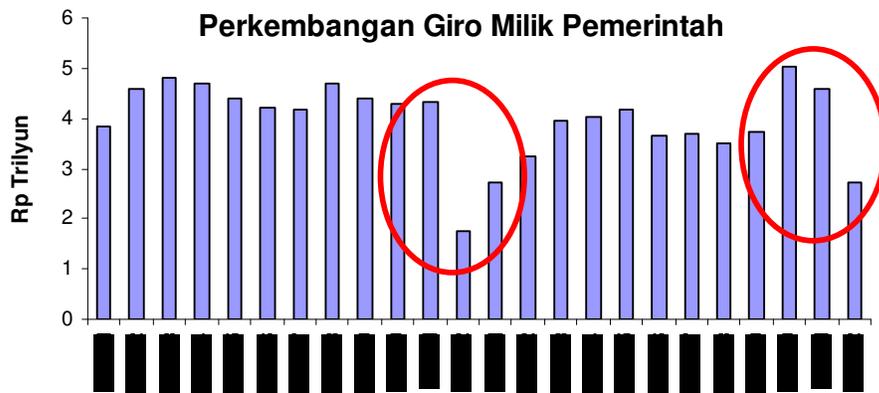
Konsumsi pemerintah diperkirakan mencatat pertumbuhan sebesar 13,6%. Pertumbuhan tersebut sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2007 sebesar 19,83%, namun tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan triwulan III-2008 sebesar 13,65% dan tingkat pertumbuhannya masih relatif tinggi. Konsumsi pemerintah tersebut terutama dipergunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, diantaranya proyek perbaikan fisik seperti ruas jalan utama Pantura dan ruas jalur utama lainnya. Selain itu periode triwulan IV-2008 merupakan periode akhir tahun anggaran 2008, sehingga cukup banyak pengeluaran pemerintah yang terjadi pada periode ini.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.8. Perkembangan Kredit Konsumsi, NPL Jenis Kredit Konsumsi dan Pertumbuhan QtQ Kredit Konsumsi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah

Untuk melihat perkembangan konsumsi pemerintah, prompt indikator yang dapat digunakan adalah posisi giro milik pemerintah yang disimpan pada perbankan di Jawa Tengah. Pada Grafik 1.9 terlihat bahwa posisi giro milik pemerintah pada akhir triwulan IV-2008 menurun cukup signifikan dibandingkan posisi awal triwulan IV-2008. Penurunan giro tersebut menunjukkan adanya indikasi pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan daerah.



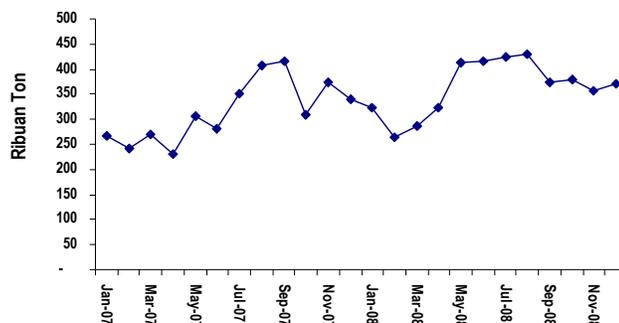
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.9. Perkembangan Posisi Giro Milik Pemerintah pada Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah

1.2. Investasi

Pertumbuhan investasi tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang pada triwulan IV-2008 diperkirakan mencapai 7,24% (yoy), mengalami

peningkatan apabila dibandingkan posisi triwulan IV-2007 sebesar 5,56%. Pertumbuhan investasi ini diperkirakan berasal dari investasi dalam negeri khususnya sektor konstruksi.

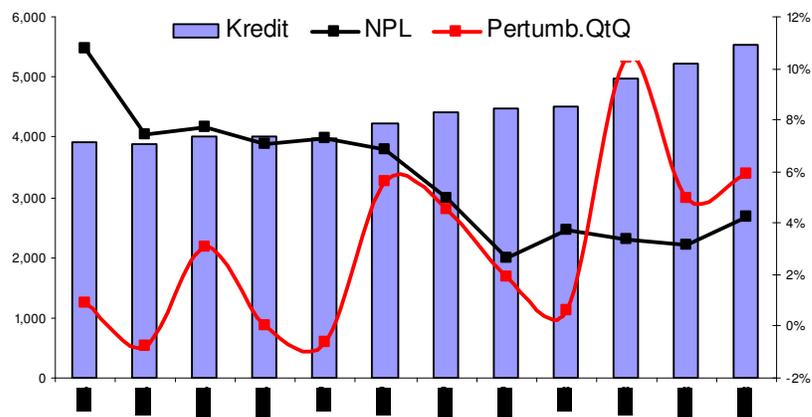


Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.10 Penjualan Semen di Jawa Tengah

Prompt indikator perkembangan investasi tercermin dari perkembangan penjualan semen di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan trend peningkatan dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu. Perkembangan penjualan semen di Jawa Tengah selama triwulan IV- tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan periode triwulan IV-2007, walaupun apabila dibandingkan dengan posisi triwulan III-2008 terlihat adanya penurunan. Konsumsi semen yang cukup tinggi ini diperkirakan bersumber dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan oleh pemerintah seperti perbaikan jalan raya, rekonstruksi bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Pantura dan selatan Jawa Tengah, pembangunan gedung baru, serta kegiatan pembangunan properti masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, peningkatan investasi tercermin dari trend peningkatan kredit investasi yang disalurkan oleh bank umum di wilayah Jawa Tengah. Jenis kredit investasi ini mempunyai proporsi yang terkecil dibandingkan kredit konsumsi dan kredit modal kerja, namun yang cukup menggembirakan adalah posisi baki debit dan pertumbuhan kredit ini tetap menunjukkan trend peningkatan. (grafik 1.11).



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 1.11. Perkembangan Kredit dan NPL Jenis Kredit Investasi Bank Umum di Wilayah Jawa Tengah

1.3. Ekspor

Perkembangan ekspor⁴ pada PDRB Jawa Tengah triwulan IV-2008 mengalami pertumbuhan sebesar 4,02% (yoy), sedangkan impor mengalami pertumbuhan sebesar 16,19% (yoy). Dari konfigurasi data ekspor dalam PDRB, diperkirakan perdagangan luar negeri mempunyai proporsi sebesar 20%-25% dari total angka ekspor PDRB, dan 75%-80% merupakan perdagangan antar provinsi.

Sementara itu dari data impor dalam perhitungan PDRB Jawa Tengah, diperkirakan 50%-55% merupakan impor dari luar negeri, sementara sisanya 45%-50% merupakan impor antar provinsi. Dari konfigurasi tersebut di atas, terlihat bahwa ekspor antar provinsi mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan angka ekspor dalam perhitungan PDRB Jawa Tengah dibandingkan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi impor, kontribusi impor dari luar negeri maupun dari provinsi lain mempunyai kontribusi yang hampir sama terhadap pembentukan angka impor dalam PDRB Jawa Tengah.

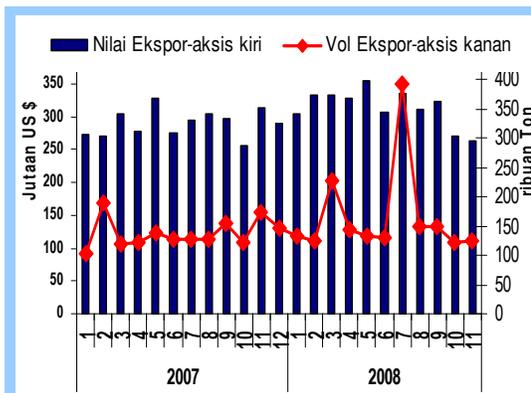
Pada triwulan IV-2008, ekspor luar negeri mulai menunjukkan trend perlambatan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi volume. Sementara ekspor antar provinsi diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil liaison yang dilakukan KBI Semarang, permintaan pasar luar negeri pada periode Tw IV-2008 menunjukkan adanya penurunan khususnya pasar AS dan Eropa. Penurunan ini terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil dan furniture/mebel. Meskipun demikian pelaku usaha di industri furniture dengan pasar yang lebih tersebar seperti ke Afrika dan Timur Tengah sampai saat ini relatif masih stabil.

⁴ Pengertian ekspor dan impor dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi

Para *contact liaison* menyatakan bahwa pasar ekspor dengan orientasi pasar tunggal ke wilayah Amerika Serikat akan mengalami dampak yang paling signifikan mengingat wilayah tersebut terkena dampak krisis yang paling parah. Reorientasi pasar ekspor pada saat ini dirasakan masih sulit dilakukan mengingat spesifikasi dan selera produk yang berbeda dan diperlukan waktu sekitar 1 – 2 tahun untuk membuka pasar baru. Keengganan para *contact liaison* membuka pasar selain ke AS dan Eropa selama ini terutama disebabkan proses yang lebih rumit dan tingkat kepercayaan yang masih rendah pada pasar selain di ke dua kawasan tersebut. Tentunya kondisi ini membutuhkan solusi dan perhatian dari dinas/ pihak terkait untuk mempertahankan kinerja ekspor Jawa Tengah pada level yang diharapkan.

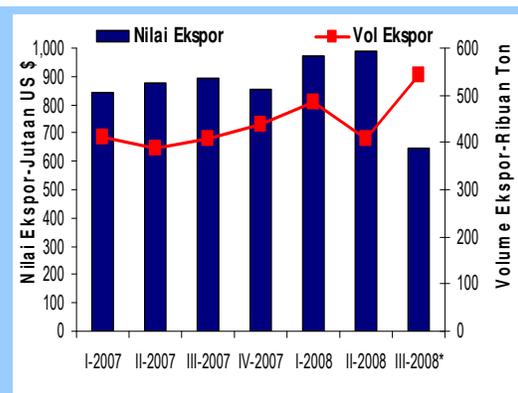
Sementara itu berdasarkan data ekspor dan impor yang diolah dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia, kinerja ekspor non migas Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 (data sampai dengan posisi November 2008) tercatat sebesar USD 533 juta. Dari sisi volume juga terlihat adanya trend penurunan yang cukup signifikan. Beberapa produk ekspor nilai ekspornya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) diantaranya adalah beberapa produk tekstil seperti serat stafel, kapas dan kain perca. Sementara itu untuk produk furniture dan produk kayu lainnya walaupun masih mengalami pertumbuhan positif namun mulai menunjukkan adanya perlambatan ekspor.

Sementara itu Ekspor Jawa Tengah periode Januari-November 2008 tercatat sebesar USD 3,46 milyar, meningkat 8,69% dibandingkan periode Januari-November 2007 yang tercatat sebesar USD 3,18 milyar. Kondisi tersebut disebabkan karena walaupun nilai ekspor Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mulai menunjukkan penurunan, namun pada triwulan I-III 2008 kinerja ekspor Jawa Tengah mencatat hasil yang lebih baik dibandingkan triwulan I-III 2007.



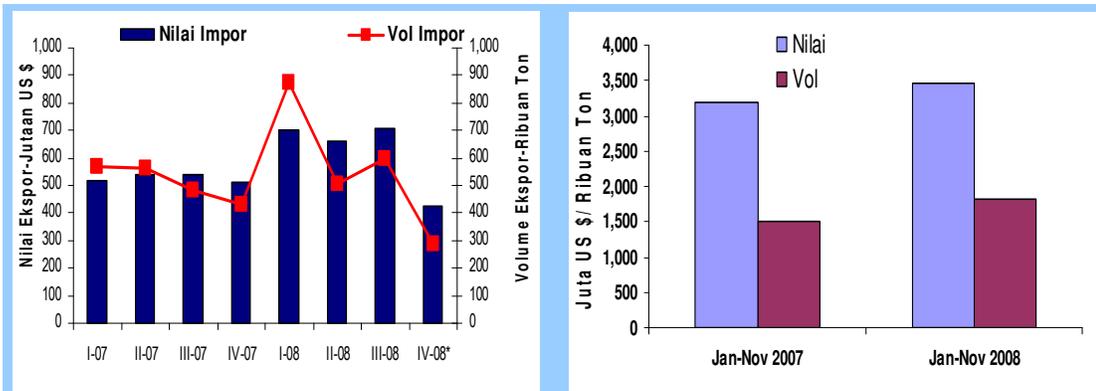
Sumber : DSM Bank Indonesia
*Tw III-2008 s.d. posisi November 2008

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Jawa Tengah Bulanan



Sumber : DSM Bank Indonesia
*Tw III-2008 s.d. posisi November 2008

Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Jawa Tengah Triwulanan



Grafik 1.14. Perkembangan Impor Jawa Tengah

Grafik 1.15. Perkembangan Nilai dan Vol Ekspor Jawa Tengah Periode Jan-Nov 2007 dan Jan-Nov 2008

Berdasarkan hasil liaison terhadap beberapa perusahaan berorientasi ekspor di Jawa Tengah, diperoleh informasi bahwa permintaan pasar luar negeri diperkirakan mencapai titik kritis pada Tw I-2009 dimana para *contact liaison* belum merasakan ada pesanan yang berarti khususnya dari pasar Amerika Serikat. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Jawa Tengah seperti perlambatan sektor industri dan pengurangan jumlah tenaga kerja.

TABEL 1.2.

**PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR NON MIGAS MENURUT KELOMPOK HS 2
PROPINSI JAWA TENGAH (USD RIBU)**

No	Komoditas	Tw IV-07	Tw I-08	Tw II-08	Tw III-08	Tw IV-08
1	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	144,348	157,339	149,901	159,310	95,142
2	Perabot, Penerangan Rumah	149,803	209,793	206,635	147,313	93,414
3	Kayu, Barang dari Kayu	91,972	101,821	124,836	125,324	65,172
4	Serat Stafel Buatan	94,301	101,932	96,325	84,749	38,081
5	Barang-barang Rajutan	51,477	49,265	49,989	51,220	36,261
6	Filamen Buatan	35,987	35,007	38,064	41,211	23,076
7	Kapas	45,262	48,042	42,185	41,047	22,474
8	Mesin / Peralatan Listik	25,520	39,680	33,485	43,050	18,324
9	Ikan dan Udang	24,975	22,664	35,486	36,609	15,570
10	Lemak & Minyak Hewan / Nabati	24,926	46,446	10,729	21,321	11,624
11	Kain Perca	18,260	19,237	20,934	18,593	11,137
12	Kopi, Teh, Rempah-rempah	7,133	5,582	8,175	11,806	7,905
13	Plastik dan Barang dari Plastik	12,658	13,762	13,826	16,191	7,900
14	Berbagai Makanan Olahan	4,134	4,710	10,988	12,271	7,829
15	Bulu Unggas	10,312	11,948	12,254	12,750	6,989
16	Lainnya	115,088	103,020	134,277	147,058	72,129
Total Ekspor		856,156	970,248	988,088	969,822	533,027

Sumber : KBI Semarang (diolah dari PPD1 DSM Bank Indonesia)
* angka sementara(s.d November 2008)

Sementara itu nilai impor non migas pada posisi triwulan IV-2008 (posisi sampai dengan November 2008) tercatat sebesar USD 426,95 juta.

Diperkirakan nilai impor ini akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Berdasarkan informasi dari hasil kegiatan liaison yang dilakukan Bank Indonesia Semarang, potensi penurunan impor disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika Serikat. Berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* (HS), komoditi impor non migas terbesar di Jawa Tengah adalah kapas, mesin/ pesawat mekanik dan gandum. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1.3.

TABEL 1.3.
PERKEMBANGAN REALISASI IMPOR NON MIGAS MENURUT KELOMPOK HS 2
PROPINSI JAWA TENGAH (USD RIBU)

No	Komoditas	Tw IV-07	Tw I-08	Tw II-08	Tw III-08	Tw IV-08
1	Kapas	109,076	133,207	116,316	111,315	95,198
2	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	67,764	68,201	84,919	80,761	57,004
3	Mesin / Peralatan Listik	39,791	49,592	51,947	66,500	33,954
4	Plastik dan Barang dari Plastik	35,558	36,200	40,309	48,888	22,932
5	Biji-bijian berminyak	12,219	24,395	21,558	39,191	21,157
6	Kain Rajutan	21,495	18,367	26,450	19,273	18,633
7	Serat Stafel Buatan	19,107	19,903	22,220	21,307	16,765
8	Gandum-gandum	25,725	78,267	47,986	50,163	11,356
9	Besi dan Baja	12,747	19,593	20,162	16,826	10,582
10	Filamen Buatan	11,402	11,074	12,767	10,719	10,516
11	Kendaraan dan Bagiannya	10,562	12,308	16,072	15,026	9,724
12	Benda-benda dari Besi dan Baja	6,752	7,445	6,518	11,690	7,559
13	Bahan Kimia Anorganik	4,925	5,172	7,045	7,960	7,383
14	Bahan Kimia Organik	11,318	11,477	14,547	17,344	7,319
15	Kayu, Barang dari Kayu	7,748	10,542	13,097	14,447	6,742
16	Lainnya	114,915	197,821	158,871	177,857	90,130
Total Ekspor		511,104	703,562	660,781	709,268	426,954

Sumber : KBI Semarang (diolah dari PPD1 DSM Bank Indonesia)

* angka sementara(s.d November 2008)

2. Analisis PDRB Sisi Penawaran

Dilihat dari sisi sektoral, pada triwulan IV-2008 seluruh sektor perekonomian diperkirakan mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi. Dibandingkan dengan posisi triwulan IV-2007, sebagian besar sektor ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi diperkirakan dialami oleh sektor pertanian sebesar 13,35%

(yoy). Sementara itu, berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ini adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant masing-masing sebesar 2,16% dan 0,96%. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang terutama menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan karena memberikan kontribusi negatif sebesar -0,80% terhadap total pertumbuhan.

TABEL 1.4
PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA (YOY)

No	Lapangan Usaha	Triwulanan				
		IV-07	I-08	II-08	III-08*)	IV-08**)
Pertumbuhan Year on Year						
1	Pertanian	-8.78%	-3.43%	5.89%	7.09%	13.35%
2	Pertambangan & Pengegalian	2.79%	1.46%	2.03%	5.54%	5.70%
3	Industri Pengolahan	10.37%	9.51%	5.03%	6.39%	-2.37%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	8.65%	5.35%	4.83%	4.86%	6.19%
5	Bangunan	5.56%	5.45%	6.04%	6.08%	8.44%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	5.99%	5.46%	5.76%	4.95%	4.40%
7	Pengangkutan & Komunikasi	8.25%	7.10%	6.67%	9.65%	6.67%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	12.29%	11.49%	8.32%	6.77%	4.91%
9	Jasa-Jasa	11.60%	11.20%	8.80%	6.69%	4.46%
Total PDRB		5.53%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%
Kontribusi terhadap Pertumbuhan						
1	Pertanian	-1.64%	-0.78%	1.25%	1.42%	2.16%
2	Pertambangan & Pengegalian	0.03%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%
3	Industri Pengolahan	3.34%	2.91%	1.59%	2.04%	-0.80%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0.07%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%
5	Bangunan	0.33%	0.30%	0.33%	0.35%	0.51%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	1.31%	1.15%	1.21%	1.05%	0.96%
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.42%	0.35%	0.33%	0.48%	0.35%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	0.44%	0.40%	0.30%	0.25%	0.19%
9	Jasa-Jasa	1.23%	1.10%	0.89%	0.69%	0.50%
Total PDRB		5.53%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%

Sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000)
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara (proyeksi KBI Semarang)

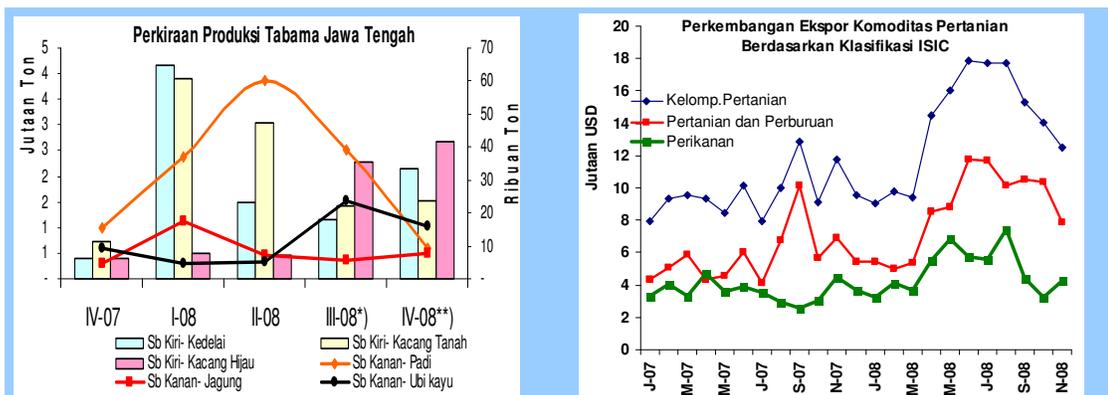
2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian dalam triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 13,35% (yoy). Angka perkiraan pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan triwulanan yang tertinggi selama 2 tahun terakhir. *Share of growth* atau kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan adalah sebesar 2,16%, atau yang terbesar pada triwulan ini.

Penyebab utama pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan ini adalah

faktor cuaca yang lebih baik dibandingkan periode triwulan IV-2007 serta adanya peningkatan produktivitas. Pendorong pertumbuhan sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), terutama jenis jagung dan ubi kayu di sebagian daerah Jawa Tengah. Selain tabama, produksi sub sektor perkebunan diperkirakan juga cukup baik pada triwulan ini.

Prompt indikator dari pertumbuhan sektor pertanian tercermin pada angka perkiraan produksi tanaman bahan makanan Propinsi Jawa Tengah dari Badan Pusat Statistik. Dari data tersebut terlihat adanya produksi tabama khususnya jagung dan ubi kayu pada triwulan ini posisinya lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan IV-2007. Sementara padi relatif menurun karena pada triwulan ini sedang memasuki masa tanam. Beberapa komoditas tabama lain seperti kedelai dan kacang tanah mengalami peningkatan produksi pula pada triwulan ini dibandingkan triwulan IV-2007.



Sumber : BPS, diolah

Sumber : DSM Bank Indonesia

*Tw IIV2008 s.d. posisi Nov2008

Grafik 1.16. Perkiraan Produksi Tabama Jawa Tengah

Grafik 1.17. Perkembangan Ekspor Kelompok Komoditas Pertanian

Prompt indikator lain dari peningkatan sektor pertanian adalah data ekspor kelompok komoditas pertanian berdasarkan klasifikasi ISIC. Dari data tersebut terlihat bahwa ekspor jenis kelompok komoditas pertanian mengalami peningkatan dibandingkan posisi triwulan IV-2007. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi pada sektor pertanian ini mengalami peningkatan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi 3 besar penyokong perekonomian Jawa Tengah, bersama sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Selain hal tersebut, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di wilayah Jawa Tengah. Sehingga pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu poin penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Selama beberapa periode terakhir, perubahan musim/ iklim menjadi salah satu ancaman utama yang mengganggu perkembangan sektor ini. Musim kemarau yang panjang maupun sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, menyebabkan gangguan pada produksi pertanian.

Guna meningkatkan kembali pertumbuhan sektor pertanian maka harus dilakukan upaya revitalisasi sektor pertanian yang komprehensif, meliputi perbaikan kondisi *on-farm* sektor pertaniannya sendiri serta peningkatan dukungan pada aktifitas *off-farm* melalui perbaikan peraturan/kebijakan dan meningkatkan dukungan pembiayaan dari perbankan. Selain itu penyediaan sarana produksi pertanian dan distribusi bahan baku maupun *output* pertanian merupakan upaya vital pula yang mendesak untuk dilakukan.

2.2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri pengolahan pada triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -2,37% (yoy). Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan terkecil selama 3 tahun terakhir. Karena sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah, maka kontraksi pada sektor ini menyebabkan secara keseluruhan perekonomian Jawa Tengah mengalami perlambatan.

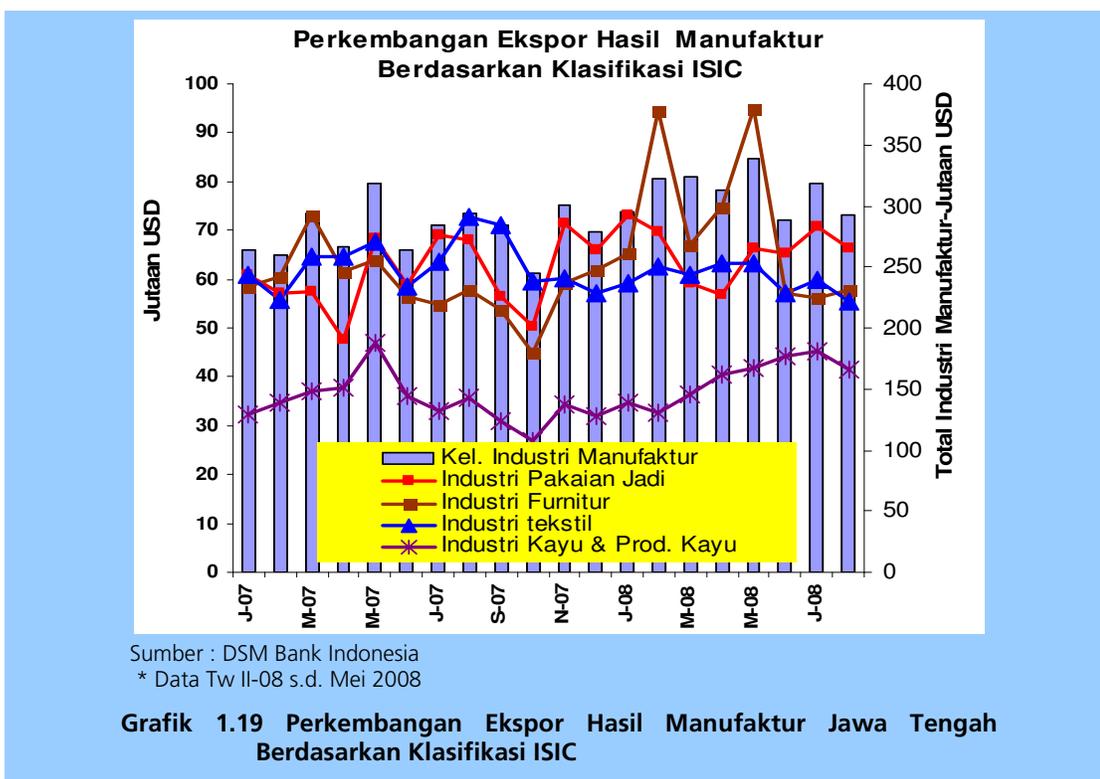


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.18 Indeks Produksi Industri Pengolahan Minyak di Jawa Tengah

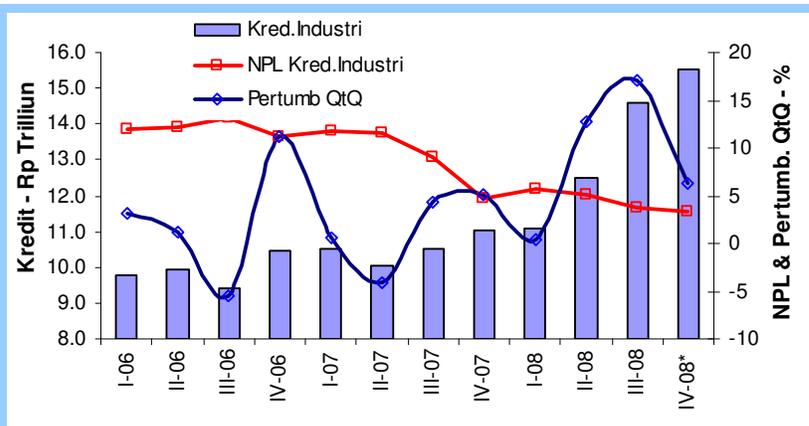
Prompt indikator lain dari perkembangan sektor industri adalah perkembangan indeks produksi industri pengolahan minyak di Jawa Tengah (Grafik 1.18). Terlihat bahwa indeks mengalami penurunan yang cukup signifikan pada triwulan IV-2008. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh adanya gangguan produksi pada sub sektor industri non migas, karena adanya proses pemeliharaan fasilitas kilang minyak di Jawa Tengah yang dilakukan pada periode triwulan laporan.

Prompt indikator lain dari perkembangan sektor industri pengolahan adalah Perkembangan Ekspor Hasil Manufaktur Jawa Tengah (Grafik 1.19). Dari data tersebut terlihat bahwa ekspor hasil manufaktur mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang lalu maupun triwulan IV-2007. Tren penurunan terutama terjadi pada hasil industri furnitur, hasil industri tekstil serta hasil industri kayu dan produk kayu.



Hal ini selaras dengan hasil *liaison* (kegiatan survei langsung ke lapangan) yang dilakukan oleh KBI Semarang pada triwulan IV-2009. Dari hasil *liaison* diperoleh informasi bahwa telah terjadi penurunan permintaan untuk produk furnitur dan tekstil (khususnya benang pintal dan kain) akibat menurunnya permintaan dari luar negeri. Selain itu kenaikan UMP dan depresiasi kurs rupiah menambah pula biaya produksi sehingga diperkirakan mempengaruhi nilai tambah sektor industri pengolahan di Jawa Tengah, khususnya tekstil.

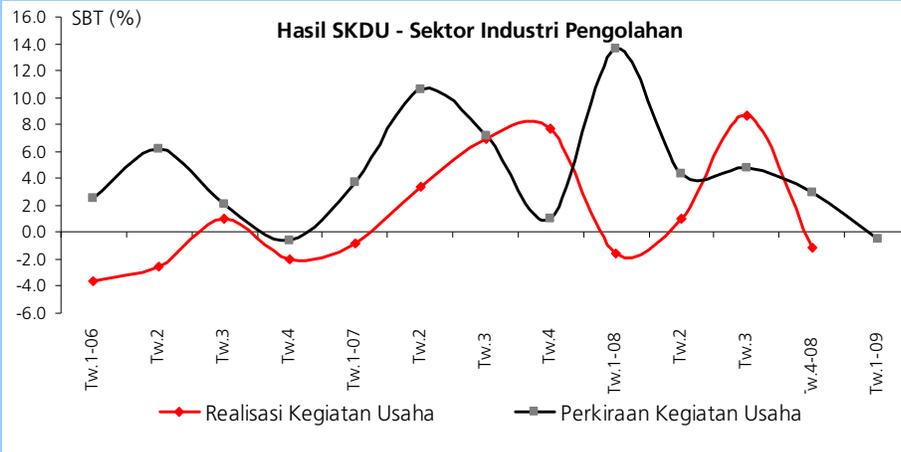
Dari sisi pembiayaan perbankan, perkembangan sektor industri terlihat dari perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit bank umum ke sektor industri. (Gradik 1.20) Secara nominal, posisi baki debit kredit sektor industri yang disalurkan oleh Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp15,54 trilyun atau mengalami peningkatan dibandingkan posisi triwulan IV-2007 sebesar Rp11,03 triliun atau posisi triwulan III-2008 sebesar Rp14,61 triliun. Demikian pula rasio kredit non lancar (*Non Performing Loans-NPLs*) juga menunjukkan adanya tren peningkatan kualitas. Namun berdasarkan pertumbuhan kredit secara triwulanan, terlihat adanya perlambatan pertumbuhan kredit untuk sektor industri ini (pertumbuhan *quarter to quarter*, QtQ) pada triwulan IV-2008. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi penurunan kegiatan usaha di sektor industri ini.



Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 1.20. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Industri oleh Bank Umum di Jawa Tengah

Prompt indikator lain dari perlambatan sektor industri adalah hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan IV-2008, secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hasil SKDU Triwulan III-2008 (Grafik 1.21) Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar pada penurunan kegiatan usaha tersebut.

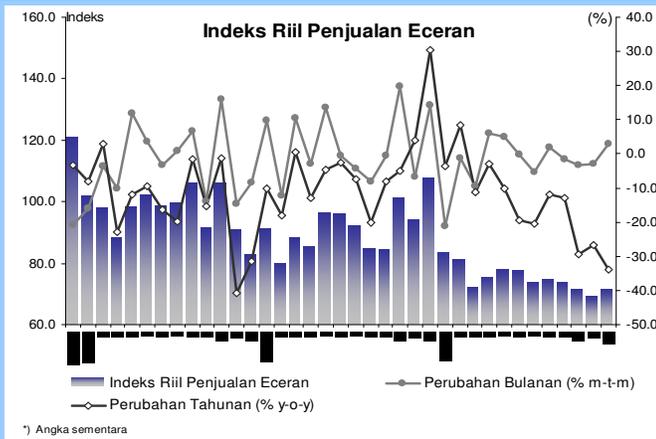


Sumber : SKDU , KSS Bank Indonesia

Grafik 1.21. Hasil SKDU – Sektor Industri Pengolahan

2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

Pada triwulan IV-2008 sektor PHR diperkirakan tumbuh sebesar **4,40% (yoy)**, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2007 yang tercatat sebesar **5,99% (yoy)**. Perlambatan pertumbuhan sektor PHR ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pergeseran hari raya lebaran dari triwulan IV ke triwulan III, sehingga puncak konsumsi masyarakat terjadi pada triwulan III-2008. Selain itu kondisi krisis keuangan internasional diperkirakan turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sehingga berdampak pula pada perlambatan sektor ini.

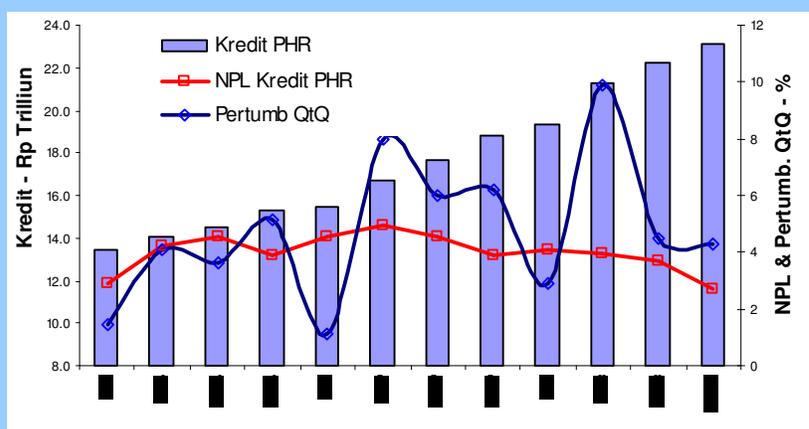


Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

Grafik 1.22. Perkembangan Indeks Riil Penjualan Eceran

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran yang dilakukan KBI Semarang, terlihat bahwa secara umum indeks penjualan eceran mengalami penurunan apabila dibandingkan posisi triwulan III-2008 maupun posisi triwulan IV-2007. Hal ini merupakan prompt indikator dari perlambatan di sektor PHR (Grafik 1.22)

Prompt indikator lain dari perlambatan sektor PHR adalah melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit oleh bank umum di Jawa Tengah untuk sektor ini (Grafik 1.23). Secara nominal, posisi kredit sektor PHR masih menunjukkan peningkatan, demikian pula kualitas kredit yang tercermin dari rasio NPLs juga memperlihatkan perbaikan. Namun pertumbuhan triwulanan (QtQ) untuk jenis kredit ini menunjukkan adanya perlambatan.



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 1.23. Penyaluran Kredit Sektor PHR oleh Bank Umum di Jawa Tengah

2.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan IV-2008 diperkirakan mencapai pertumbuhan sebesar 4,91% (yoy). Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2007 maupun triwulan III-2008. Perlambatan ini diperkirakan disebabkan karena adanya peningkatan suku bunga simpanan nasabah yang menyebabkan peningkatan biaya operasional. Selain itu penyaluran kredit juga cenderung mengalami perlambatan pada triwulan IV-2008. Namun secara umum, sektor ini masih tumbuh cukup baik dan stabil. Beberapa indikator yang menggambarkan cukup baiknya kondisi sektor keuangan, khususnya dapat dilihat dari indikator kinerja perbankan, seperti dana pihak ketiga, *outstanding* kredit, LDR (*loan to deposit ratio*) serta kualitas kredit yang tercermin dari rasio NPL (*non performing loans*) (Tabel 1.5).

TABEL 1.5
PERKEMBANGAN KEGIATAN BANK (RP MILIAR)

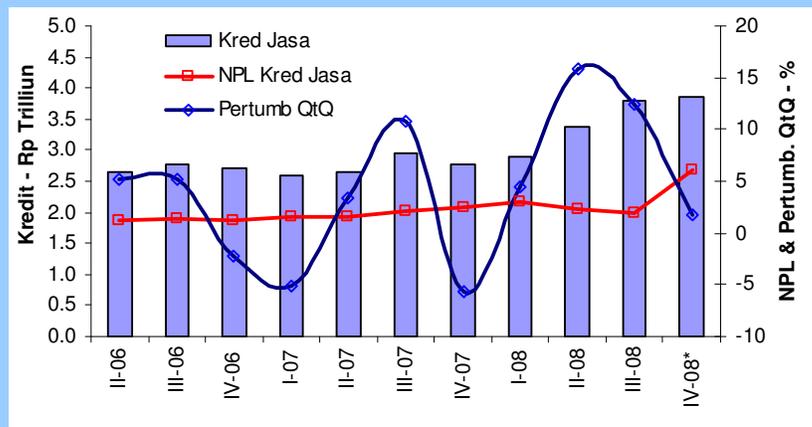
Indikator	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08	% YoY
Aset	93,197	94,342	99,100	107,486	111,811	19.97
DPK	74,845	74,783	78,761	81,185	86,075	15.00
- Giro	12,304	12,772	12,971	11,789	12,296	-0.07
- Tabungan	35,072	33,938	36,219	36,512	40,067	14.24
- Deposito	27,469	28,073	29,571	32,884	33,712	22.73
Kredit	62,333	64,040	71,397	77,110	79,331	27.27
LDR (%)	83.28	85.63	90.65	94.98	92.16	10.67
% NPL (%)	3.73	4.13	2.80	3.24	2.95	-21.02

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

2.5. Sektor Lainnya

Sektor jasa-jasa pada triwulan ini diperkirakan tumbuh sebesar **4,46% (yoy)**, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan **IV-2007** maupun **triwulan III-2008**. Perlambatan ini diperkirakan disebabkan pertumbuhan sub sektor jasa pemerintah yang sedikit melambat, karena pelaksanaannya sebagian telah terlaksana di periode triwulan sebelumnya. Sementara itu, perkembangan sub sektor jasa swasta lebih didorong oleh pertumbuhan sektor PHR yang menyebabkan meningkatnya jasa perseorangan dan rumah tangga.

Dari sisi pembiayaan perbankan, pertumbuhan triwulanan penyaluran kredit sektor jasa-jasa oleh bank umum di Jawa Tengah mengalami **perlambatan**. Sementara itu, secara nominal tetap terjadi peningkatan posisi kredit untuk sektor jasa. Namun demikian, rasio kredit non lancar (NPLs) sektor jasa menunjukkan adanya peningkatan ke level 6,03%, yang disebabkan oleh meningkatnya NPLs di sub sektor jasa dunia usaha (Grafik 1.24).



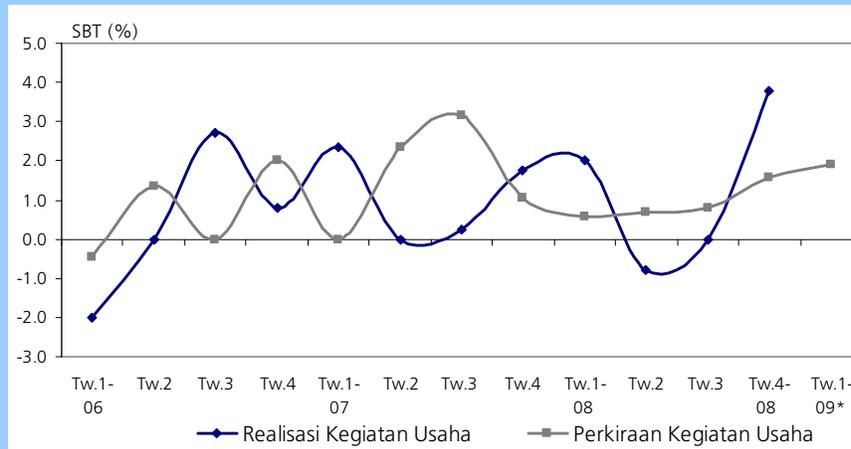
Grafik 1.24 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Jasa oleh Bank Umum di Jawa Tengah

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan III-2008 diperkirakan tumbuh sebesar 6,67% (yoy), melambat dibandingkan posisi triwulan IV-2007 maupun triwulan III-2008. Perlambatan ini diperkirakan disebabkan oleh pergeseran faktor seasonal, yaitu hari raya lebaran dari triwulan IV ke triwulan III sehingga puncak kegiatan di sektor ini telah terjadi pada periode yang lalu.

Pada periode triwulan IV-2008, sektor bangunan diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 8,44% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2007 maupun triwulan III-2008. Hal ini antara lain disebabkan cukup banyaknya proyek-prpyek infrastruktur yang dilaksanakan pada triwulan ini. Diantara proyek infrastruktur tersebut adalah rehabilitasi jalan antar kota dan propinsi, pembangunan beberapa sarana publik dan perkatoran di beberapa kota di Jawa Tengah. Terlebih pada triwulan IV-2008 merupakan akhir tahun anggaran di berbagai instansi, sehingga banyak realisasi program kerja pembangunan fisik yang dilakukan pada periode ini.

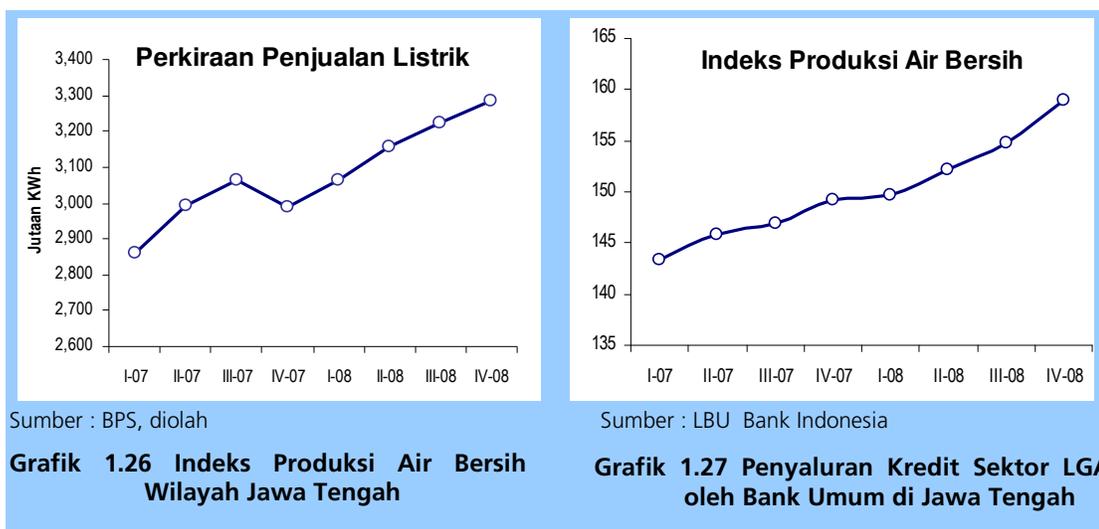
Peningkatan pertumbuhan sektor bangunan tersebut selaras dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KBI Semarang pada triwulan IV-2008. Hasil SKDU menunjukkan bahwa realisasi kegiatan usaha di sektor bangunan mengalami peningkatan dibanding periode triwulan lalu maupun triwulan IV-2007 (Grafik 1.25). Diperkirakan peningkatan kegiatan di sektor ini akan berlanjut di periode yang akan datang.

Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial Triwulan IV-2008 yang juga dilakukan oleh KBI Semarang, jumlah rumah yang dibangun responden pengembang meningkat 1,15%, terutama pembangunan untuk rumah tipe sederhana.



Grafik 1.25 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor Bangunan

Sektor listrik, gas dan air (LGA) diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (yoy). Pendorong dari pertumbuhan ini terutama adalah sub sektor air bersih yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,51% (yoy), sementara sektor listrik diperkirakan tumbuh sebesar 6,15%. **Prompt indikator** dari pertumbuhan sub sektor air bersih terlihat dari indeks produksi air bersih dan penjualan listrik di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan peningkatan. (Grafik 1.26 dan 1.27).



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

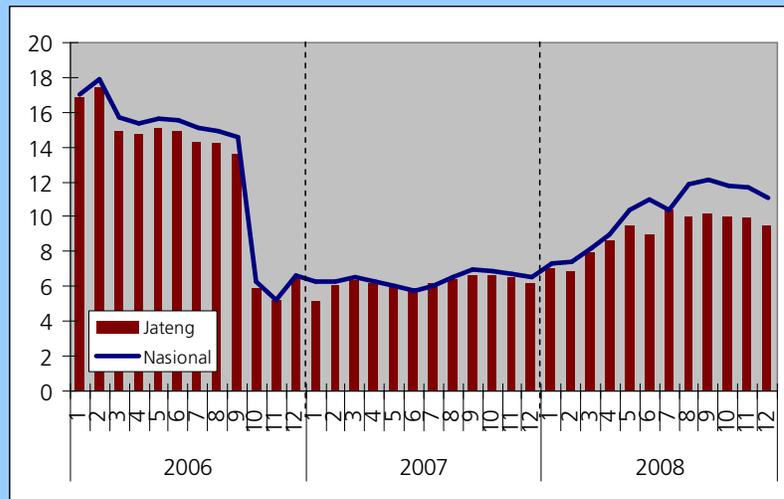
Perkembangan Inflasi

Secara kuartalan (qtq), tekanan terhadap harga-harga di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi pada triwulan IV 2008 tercatat sebesar 0,28% (qtq), menurun dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya (2,89%). Sementara itu, apabila dihitung secara tahunan, inflasi di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 adalah sebesar 9,55% (yoy), menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,21%.

Sumber inflasi kuartalan di triwulan laporan berasal dari kelompok kesehatan, kelompok perumahan, dan kelompok sandang. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi penurunan laju inflasi dalam triwulan IV-2008 adalah kelompok transpor yang mengalami penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) cukup signifikan dan stabilnya IHK kelompok bahan makanan. Penurunan IHK kelompok transpor terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM pada bulan Desember 2008. Sementara itu, stabilnya harga-harga bahan makanan antara lain disebabkan oleh stok yang masih mencukupi, serta perkembangan harga beberapa komoditas di pasar internasional yang masih mengalami *trend* penurunan.

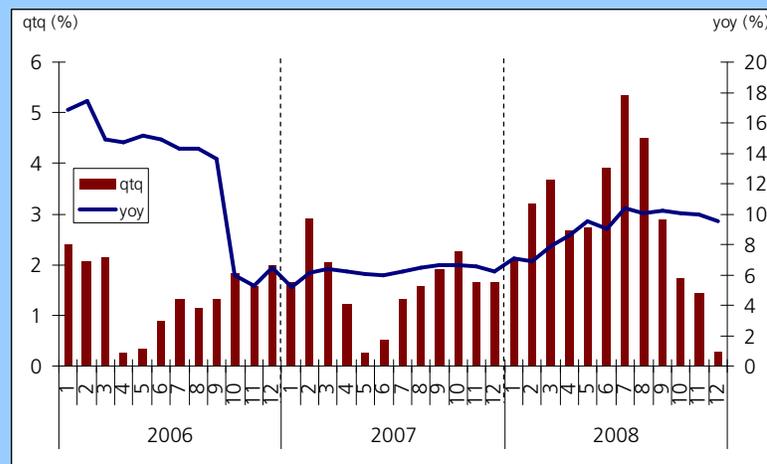
Dalam triwulan laporan ini, inflasi kuartalan (qtq) di Jawa Tengah tercatat relatif lebih rendah dari angka inflasi nasional (0,54%) setelah dalam dua triwulan terakhir selalu tercatat relatif lebih tinggi dari angka inflasi nasional. Namun, apabila dilihat secara tahunan (yoy), inflasi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional sejak bulan Agustus 2007.

Sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.1. yang menggambarkan perbandingan antara inflasi tahunan (yoy) di Jawa Tengah dan nasional, terlihat bahwa inflasi Jawa Tengah selalu cenderung lebih rendah dari inflasi nasional sejak bulan Agustus 2007. Perbedaan inflasi Jawa Tengah dengan nasional semakin melebar sejak diterapkannya Survei Biaya Hidup (SBH) 2007 oleh BPS, yaitu sejak bulan Juni 2008. Dari pola grafis tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan SBH 2007, inflasi tahunan di Jawa Tengah relatif lebih rendah dan stabil dibandingkan nasional. Perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat dalam Grafik 2.1, sedangkan inflasi kuartalan dan tahunan Jawa Tengah dapat dilihat dalam Grafik 2.2.



Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 2.1.
PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (YOY)
JAWA TENGAH DAN NASIONAL



Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 2.2.
PERKEMBANGAN INFLASI JAWA TENGAH
SECARA KUARTALAN (QTQ) DAN TAHUNAN (YOY)

2.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Inflasi berdasarkan kelompok barang secara kuartalan menunjukkan kecenderungan yang makin menurun, setelah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2008. Kelompok kesehatan, kelompok perumahan, dan kelompok sandang menjadi sumber utama inflasi kuartalan Jawa Tengah triwulan ini. Hal itu menunjukkan bahwa perhatian lebih besar perlu diarahkan pada kelompok non makanan, karena bobot

inflasi kelompok non makanan mengalami peningkatan sejak diterapkannya SBH 2007 sebagai dasar penghitungan inflasi.

2.1.1. Inflasi Kuartalan (qtq)

Kenaikan harga tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok kesehatan (2,56%), diikuti oleh kelompok perumahan (1,77%) dan kelompok sandang (1,76%). Kenaikan tertinggi di kelompok kesehatan terutama terjadi pada sub kelompok jasa kesehatan yang naik rata-rata 5,86%. Inflasi kelompok perumahan terutama terjadi pada sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air yang mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 2,11% dibandingkan dengan harga September 2008. Hal itu terutama disebabkan oleh kenaikan harga minyak tanah dan gas elpiji. Harga minyak tanah di Jawa Tengah merupakan harga yang berlaku di pasar, seiring dengan adanya program pemerintah dalam melakukan konversi dari minyak tanah ke gas elpiji. Sementara itu kenaikan harga gas elpiji lebih terkait dengan pasokan yang kurang lancar di beberapa daerah. Pada kelompok sandang, kenaikan tertinggi terjadi pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 7,34% (tabel 2.1). Kenaikan ini lebih dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut terkait dengan adanya perayaan hari lebaran (Oktober) dan natal (Desember).

TABEL 2.1
INFLASI JAWA TENGAH KUARTALAN
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; QTQ)

NO	KELOMPOK	Dec-07	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08
	UMUM	1.66	3.68	3.91	2.89	1.75	1.42	0.28
1	BAHAN MAKANAN	3.43	6.60	2.53	3.24	2.51	1.17	0.07
2	MAKANAN JADI	1.16	5.22	1.61	4.63	2.34	2.24	0.92
3	PERUMAHAN	1.15	3.01	4.76	3.32	1.32	1.84	1.77
4	SANDANG	3.40	3.31	0.12	1.71	1.73	1.77	1.76
5	KESEHATAN	1.09	2.57	1.54	0.81	1.55	2.73	2.56
6	PENDIDIKAN	0.37	0.05	1.30	2.66	2.58	0.78	0.84
7	TRANSPOR	0.37	0.33	10.42	0.65	0.41	0.10	-3.92

Sumber : BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS

Kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi mengalami perubahan harga yang relatif stabil dalam triwulan ini, yaitu masing-masing 0,07% (qtq) dan 0,92% (qtq). Hal itu disebabkan oleh stabilnya harga sebagian besar komoditas bahan makanan dan makanan jadi. Beras sebagai komoditas dengan bobot tertinggi dalam kelompok bahan makanan, harganya cukup stabil seiring

dengan terjaganya pasokan dalam triwulan laporan. Pasokan beras pada triwulan IV-2008 mengalami kenaikan karena daerah pemasok masih pada periode panen.

Berdasarkan data Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, persediaan beras yang dimiliki dalam musim hujan di akhir tahun 2008 cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran rutin hingga 6 bulan ke depan. Stok beras yang dikuasai Perum Bulog Jateng pada Desember 2008 mencapai sekitar 271,5 ribu ton atau cukup memenuhi kebutuhan penyaluran beras terutama untuk keluarga miskin (raskin) hingga bulan Mei 2009. Stok beras Perum Bulog Jateng tersebut diperkirakan akan bertambah karena masih berlangsung pengadaan pangan di Jateng, bahkan pasokan beras pengadaan pangan dalam beberapa minggu di bulan Desember 2008 setiap hari mencapai sekitar 500 ton setara beras.

Dalam triwulan laporan, beberapa harga komoditas di kelompok bahan makanan di luar beras yaitu daging, ikan, telur, susu dan buah-buahan relatif stabil. Pasokan beberapa komoditas tersebut ke pasar tradisional yang menjadi tempat Survei Pemantauan Harga (SPH) KBI Semarang pada bulan Oktober-Desember relatif normal. Berdasarkan SPH pada minggu terakhir bulan Desember 2008, penurunan harga terbesar dialami oleh komoditi telur ayam ras (-11,50%), diikuti oleh bawang merah (-7,55%), minyak goreng (-4,48%), daging ayam ras (-2,81%), daging sapi (-0,54%) dan beras (-0,38%).

Sementara itu, kenaikan harga tertinggi di kelompok bahan makanan terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan masing-masing 7,98% dan 7,37%. Berdasarkan SPH KBI Semarang, sayur-sayuran yang mengalami kenaikan harga pada bulan Desember, antara lain adalah cabe keriting yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp 5.500/kg menjadi sekitar Rp 10.000/kg. Cabe hijau semula Rp 1.100/kg menjadi Rp 4.500/kg. Menurut pedagang dan petani cabe, naiknya harga cabe tersebut disebabkan oleh hujan yang terus menerus sehingga merusak tanaman cabe. Harga cabe saat ini merupakan harga termahal yang pernah ada, yang biasanya naik pada saat lebaran tetapi mengalami puncak justru pada saat musim hujan. Kenaikan harga cabe juga mempengaruhi daya beli masyarakat, diindikasikan dari menurunnya penjualan harian pedagang dari 5 ton menjadi 3 ton. Selain cabe, harga berbagai komoditas sayuran juga ikut naik dipengaruhi oleh berakhirnya musim kemarau, antara lain seperti sawi hijau, kentang, bayam dan kacang panjang.

Kondisi tersebut sejalan dengan data Disperindag Kota Semarang pada akhir tahun 2008 bahwa stok dan harga sembako di pasar kota Semarang termasuk stabil. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga. Angka stok yang tersedia jauh lebih besar dari angka kebutuhan hingga akhir tahun. Stok komoditas meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, daging ayam dan daging sapi.

TABEL 2.2.
KEBUTUHAN DAN POSISI STOK
HINGGA AKHIR TAHUN 2008

Komoditi	Kebutuhan	Stok
Beras	300 ton	320 ton
Gula Pasir	130 ton	205 ton
Minyak Goreng	26 ton	27,5 ton
Tepung Terigu	5.200 sak	9.500 sak
Telur Ayam	2,7 ton	3 ton
Daging Ayam	18 ton	20 ton
Daging Sapi	8,25 ton	10 ton

Sumber: Disperindag Kota Semarang

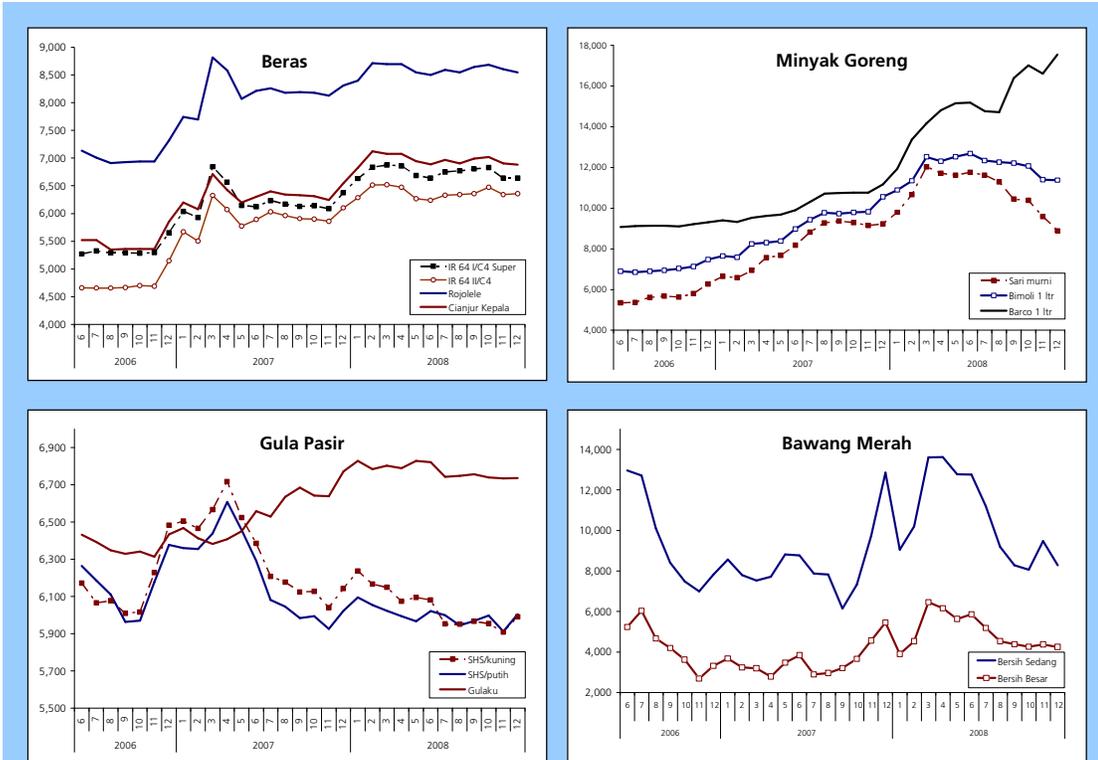
Sementara itu, berdasarkan informasi dari SPH yang dilakukan oleh KBI Semarang, dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi harga beberapa komoditas penting pada triwulan IV-2008 yang dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

TABEL 2.3.
KONDISI HARGA BEBERAPA KOMODITAS BAHAN MAKANAN TRIWULAN IV-2008

Komoditi	Kondisi Harga	Faktor Penyebab	Keterangan
Beras	Stabil (sedikit turun -0,38%)	<ul style="list-style-type: none"> - Stok beras cukup - Daya beli masyarakat melemah sehingga masyarakat cenderung membeli eceran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasokan beras ke pusat perdagangan beras Pasar Dargo Semarang lancar (60-75 ton per hari). - Stok beras di gudang-gudang Bulog se Jateng mampu memenuhi kebutuhan hingga 6 bulan ke depan
Daging sapi, daging ayam & telur ayam	Stabil dan cenderung turun (penurunan harga sekitar 3-8%)	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan cenderung stabil 	<ul style="list-style-type: none"> - Stok daging sapi, ayam dan telur mencukupi
Sayur mayur	Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga	<ul style="list-style-type: none"> - Musim hujan 	-
Minyak Goreng	Relatif Stabil, sedikit turun	<ul style="list-style-type: none"> - Pasokan cukup memadai 	-

Sumber: Survei Pemantauan Harga KBI Semarang

Beberapa komoditas penting yang terpantau dalam SPH KBI Semarang menunjukkan perkembangan harga cukup stabil, seperti beras, gula pasir, bawang merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam dan minyak goreng. Hal itu menunjukkan bahwa laju inflasi triwulan ini relatif stabil, meskipun memperoleh tekanan yang cukup kuat. Perkembangan harga beberapa komoditas hasil SPH KBI Semarang dapat dilihat dalam Grafik 2.3.



Sumber : data mingguan SPH KBI Semarang, diolah

GRAFIK 2.3.

GRAFIK BEBERAPA KOMODITAS HASIL SPH KBI SEMARANG

TABEL 2.4.
SUB KELOMPOK BARANG DAN JASA
DENGAN KENAIKAN HARGA KUARTALAN (QTQ) TERTINGGI

NO	KELOMPOK	Dec-06	Dec-07	Dec-08
	UMUM / TOTAL	2.00	1.66	0.28
1	BAHAN MAKANAN	5.73	3.43	0.07
	SAYUR-SAYURAN	8.48	1.86	7.98
	BUMBU-BUMBUAN	23.21	21.38	7.37
2	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	1.95	1.16	0.92
	TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL	2.85	0.98	2.41
	MAKANAN JADI	1.80	1.53	0.68
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	0.64	1.15	1.77
	BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR	0.23	0.13	2.11
	BIAYA TEMPAT TINGGAL	0.97	1.87	1.94
4	SANDANG	1.22	3.40	1.76
	BARANG PRIBADI DAN SANDANG LAINNYA	2.58	9.20	7.34
	SANDANG ANAK-ANAK	0.63	1.49	0.48
5	KESEHATAN	0.06	1.09	2.56
	JASA KESEHATAN	0.52	0.22	5.86
	OBAT-OBATAN	-2.93	0.41	1.06
6	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	0.13	0.37	0.84
	PERLENGKAPAN / PERALATAN PENDIDIKAN	0.48	0.01	1.39
	REKREASI	0.50	0.67	1.35
7	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0.74	0.37	-3.92
	SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR	0.04	0.09	0.14
	JASA KEUANGAN	0.00	0.00	0.11

Sumber : BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok komoditas adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS

2.1.2. Inflasi Tahunan (yoy)

Secara tahunan, inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami penurunan (9,55%) dibandingkan triwulan sebelumnya (10,21%). Tekanan harga tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, kelompok bahan makanan, dan kelompok makanan jadi (tabel 2.5). Kenaikan pada kelompok perumahan bersumber dari kenaikan harga bahan bakar dan biaya tempat tinggal. Kenaikan harga bahan bakar antara lain dipengaruhi oleh pasokan gas elpiji yang kurang lancar di beberapa daerah, pasca dilakukannya konversi minyak tanah ke gas elpiji. Kenaikan biaya tempat tinggal disebabkan oleh naiknya harga bahan bangunan seperti batu bata, semen, genteng, cat tembok, sewa rumah, kontrak rumah, pasir dan tukang bukan mandor.

Kenaikan pada kelompok bahan makanan bersumber dari tingginya kenaikan di sub kelompok daging dan hasil-hasilnya, serta sub kelompok sayur-sayuran. Kenaikan IHK pada kedua sub komoditas ini disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap kedua sub kelompok tersebut pada saat perayaan hari raya lebaran di bulan

Oktober, serta perayaan hari raya natal dan tahun baru pada akhir Desember 2008. Selain itu, kenaikan harga daging juga dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak.

Kenaikan harga pada kelompok makanan jadi bersumber dari kenaikan harga pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol, serta sub kelompok makanan jadi. Kenaikan pada kelompok barang ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh produsen yang kemudian dibebankan pada harga jual ke konsumen. Tingginya permintaan terhadap kedua sub kelompok tersebut ketika hari raya lebaran, natal dan tahun baru juga ikut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.

TABEL 2.5.
INFLASI JAWA TENGAH TAHUNAN
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; YOY)

NO	KELOMPOK	Dec-07	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08
	UMUM / TOTAL	6.24	7.95	9.01	10.21	10.04	9.98	9.55
1	BAHAN MAKANAN	9.87	13.36	17.33	16.71	16.23	14.74	12.91
2	MAKANAN JADI	7.93	10.69	9.74	13.17	12.84	13.21	12.90
3	PERUMAHAN	4.72	5.34	9.73	12.77	12.71	13.44	13.46
4	SANDANG	7.11	9.69	9.13	8.78	7.85	6.97	7.06
5	KESEHATAN	3.30	5.50	6.40	6.13	6.87	8.14	7.68
6	PENDIDIKAN	7.42	7.31	8.54	4.44	4.73	4.82	4.93
7	TRANSPOR	1.13	1.18	11.20	11.92	11.01	11.68	7.14

Sumber : BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok komoditas adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS

Kenaikan IHK kelompok transpor triwulan ini tercatat sebesar 7,14% (yoy), menurun cukup signifikan dari triwulan sebelumnya 11,92% (tabel 2.5). Kenaikan harga kelompok transpor tersebut paling besar disebabkan oleh kenaikan harga subkelompok jasa keuangan dan sub kelompok transpor. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kenaikan IHK sub kelompok transpor mengalami penurunan dari 18,81% menjadi 11,55%. Hal itu disebabkan terutama oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM pada bulan Desember 2008.

TABEL 2.6.
SUB KELOMPOK BARANG DAN JASA
DENGAN KENAIKAN HARGA TAHUNAN (YOY) TERTINGGI

NO	KELOMPOK	Dec-06	Dec-07	Dec-08
	UMUM / TOTAL	6.50	6.24	9.55
1	BAHAN MAKANAN	13.93	9.87	12.91
	DAGING-DAN HASIL-HASILNYA	3.89	11.18	27.10
	SAYUR-SAYURAN	27.66	6.32	25.85
2	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	6.58	7.93	12.90
	TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL	10.21	13.22	18.55
	MAKANAN JADI	5.51	8.19	13.99
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	3.52	4.72	13.46
	BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIR	0.78	0.38	18.62
	BIAYA TEMPAT TINGGAL	5.36	7.15	13.03
4	SANDANG	5.81	7.11	7.06
	BARANG PRIBADI DAN SANDANG LAINNYA	11.98	18.36	14.88
	SANDANG LAKI-LAKI	7.08	5.10	5.82
5	KESEHATAN	1.70	3.30	7.68
	OBAT-OBATAN	-1.86	1.94	12.77
	JASA KESEHATAN	1.96	0.95	7.05
6	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	10.79	7.42	4.93
	PERLENGKAPAN / PERALATAN PENDIDIKAN	4.60	6.14	36.17
	REKREASI	7.02	0.56	9.04
7	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	1.28	1.13	7.14
	JASA KEUANGAN	6.72	0.14	16.30
	TRANSPOR	1.61	1.40	11.55

Sumber : BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok komoditas adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS

Apabila dilihat komoditas penyebab inflasi setiap bulannya, BPS mencatat beberapa komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi triwulan ini. Inflasi kelompok bahan makanan yang menjadi pemicu utama inflasi Jawa Tengah triwulan IV-2008, berasal dari subkelompok daging dan hasil-hasilnya, serta subkelompok sayur-sayuran (Tabel 2.6.). Beberapa komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, daging ayam kampung, daging sapi, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, sawi hijau, bayam, ketimun, terong panjang, wortel, tomat sayur, dan kentang. Dalam kelompok makanan jadi, komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi triwulan ini di antaranya telur asin, rokok kretek, rokok kretek filter, gulai, mie, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas yang menyumbang inflasi dalam kelompok perumahan antara lain bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), tukang bukan mandor, kontrak rumah, semen, pasir, dan genteng. Beberapa komoditas penyebab inflasi Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

TABEL 2.7.
BEBERAPA KOMODITAS PENYEBAB INFLASI TIAP BULAN
PADA TRIWULAN IV-2008

No	Oktober	November	Desember
1.	Kelompok Bahan Makanan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Udang basah - Bandeng - Cumi - Daging ayam ras - Daging ayam kampung - Daging sapi - Ikan panggang - Telur ayam ras - Sawi hijau - Wortel - Kentang - Jeruk - Beras - Cabe merah - Bawang merah - Mie instan - Jeruk 	<ul style="list-style-type: none"> - Bawang merah - Nangka muda - Buncis - Sawi hijau - Daun bawang - Ketimun - Bayam - Terong panjang - Cabe merah - Tomat sayur - Wortel 	<ul style="list-style-type: none"> - Beras - Cabe merah - Cabe rawit - Kentang - Jagung manis - Nangka muda - Labu siam - Daun bawang - Gula merah - Minyak goreng
2.	Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sate - Rokok kretek - Kue basah - Gula pasir 	<ul style="list-style-type: none"> - Rokok kretek - Rokok kretek filter - Gulai - Mie 	<ul style="list-style-type: none"> - Telur asin - Rokok kretek filter - Rokok kretek
3.	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak rumah - Batu bata - Genteng - Kayu balokan - Pasir - Besi beton - Semen - Cat tembok - Upah pembantu RT 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan bakar rumah tangga - Sewa rumah - Batu bata - Cat tembok - Semen - Genteng 	<ul style="list-style-type: none"> - Batu bata - Tukang bukan mandor - Bahan bakar RT - Kontrak rumah - Pasir - Semen
4.	Kelompok Sandang		
	<ul style="list-style-type: none"> - Emas perhiasan - Celana panjang jin - Handuk - Kaca mata - Mesin cuci 	<ul style="list-style-type: none"> - Emas perhiasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Emas perhiasan
5.	Kelompok Kesehatan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif rumah sakit - Bedak - Sabun mandi - Pembersih/penyegar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis - Tarif rumah sakit - Check up - Dokter umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Obat dengan resep - Obat flu - Obat gosok - Pasta gigi
6.	Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga		
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pddk Perguruan Tinggi - Tas sekolah - Lemari es - Sepatu olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pddk Perguruan Tinggi - Televisi berwarna - Laptop - Komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop - Tas sekolah - Televisi berwarna
7.	Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Angkutan antar kota - Angkutan udara - Tarif kereta api - Ban luar mobil 	-	-

Sumber : BPS, diolah

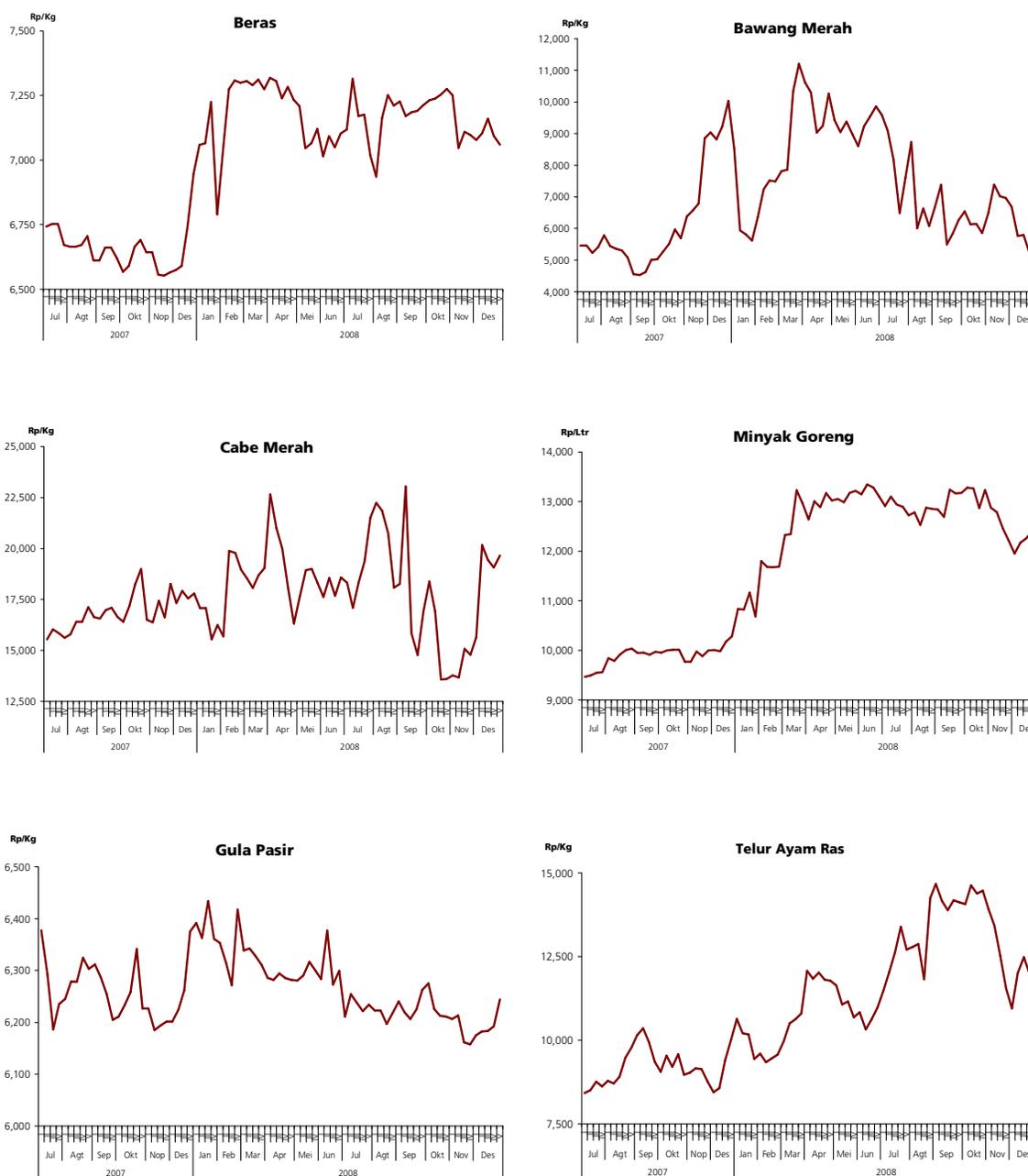
Namun demikian, BPS juga mencatat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau memberikan andil deflasi pada triwulan ini, antara lain minyak goreng, cabe rawit, telur ayam ras, beras bensin, pertamax dan solar. Beberapa komoditas yang memberikan andil penurunan harga (deflasi) Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.8.

TABEL 2.8.
BEBERAPA KOMODITAS YANG MENGALAMI PENURUNAN IHK (DEFLASI)
PADA TRIWULAN IV-2008

Oktober	November	Desember
<ul style="list-style-type: none"> – Minyak goreng – Cabe rawit – Bawang putih – Bayam – Petai – Tahu mentah – Tempe 	<ul style="list-style-type: none"> – Minyak goreng – Telur ayam ras – Daging ayam ras – Daging ayam kampung – Daging sapi – Kelapa – Bandeng – Ikan panggang/mangut – Udang basah – Jagung manis – Beras – Salak – Jeruk – Apel – Bensin – Pertamax 	<ul style="list-style-type: none"> – Daging ayam ras – Daging kambing – Ayam hidup – Ayam nuggets – Bandeng – Lele – Udang basah – Ikan panggang/mangut – Telur ayam ras – Kacang panjang – Bawang merah – Bawang putih – Jeruk – Salak – Sabun detergen bubuk – Bensin – Solar

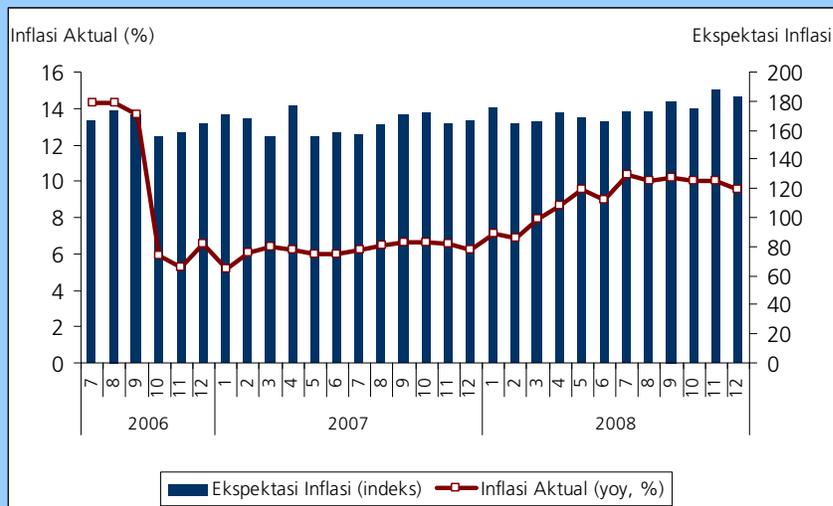
Sumber : BPS, diolah

Perkembangan harga beberapa komoditas tersebut sesuai dengan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang. SPH KBI Semarang menempatkan komoditas cabe merah sebagai komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi secara tahunan (yoy), yaitu sebesar 49,16%. Beberapa komoditas lain yang mencatat kenaikan harga cukup tinggi adalah bawang merah, bandeng, ayam goreng, dan kentang masing-masing sebesar 41,45%, 31,20%, 28,30%, dan 26,99%. Perkembangan harga beberapa komoditas strategis hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang dapat dilihat pada Grafik 2.4.



GRAFIK 2.4
PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA KOMODITAS STRATEGIS
HASIL SURVEI PEMANTAUAN HARGA (SPH) MINGGUAN
TRIWULAN III & IV 2007 – TRIWULAN IV 2008
DI KOTA SEMARANG

Berdasarkan Survei Konsumen (tabel 2.5), sebagian besar responden memperkirakan dalam triwulan laporan akan terjadi inflasi tahunan yang sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurut responden survei, kelompok barang dan jasa yang akan mengalami peningkatan IHK cukup signifikan adalah kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Perkembangan ekspektasi inflasi hasil Survei Konsumen dibandingkan dengan inflasi tahunan Jawa Tengah aktual setiap bulan dapat dilihat pada grafik 2.5.



Sumber: KBI Semarang dan BPS

Keterangan: indeks = (%turun - % naik) + 100

GRAFIK 2.5

PERKEMBANGAN EKSPEKTASI INFLASI HASIL SURVEI KONSUMEN DAN INFLASI TAHUNAN AKTUAL DI JAWA TENGAH

2.2. Inflasi Empat Kota di Jawa Tengah

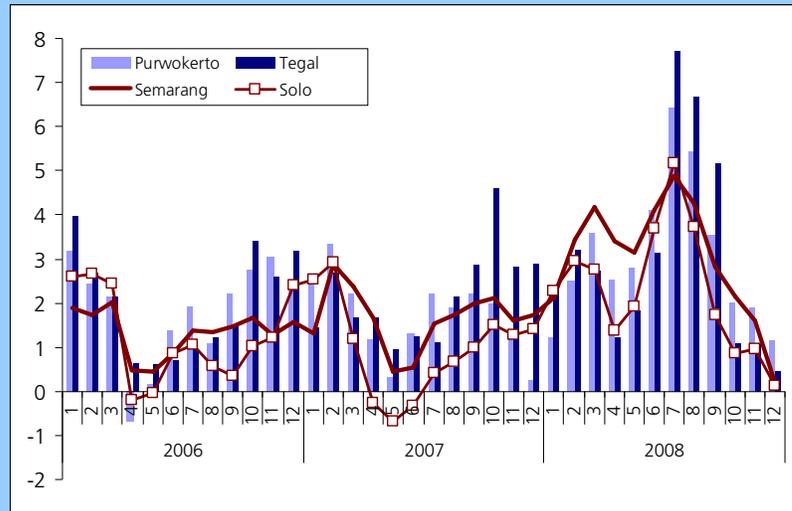
Laju inflasi kuartalan (qtq) maupun tahunan (yoy) di 4 kota di Jawa Tengah pada triwulan ini mengalami kecenderungan penurunan di semua kota. Analisis mengenai inflasi 4 kota tersebut akan diuraikan di bawah ini.

2.1.1. Inflasi Kuartalan (qtq)

Berdasarkan penghitungan BPS, laju inflasi kuartalan (qtq) empat kota di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal pada triwulan IV-2008 masing-masing sebesar 0,18%, 0,13%, 1,16% dan 0,45%. Dari Grafik 2.6. terlihat bahwa kota Surakarta cenderung memiliki laju inflasi kuartalan yang paling rendah, sedangkan kota Purwokerto dan kota Tegal dengan laju inflasi kuartalan cenderung tinggi. Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda

terhadap komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi cukup dominan di setiap kota.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPS mencatat bahwa laju inflasi di empat kota tersebut mengalami penurunan laju inflasi kuartalan yang cukup signifikan. Perkembangan inflasi kuartalan empat kota di Jawa Tengah setiap triwulan dapat dilihat pada grafik 2.6.



Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 2.6

PERKEMBANGAN INFLASI KUARTALAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS mencatat bahwa di kota Semarang, laju inflasi kuartalan pada triwulan IV-2008 terutama dipicu oleh kelompok kesehatan yang mengalami kenaikan IHK sebesar 2,64% (qtq), diikuti oleh kelompok sandang yang naik 1,64%. Komoditas kesehatan yang memberikan sumbangan inflasi cukup nyata adalah yang termasuk dalam subkelompok jasa kesehatan dan subkelompok obat-obatan yang masing-masing mengalami peningkatan IHK sebesar 5,80% (qtq) dan 1,35%. Komoditas sandang yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di antaranya yang termasuk dalam subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya dan subkelompok sandang anak-anak, yang masing-masing naik sebesar 7,07% (qtq) dan 0,69%.

Sementara itu, laju inflasi kuartalan di Surakarta terutama dipicu oleh kelompok kesehatan yang mengalami kenaikan IHK sebesar 3,95% (qtq), diikuti oleh kelompok perumahan yang naik 3,34%. Kenaikan IHK kelompok kesehatan dipicu oleh kenaikan harga subkelompok jasa kesehatan yang naik 11,09%, serta subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika yang naik 0,74%. Komoditas dalam kelompok perumahan yang memberikan sumbangan inflasi cukup besar adalah yang

termasuk dalam subkelompok bahan bakar dan subkelompok perlengkapan rumah tangga.

Di Purwokerto, laju inflasi kuartalan pada triwulan IV-2008 terutama dipicu oleh kelompok pendidikan dan kelompok bahan makanan yang masing-masing mengalami kenaikan IHK sebesar 2,86% dan 2,42%. Kenaikan IHK kelompok pendidikan terutama dipicu oleh subkelompok jasa pendidikan yang naik sebesar 4,60%. Sementara kenaikan harga kelompok bahan makanan terutama disumbang oleh kenaikan harga subkelompok sayur-sayuran dan subkelompok ikan segar, yang mengalami peningkatan IHK sebesar 18,49% dan 6,63%.

TABEL 2.9
INFLASI KUARTALAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; QTQ)

No	KELOMPOK	Dec-07	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08
SEMARANG								
	UMUM / TOTAL	1.72	4.18	4.10	2.83	2.14	1.59	0.18
1	BAHAN MAKANAN	3.45	6.78	1.89	4.25	3.39	2.04	0.36
2	MAKANAN JADI	1.20	6.65	1.93	3.94	3.22	2.83	0.98
3	PERUMAHAN	1.36	3.76	5.72	2.19	1.02	1.10	1.33
4	SANDANG	4.90	3.92	0.37	2.71	2.75	2.37	1.64
5	KESEHATAN	0.99	3.73	1.28	0.71	0.75	2.71	2.64
6	PENDIDIKAN	0.09	0.01	1.81	3.58	3.18	0.48	0.60
7	TRANSPOR	0.22	0.16	9.91	1.02	0.80	0.37	-4.07
SURAKARTA								
	UMUM / TOTAL	1.42	2.74	3.70	1.74	0.87	0.95	0.13
1	BAHAN MAKANAN	3.47	5.57	2.35	2.06	1.32	-0.17	-0.85
2	MAKANAN JADI	-0.02	2.64	0.39	0.94	0.45	0.44	0.29
3	PERUMAHAN	1.04	2.11	3.58	3.98	1.03	3.66	3.34
4	SANDANG	1.98	1.76	-0.06	0.81	0.75	0.30	0.93
5	KESEHATAN	0.99	1.17	1.54	0.58	4.19	4.05	3.95
6	PENDIDIKAN	0.00	0.20	0.10	1.56	1.09	0.03	0.03
7	TRANSPOR	0.62	0.57	12.87	-0.22	-0.50	-0.99	-4.44
PURWOKERTO								
	UMUM / TOTAL	0.26	3.60	4.11	3.53	2.01	1.90	1.16
1	BAHAN MAKANAN	-0.14	10.68	5.02	0.81	2.62	1.35	2.42
2	MAKANAN JADI	0.32	2.78	2.11	4.79	1.24	3.03	2.20
3	PERUMAHAN	0.55	0.74	3.41	8.68	3.49	2.68	1.69
4	SANDANG	-2.83	1.55	-0.22	0.77	0.40	1.74	1.26
5	KESEHATAN	2.35	0.00	1.67	1.21	1.41	1.49	0.24
6	PENDIDIKAN	0.32	0.06	0.39	1.19	3.29	3.36	2.86
7	TRANSPOR	0.85	0.84	10.66	0.77	-0.40	-0.54	-4.07
TEGAL								
	UMUM / TOTAL	2.88	2.72	3.15	5.16	1.09	1.05	0.45
1	BAHAN MAKANAN	6.58	3.98	4.15	1.94	0.03	-1.09	-1.52
2	MAKANAN JADI	3.35	3.53	1.63	16.53	1.84	1.82	0.86
3	PERUMAHAN	0.72	2.35	2.68	4.55	2.01	1.65	1.16
4	SANDANG	2.38	3.73	-0.58	-1.58	-1.17	1.31	4.56
5	KESEHATAN	0.75	1.37	2.78	1.48	0.82	1.14	1.08
6	PENDIDIKAN	2.97	0.08	0.77	0.82	1.70	2.08	2.28
7	TRANSPOR	0.25	0.42	8.14	0.30	0.79	1.36	-1.84

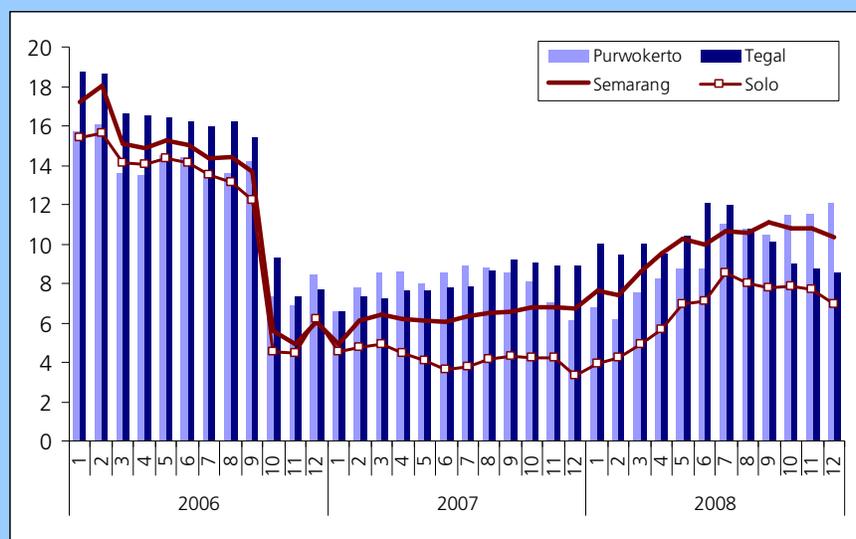
Sumber : BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS

Di Tegal, laju inflasi kuartalan pada triwulan IV-2008 terutama dipicu oleh kelompok sandang yang mengalami kenaikan IHK sebesar 4,56% (qtq), diikuti oleh kelompok pendidikan yang naik 2,28%. Komoditas kelompok sandang yang memberikan sumbangan inflasi cukup nyata antara lain yang termasuk dalam subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya yang mengalami peningkatan IHK 15,51%. Kenaikan IHK kelompok pendidikan terutama dipicu oleh kenaikan harga jasa pendidikan sebesar 3,47% dan kenaikan IHK subkelompok rekreasi sebesar 1,25%. Perkembangan inflasi kuartalan empat kota di Jawa Tengah berdasarkan kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 2.9.

2.1.2. Inflasi Tahunan (yoy)

Berdasarkan penghitungan BPS, laju inflasi tahunan (yoy) empat kota di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal pada triwulan III-2008 masing-masing sebesar 10,34%, 6,96%, 12,06% dan 8,52%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPS mencatat bahwa laju inflasi di tiga kota (Semarang, Surakarta dan Tegal) mengalami penurunan laju inflasi yang cukup signifikan. Sementara itu, inflasi di kota Purwokerto justru mengalami peningkatan laju inflasi dari 11,96% menjadi 12,06%.



Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 2.7.

PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH

Kecenderungan penurunan laju inflasi di ketiga kota tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM bersubsidi pada awal Desember 2008, sehingga mampu menahan tekanan harga dari beberapa komoditas *volatile*

foods. Beberapa komoditas *volatile foods* penyumbang inflasi tahunan terbesar dalam triwulan ini terutama berasal dari komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Perkembangan inflasi tahunan empat kota di Jawa Tengah setiap triwulan dapat dilihat pada grafik 2.7.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS mencatat bahwa di Kota Semarang, laju inflasi tahunan pada triwulan IV-2008 terutama disumbang oleh kelompok makanan jadi, kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan, dengan kenaikan IHK masing-masing sebesar 14,10%, 13,83% dan 13,58% (lihat Tabel 2.10.). Kenaikan IHK kelompok makanan jadi disumbang oleh kenaikan IHK subkelompok makanan jadi dan subkelompok tembakau dan minuman beralkohol. Adapun kenaikan IHK kelompok bahan makanan terutama disumbang oleh kenaikan harga komoditas dalam subkelompok daging-dagingan, sayur-sayuran, dan ikan segar.

Di kota Surakarta, inflasi tahunan triwulan ini terutama dipicu oleh kenaikan IHK kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 13,65% dan 9,34%. Kenaikan IHK kelompok perumahan dipicu oleh kenaikan IHK subkelompok bahan bakar dan biaya tempat tinggal. Adapun kenaikan IHK kelompok bahan makanan terutama disumbang oleh kenaikan harga komoditas dalam subkelompok kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan ikan segar.

Di kota Purwokerto, BPS mencatat bahwa inflasi di kota ini sebagai yang tertinggi di antara 4 kota lainnya yaitu sebesar 12,06%. Dari ketujuh kelompok komoditas, kelompok bahan makanan mengalami kenaikan paling tinggi mencapai 20,01% (yoy), diikuti oleh kelompok perumahan sebesar 15,12%. Kenaikan harga kelompok bahan makanan terutama dipicu oleh kenaikan IHK dalam subkelompok kacang-kacangan, buah-buahan, serta daging dan hasil-hasilnya. Adapun kenaikan harga kelompok perumahan terutama disebabkan oleh kenaikan IHK subkelompok biaya tempat tinggal dan bahan bakar.

Sementara itu inflasi di kota Tegal terutama disebabkan oleh kenaikan IHK pada kelompok makanan jadi sebesar 23,67%, diikuti oleh kelompok bahan perumahan 11,15%. Kenaikan IHK kelompok makanan jadi terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan harga komoditas dalam subkelompok tembakau dan makanan beralkohol. Adapun kenaikan IHK kelompok bahan makanan terutama dipicu oleh tingginya kenaikan harga komoditas dalam subkelompok ikan diawetkan, ikan segar dan daging. Perkembangan laju inflasi tahunan di empat kota di Jawa Tengah terlihat pada tabel 2.10.

TABEL 2.10.
LAJU INFLASI TAHUNAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH
MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN)

No	KELOMPOK	Dec-07	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08
SEMARANG								
	UMUM / TOTAL	6.75	8.64	12.50	13.43	10.83	10.80	10.34
1	BAHAN MAKANAN	10.91	14.55	17.23	17.33	16.85	15.39	13.83
2	MAKANAN JADI	8.21	11.97	11.48	14.35	14.28	14.58	14.10
3	PERUMAHAN	5.61	6.01	11.67	13.62	13.44	13.70	13.58
4	SANDANG	9.01	12.41	11.96	12.38	10.46	9.28	8.89
5	KESEHATAN	3.15	6.59	7.15	6.85	6.73	8.93	8.60
6	PENDIDIKAN	8.04	7.86	9.78	5.56	5.71	5.96	6.09
7	TRANSPOR	0.67	0.67	10.36	11.46	11.16	11.37	6.69
SURAKARTA								
	UMUM / TOTAL	3.28	4.88	9.13	9.94	7.84	7.67	6.96
1	BAHAN MAKANAN	6.01	8.79	14.50	14.11	14.39	11.51	9.34
2	MAKANAN JADI	1.15	3.52	3.28	3.98	4.15	4.24	4.30
3	PERUMAHAN	2.87	4.08	7.44	11.12	11.06	13.65	13.65
4	SANDANG	3.82	5.17	4.62	4.55	4.02	3.52	3.47
5	KESEHATAN	2.58	3.17	4.28	4.35	8.25	8.34	7.42
6	PENDIDIKAN	2.23	2.39	2.38	1.86	1.89	1.89	1.89
7	TRANSPOR	2.09	2.16	14.04	13.96	13.00	12.69	8.22
PURWOKERTO								
	UMUM / TOTAL	6.15	7.57	10.53	11.96	11.48	11.58	12.06
1	BAHAN MAKANAN	9.11	17.03	21.67	17.01	19.06	19.47	20.01
2	MAKANAN JADI	10.82	8.24	5.20	10.34	10.31	12.18	12.40
3	PERUMAHAN	2.66	2.46	5.70	13.84	14.16	13.80	15.12
4	SANDANG	0.77	0.27	0.25	-0.78	3.43	2.60	3.39
5	KESEHATAN	6.60	5.70	7.10	5.32	4.52	4.22	3.15
6	PENDIDIKAN	8.90	8.88	9.15	1.96	4.60	4.60	4.55
7	TRANSPOR	2.51	2.36	12.50	13.40	11.78	12.91	7.87
TEGAL								
	UMUM / TOTAL	8.89	10.04	12.11	14.63	8.95	8.76	8.52
1	BAHAN MAKANAN	12.55	12.75	19.49	17.66	13.70	12.99	8.72
2	MAKANAN JADI	15.05	17.09	14.61	26.71	23.83	24.10	23.67
3	PERUMAHAN	4.89	6.22	6.60	10.66	10.95	11.27	11.15
4	SANDANG	7.16	9.68	8.20	3.92	3.60	3.63	6.13
5	KESEHATAN	2.71	3.98	5.88	6.52	6.87	6.66	6.87
6	PENDIDIKAN	11.49	11.15	10.82	4.70	4.47	3.75	4.00
7	TRANSPOR	0.62	1.04	9.08	9.19	6.12	10.30	6.92

Sumber: BPS, diolah

Keterangan : angka inflasi per kelompok adalah hasil olahan KBI Semarang berdasarkan data IHK yang diperoleh dari BPS



BOKS

RINGKASAN EKSEKUTIF PENELITIAN JALUR DISTRIBUSI KOMODITAS PENYUMBANG TERBESAR DI KOTA SEMARANG, PURWOKERTO DAN TEGAL

Stabilitas perekonomian merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh hampir semua negara. Kestabilan ekonomi mencakup kestabilan sisi moneter dan fiskal. Salah satu unsur penting dalam memelihara kestabilan ekonomi adalah kestabilan harga. Stabilitas harga diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif di bidang produksi maupun investasi. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila laju inflasi dapat dikendalikan. Terjadinya inflasi secara teori dapat dilihat dari aspek permintaan (*demand pull inflation*) maupun penawaran (*cost push inflation*). Mencermati potensi inflasi dari sisi penawaran, tidak saja masalah jumlah persediaan barang/jasa, namun juga perilaku distribusi barang/jasa tersebut. Nilai tambah yang tinggi sangat terkait dengan perilaku dan jalur distribusi dari suatu komoditas dan atau kebijakan. Oleh karena itu mencermati inflasi, tidak cukup dari satu model pengamatan pasar uang/permintaan, namun juga aspek penawaran barang dan jalur distribusinya.

Terkait dengan jalur distribusi ini, karakteristik produk sangat menentukan panjang pendeknya rantai distribusi yang harus dilewati oleh sebuah komoditas. Secara umum sistem pengusahaan pada tiap komoditas yang memiliki rantai distribusi 3 tingkat melewati distributor besar pada rantai distribusinya, sehingga dari distributor pasar langsung terkait dengan produsen. Hal ini sangat dimungkinkan antara lain karena untuk memperpendek jalur pendistribusian terutama untuk komoditas yang tidak tahan lama. Komoditas yang sama pada tiga kota, belum tentu memiliki rantai jalur distribusi yang sama, hal ini terjadi karena selain karakteristik produk, karakteristik dan perilaku pembelian konsumen juga sangat berpengaruh dalam pembentukan rantai distribusi.

Dalam perjalanannya melalui jalur distribusi tersebut, sebuah komoditas mengalami perubahan harga sebagai bentuk penetapan margin laba oleh pelaku dalam jalur distribusi. Tidak terdapat pola yang menunjukkan dimana margin laba yang besar/signifikan terjadi, tetapi margin laba bervariasi menurut komoditas dan pihak dalam jalur distribusi. Oleh karena struktur pasar komoditas terpilih cenderung berbentuk pasar persaingan sempurna, maka perubahan harga sangat ditentukan oleh mekanisme pasar (tergantung kepada permintaan dan penawaran atas sebuah komoditas). Dari sisi permintaan, perubahan harga ditentukan oleh faktor musiman

(seperti lebaran) atau daya beli (penghasilan). Sedangkan dari sisi penawaran, perubahan harga dicerminkan dari stok komoditas di pasar yang antara lain dipengaruhi oleh kegagalan panen, naiknya harga bahan baku atau BBM. Atas dasar kondisi ini, perubahan harga yang menimbulkan inflasi lebih banyak bersifat *cost push inflation*.

Berkaitan dengan struktur pasar pada berbagai komoditi terpilih di tiga kota, dipersepsikan baik oleh responden konsumen maupun pedagang bahwa pada berbagai komoditas tersebut terjadi pasar persaingan sempurna sehingga banyak terdapat penjual maupun pembeli, khususnya pada responden warung/kios dan pedagang pasar. Sedangkan untuk pedagang besar dan produsen, meskipun tidak sebanyak jumlah warung dominasi atau monopoli terhadap satu komoditas tertentu hanya terjadi pada dua komoditas saja yaitu gula pasir dan beras.

Kebijakan terkait pengendalian harga yang dilakukan pemerintah antara lain kebijakan subsidi, operasi pasar dan kebijakan makro. Selain kebijakan tersebut, upaya pengendalian harga juga dilakukan melalui pendekatan penelusuran jalur distribusi, misalnya pernah dilakukan untuk komoditas minyak goreng. Dalam pendekatan melalui penelusuran jalur distribusi tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan proses pembentukan harga, terutama yang sangat dominan dalam pembentukan harga dikumpulkan dan diberi pengarahan untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengendalian harga. Meskipun masih bersifat himbuan dan pembinaan distributor, namun demikian langkah ini diharapkan menumbuhkan rasa empati dari para agen untuk ikut serta dalam pengendalian harga dan tidak justru berspekulasi. Di Kota purwokerto, khusus untuk komoditas minyak tanah telah dibentuk tim khusus ditingkat pengecer pada dinas energi dimana disperindag juga bergabung dalam tim tersebut.

Rekomendasi

Secara umum, pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga, baik secara langsung dengan operasi pasar maupun secara tidak langsung dengan subsidi maupun pembinaan terhadap pelaku pasar, baik yang bersifat antisipatif maupun penanggulangan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam persepsi masyarakat yang terwakili oleh pernyataan responden, kebijakan-kebijakan tersebut kurang ditangkap (dipersepsikan belum ada upaya). Atas dasar hal tersebut nampaknya pemerintah perlu lebih mensosialisasikan program pengendalian harga kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian diharapkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian harga lebih tinggi.

Fluktuasi harga pada kelompok pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musim dalam arti luas, musim dalam arti fenomena sosial maupun fenomena alam.

Apabila fluktuasi harga disebabkan karena fenomena sosial, maka harga dibentuk oleh permintaan dan penawaran, sehingga ketika musim telah lewat maka harga akan segera menyesuaikan diri dengan sendirinya. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu terlalu banyak intervensi dalam jalur distribusi. Selain karena fluktuasi harga bersifat musiman, jalur distribusi pada komoditas-komoditas tersebut relatif pendek dan tidak ada dominasi. Namun demikian, untuk komoditas beras yang memiliki permintaan cenderung inelastis dan sangat strategis, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu pembinaan kepada distributor dapat lebih diintensifkan sehingga diharapkan mampu menekan dorongan spekulatif pada saat-saat tertentu. Pemantauan harga terhadap komoditas tersebut juga dapat menjadi dasar kebijakan antisipatif akan terjadinya gejolak harga. Upaya pengendalian komoditas-komoditas pertanian juga perlu didukung oleh pengaturan tata niaga dan/atau harga komoditas-komoditas pendukung pertanian, misalnya pupuk. Untuk menjaga ketersediaan beras sudah ada pengaturan tidak diperkenankan mengekspor beras 2 bulan sebelum panen dan 2 bulan setelah panen. Untuk beras juga ditetapkan harga dasarnya dengan instruksi Presiden. Kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan.

Jalur distribusi pada komoditas-komoditas peternakan cenderung panjang, namun demikian dalam komoditas ini cenderung tidak ada dominasi. Jalur distribusi yang panjang atau pendek pada dasarnya merupakan pilihan pelaku (produsen ataupun pedagang) dan sangat tergantung pada karakter produk. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan dalam menjaga kontinuitas pasokan serta memperlancar arus distribusi komoditas sehingga harga menjadi stabil.

Komoditas minyak goreng memiliki jalur distribusi panjang, yakni dari produsen-supplier utama-pedagang pasar/distributor-warung-konsumen. Selain itu, struktur pasar untuk komoditas ini cenderung oligopolis. Pembinaan terhadap para distributor dan mengikut sertakan mereka dalam upaya pengendalian harga, merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Seperti halnya komoditas peternakan, pemerintah dapat berperan dalam menjaga kontinuitas pasokan serta memperlancar arus distribusi komoditas sehingga harga menjadi stabil.

Gula pasir termasuk komoditas dengan distribusi yang panjang. Dalam tata niaga gula di Jawa Tengah terdapat unsur dominasi. Hal tersebut disebabkan karena dalam pemasaran gula menggunakan sistem lelang oleh PTP IX. Pengaturan tata niaga gula terkait dengan alokasi gula lokal dan impor. Gula rafinasi tidak boleh masuk pasar karena hanya untuk keperluan farmasi, karena memiliki pengaruh terhadap gula petani. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian harga, dapat dilakukan dengan terus memantau alokasi distribusi gula pasir di masyarakat.

Tata niaga minyak tanah pada dasarnya sudah baku. Namun demikian, sebagai akibat dari beberapa kebijakan lain seperti konversi dari minyak tanah ke gas

yang menyebabkan Pertamina mengurangi kuota pasokan di pasar telah menyebabkan kelangkaan minyak tanah di pasar. Karena masyarakat cenderung belum siap dengan program konversi tersebut, maka permintaan tetap tinggi. Hal tersebut yang mendorong harga minyak tanah dan harga naik. Selain itu, dalam prakteknya juga terjadi penyimpangan jalur distribusi, yakni dari agen langsung ke konsumen industri sehingga minyak tanah untuk keperluan rumah tangga berkurang. Dalam hal ini, pemerintah perlu menindak tegas penyimpangan-penyimpangan tersebut

(Penelitian dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang, bekerjasama dengan P3M Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang, Oktober-Desember 2008)



Bab 3

Perkembangan Perbankan

Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami pelambatan namun secara tahunan tumbuh dengan baik. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya indikator- indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR). Kualitas kredit yang diberikan juga membaik, tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans – NPLs Gross*.

TABEL 3.1.
PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH (BANK UMUM & BPR)

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Total Aset	93.197	94.342	99.100	107.486	111.811	19,97	3,87
2. DPK	74.845	74.783	78.761	81.185	86.139	15,09	5,75
a.Giro	12.304	12.772	12.971	11.789	12.296	-0,07	4,12
b.Tabungan	35.072	33.938	36.219	36.512	40.103	14,34	8,95
c.Deposito	27.469	28.073	29.571	32.884	33.740	22,83	2,55
3. Kredit	62.333	64.040	71.397	77.110	79.331	27,27	2,80
4. LDR (%)	83,28	85,63	90,65	94,98	92,10	-	-
5. NPLs (%)	3,73	4,13	2,80	3,24	2,95	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Aset perbankan di Jawa Tengah (bank umum dan BPR) pada triwulan IV-2008 tumbuh sebesar 3,87% dibandingkan dengan triwulan III-2008. Untuk posisi YoY, aset perbankan pada posisi Desember 2008 mencapai Rp111.811 miliar, meningkat 19,97% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp93.197 miliar. Di sisi lain dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun meningkat sebesar 15,09% sehingga menjadi Rp86.139 miliar. Sementara itu kredit tumbuh lebih besar yaitu 27,27% dari Rp62.333 miliar pada 2007 menjadi Rp79.331 miliar pada 2008. Tingginya pertumbuhan kredit dibanding DPK menjadikan LDR perbankan Jawa Tengah meningkat dari 83,28% menjadi 92,10%. Meskipun LDR meningkat, perbankan tetap mampu memperbaiki

kualitas kredit yang diberikan, tercermin dari membaiknya *non performing loan – NPLs* dari 3,73% menjadi 2,95%.

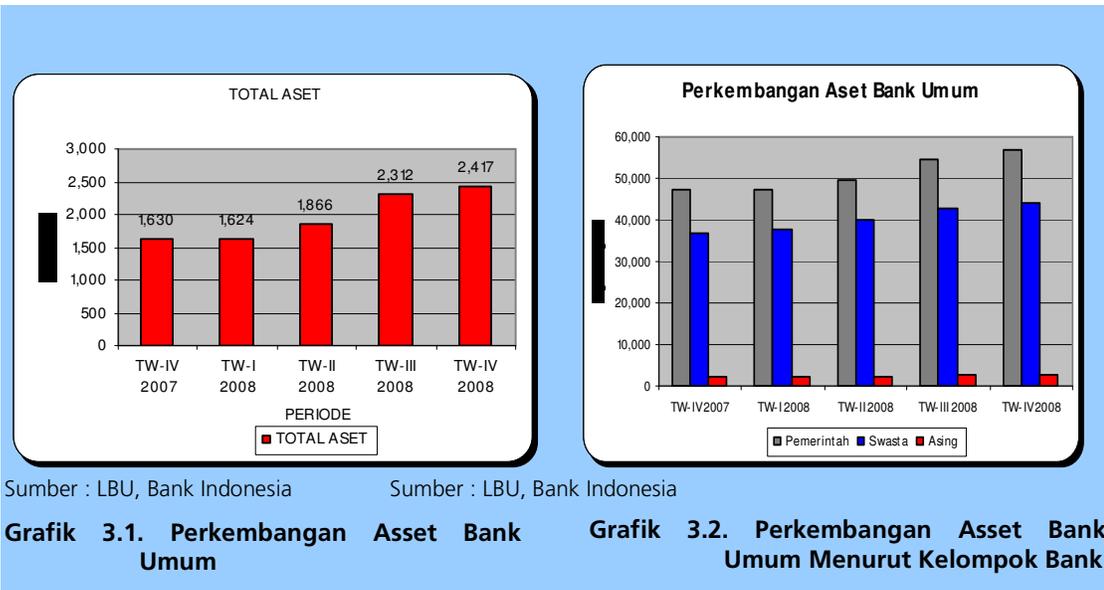
Pertumbuhan kinerja perbankan Jawa Tengah yang cukup bagus pada 2008 tersebut, sempat melambat pada triwulan IV-2008. Hal ini dikarenakan adanya dampak krisis keuangan global yang sudah mulai dirasakan. Indikator-indikator utama perbankan pada triwulan IV tersebut pertumbuhannya mulai melambat. Namun demikian yang perlu diwaspadai oleh kalangan perbankan adalah dampak krisis keuangan pada 2009 khususnya pada semester I 2009. Tersedatnya angsuran kredit perlu menjadi perhatian bagi perbankan pada semester I ini. Hal ini sesuai dengan hasil survei *senior credit officer* (SCO) triwulan IV-2008, yang mengekspektasikan terjadinya peningkatan NPLs pada triwulan I-2009.

3.1 Intermediasi Bank Umum

Pembahasan fungsi intermediasi perbankan ini lebih difokuskan kepada bank umum mengingat pangsa BPR terhadap perbankan di Jawa Tengah relatif kecil (7,05%). Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu perkembangan aset bank umum di Jawa Tengah.

Aset bank umum di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 tumbuh sebesar 3,87% dibandingkan dengan triwulan III-2008. Secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 19,97% apabila dibandingkan dengan Desember 2007, sehingga menjadi Rp. 111,8 miliar. Pertumbuhan yang cukup baik pada 2008 ini menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi di 2008, meski diperlambat oleh krisis keuangan global. Pelambatan akibat krisis mulai terasa pada triwulan IV, yang ditunjukkan oleh pelambatan pertumbuhan aset (**Tabel 3.1**).

Peningkatan aset terbesar masih disumbang oleh bank pemerintah yaitu sebesar 54,74%. Sedangkan bank swasta nasional dan swasta asing masing-masing sebesar 42,48% dan 2,78%. Selain faktor jaringan kantor bank pemerintah yang jumlahnya relatif lebih banyak dibanding bank swasta nasional dan bank asing, faktor adanya bank lokal yaitu Bank Jateng juga menjadi penyebab besarnya peran bank pemerintah di Jawa Tengah. Selain itu, sampai saat ini bank-bank pemerintah khususnya Bank Jateng masih menjadi pilihan utama bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah dan 35 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dalam melakukan transaksi keuangannya.



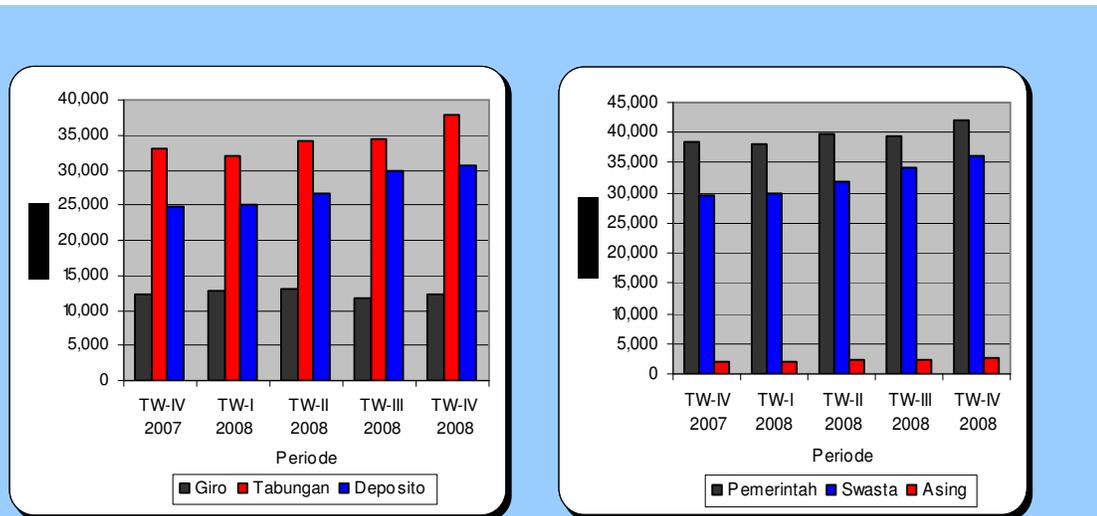
3.1.1 Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum di Jawa Tengah tumbuh positif (Tabel 3.1) Posisi DPK yang berhasil dihimpun bank umum di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,75% sehingga menjadi Rp. 86,14 miliar. Secara tahunan, DPK tumbuh sebesar 15,09%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK di 2007 sebesar 11,79%.

Peningkatan DPK terutama terjadi pada simpanan deposito yang tumbuh sebesar 24,12%, dan simpanan tabungan yang meningkat sebesar 14%. Sementara, simpanan giro mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,06%. Penurunan simpanan giro ini terutama disebabkan oleh penarikan dana milik pemerintah daerah/BUMD untuk membelanjai kebutuhan anggarannya, dan berpalingnya sebagian nasabah giro ke simpanan deposito yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih menarik.

Komposisi DPK bank umum di Jawa Tengah tidak berubah, simpanan tabungan tetap memiliki porsi terbesar (Grafik 3.4). Simpanan dalam bentuk tabungan tercatat sebesar Rp37.763 miliar (46,80%), diikuti simpanan deposito dan simpanan giro masing-masing sebesar Rp30.621 miliar (37,95%) dan Rp12.296 miliar (15,25%). Tingginya simpanan tabungan ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat Jawa Tengah untuk menyimpan dananya ke bank sudah cukup bagus, sejalan dengan upaya perbankan dalam mensosialisasikan kegemaran menabung ke masyarakat (**program Ayo ke Bank**).

Dilihat dari kepemilikannya, tabungan perorangan mempunyai peranan yang dominan terhadap DPK. Pada posisi Desember 2008, DPK yang dimiliki nasabah perorangan tercatat sebesar Rp64.104 miliar atau 79,45%. Dari total tersebut sebanyak Rp36.279 miliar (56,59%) merupakan nasabah penabung perorangan. Sisanya adalah deposito perorangan – Rp23.924 miliar (37,32%) dan giro perorangan – Rp3.901 miliar (6,09%) (**Grafik 3.3**)

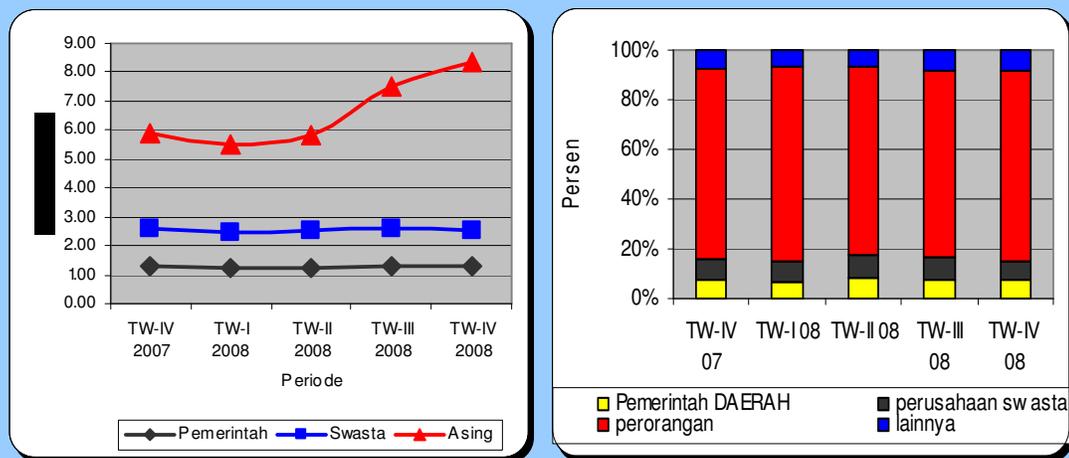


Sumber : LBU, Bank Indonesia

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum

Grafik 3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Menurut Kelompok Bank



Sumber : LBU, Bank Indonesia

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 3.5. Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Bank Umum

Grafik 3.6. Perkembangan Komposisi Kepemilikan Dana Pihak Ketiga Bank Umum

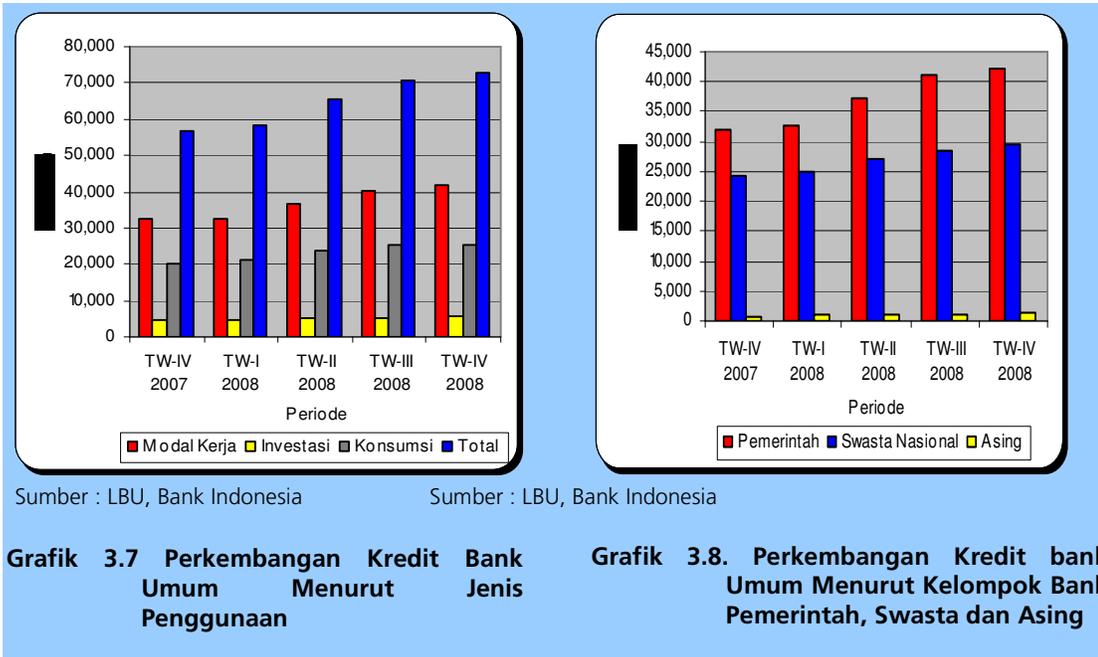
Pesatnya pertumbuhan simpanan tabungan ini cenderung lebih menguntungkan bank, mengingat jenis simpanan ini memiliki biaya bunga yang lebih

rendah dibanding simpanan deposito. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan bank masih menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah untuk mengelola keuangan mereka. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabahnya. Selain sebagai lembaga yang menjalankan tugas intermediasi, perbankan juga semakin inovatif dalam mengembangkan produknya. Adanya *SMS banking*, *internet banking*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, sistem pembayaran secara *real time*, dan jasa layanan lainnya seperti *wealth management* dengan *priority banking*-nya, menjadikan nasabah perbankan enggan berpaling ke lembaga keuangan non bank.

3.1.2 Penyaluran Kredit

Kredit yang disalurkan bank umum di Jawa Tengah tumbuh cukup baik, meski di bawah angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan kredit pada 2008 mencapai 27,86% (yoy), sementara pertumbuhan kredit secara nasional tumbuh sekitar 31%. Namun bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan kredit pada 2007, pertumbuhan kredit pada 2008 ini lebih besar. Pada 2007, kredit tumbuh 18,72%. Pertumbuhan kredit merata di semua jenis penggunaan kredit. Kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 29,59%, 23,47%, dan 26,09% (**Grafik 3.7**).

Secara triwulanan, kredit pada triwulan IV ini tumbuh 3,16%, jauh di bawah pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,04%. Pelambatan pertumbuhan kredit tersebut terutama sebagai dampak krisis keuangan global. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei SCO yang menyatakan bahwa realisasi kredit triwulan IV-2008 di bawah target yang ditetapkan karena turunnya permintaan kredit terkait dengan meningkatnya tingkat suku bunga kredit dan iklim ekonomi yang belum membaik akibat krisis keuangan global. Hasil survei SCO juga mengindikasikan bahwa naiknya suku bunga pada tiga bulan terakhir, yang disertai dengan kondisi perekonomian yang belum pulih akibat krisis keuangan global, memaksa sebagian perbankan mengetatkan kebijakan persetujuan penyaluran kredit untuk meminimalkan potensi terjadinya NPLs.



Penyerapan kredit modal kerja masih menjadi tumpuan pertumbuhan kredit di Jawa Tengah. Kredit bank umum di Jawa Tengah pada Desember 2008 masih didominasi oleh kredit modal kerja (KMK) yaitu sebesar Rp41.826 miliar (56,15%), diikuti kredit konsumsi (KK) sebesar Rp25.539 miliar (36,21%). Sementara itu kredit investasi (KI) hanya sebesar Rp5.543 miliar (7,64%). Tingginya kredit modal kerja ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memiliki banyak UMKM yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan, meskipun diduga masih banyak lagi UMKM di Jawa Tengah yang belum tersentuh oleh perbankan. Namun demikian pada triwulan I-2009, realisasi kredit modal kerja ini diperkirakan masih melambat. Hal ini terkait dengan kondisi dunia usaha yang belum merencanakan melakukan ekspansi usaha karena masih menunggu perkembangan ekonomi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum di Jawa Tengah masih didominasi oleh bank pemerintah yaitu sebesar 57,8%, diikuti bank swasta nasional sebesar 40,46% (Grafik 3.8). Sementara itu, bank swasta asing hanya mempunyai pangsa sebesar 1,74%. Bank Pemerintah masih menjadi tumpuan dalam penyaluran kredit modal kerja. Dari total kredit modal kerja yang disalurkan di Jawa Tengah sebesar Rp41.826 miliar, sebanyak 52,7% (Rp22.046 miliar) disalurkan oleh bank-bank pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jaringan kantor yang dimiliki oleh bank-bank pemerintah yang dapat menjangkau UMKM-UMKM di pedesaan/kecamatan.

Secara sektoral kredit yang disalurkan terkonsentrasi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), sektor lainnya, dan sektor industri pengolahan. *Outstanding* kredit pada masing-masing sektor di atas pada Desember 2008 adalah Rp23.145 miliar (31,74%) untuk sektor PHR, Rp26.157 miliar (35,87%) untuk sektor lainnya, dan Rp15.540 miliar (21,31%) untuk sektor industri pengolahan. Pertumbuhan kredit pada ketiga sektor ini pada triwulan IV-2008 lebih dari 25%, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor industri sebesar 40,88%. Hal ini sejalan dengan hasil survei SCO dimana mayoritas perbankan masih memprioritaskan penyaluran kreditnya pada sektor PHR dan sektor industri. Imbal hasil yang tinggi dan tingkat pengembalian yang cukup baik menjadikan sektor PHR dan sektor industri menjadi sektor pilihan utama perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Penyaluran kredit modal kerja terkonsentrasi pada sektor PHR khususnya perdagangan (Tabel 3.2) Lebih dari 83% KMK tersalur ke dua sektor ekonomi yaitu sektor PHR (50,75%) dan sektor industri (32,87%). Meskipun demikian, jumlah kredit non lancar (*Non Performing Loans – NPLs*) pada ke dua sektor besar tersebut juga terlihat cukup baik yaitu 3,22% untuk sektor PHR, dan 2,71% untuk sektor perindustrian. NPLs terbesar justru terjadi pada sektor jasa dunia usaha dan sektor pengangkutan, masing-masing sebesar 4,97% dan 4,08%. Yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kualitas kredit pada triwulan I-2009 pada semua sektor khususnya sektor perdagangan, terkait dengan dampak krisis keuangan global.

TABEL 3.2.
PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM
PER SEKTOR EKONOMI

Sektor Ekonomi	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08
Pertanian	2,002	1,864	1,952	1.969	2.056
Pertambangan	31	44	41	78	79
Industri	9,439	9,499	10,750	12.889	13.749
Listrik, Gas, & Air	9	11	13	10	9
Konstruksi	903	789	1,121	1.236	990
PHR	17,186	17,765	19,580	20.413	21.230
Pengangkutan	214	229	274	292	372
Jasa Dunia Usaha	1,725	1,787	1,996	2.332	2.311
Jasa Sosial Masy.	400	377	428	426	417
Lainnya	366	381	577	693	613
Total KMK	32,275	32,745	36,732	40.337	41.826

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Rasio kredit terhadap DPK (*Loan to Deposit Ratio – LDR*) meningkat.

Pada triwulan IV-2008 terjadi pelambatan pertumbuhan kredit sebagai akibat krisis keuangan global. Hal ini tercermin dari penurunan LDR bank umum dari 92,85% pada triwulan III-2008 menjadi 90,37% pada triwulan IV-2008. Namun demikian secara tahunan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPK berimplikasi pada peningkatan LDR. LDR bank umum pada Desember 2008 meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2007 yaitu dari 81,34% menjadi 90,37%. Hal ini menunjukkan masih baiknya fungsi intermediasi perbankan di Jawa Tengah. Peningkatan kredit yang disalurkan juga mencerminkan masih tingginya kepercayaan perbankan pada kondisi perekonomian Indonesia, khususnya kepercayaan perbankan kepada pelaku usaha/masyarakat.

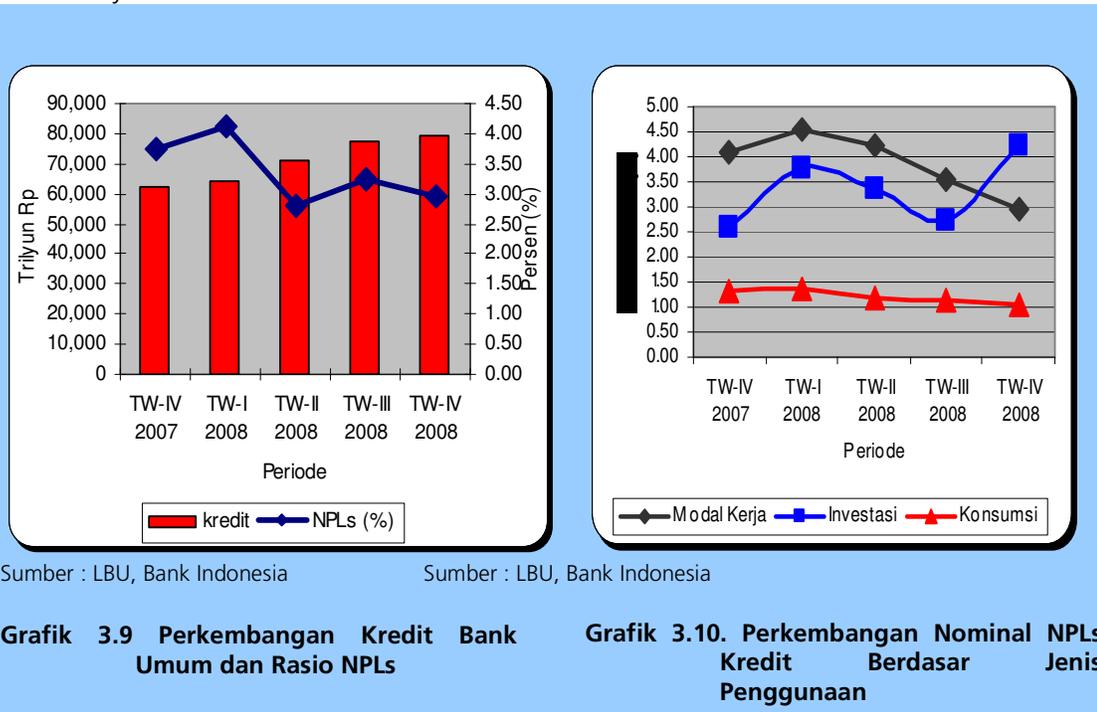
3.2 Risiko Kredit

Risiko kredit bank umum di Jawa Tengah cukup rendah. Secara umum risiko kredit adalah risiko yang timbul dari kemungkinan si peminjam/debitur atau *counterparty* gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada Desember 2008 ini risiko kredit bank umum yang salah satunya diukur dari rasio *Non Performing Loans (NPLs)-gross* mulai membaik. Meskipun pertumbuhan kredit tergolong cukup ekspansif, namun NPLs bank umum tergolong cukup rendah.

Pada akhir 2007 NPLs bank umum berada di angka 3,00%, dan pada akhir 2008 ini turun menjadi 2,39%, di bawah NPLs yang dihimbau Bank Indonesia sebesar 5%. Rendahnya NPLs tersebut bersumber dari relatif baiknya kualitas semua jenis kredit terutama kredit konsumsi. Faktor yang mempengaruhi perbaikan diantaranya adalah semakin intensifnya penagihan kredit bermasalah dan upaya restrukturisasi kredit nasabah-nasabah besar. Di samping itu, perbankan semakin konsisten dalam menerapkan penilaian risiko dalam menyalurkan kredit baru. Praktek-praktek perbankan yang mendasarkan pada azas kehati-hatian telah dijalankan dengan baik, termasuk didalamnya pembentukan tim manajemen risiko kredit.

Kredit investasi menyumbang kredit non lancar terbesar. Apabila dilihat dari jenis penggunaan, kredit investasi memiliki NPLs tertinggi, diikuti kredit modal kerja dan kredit konsumsi. NPLs kredit investasi bank umum di Jawa Tengah pada Desember 2008 sebesar 4,22%, diikuti oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing dengan NPLs sebesar 2,97% dan 1,05% (**Grafik 3.10**). Besarnya NPLs kredit investasi dan kredit modal kerja tersebut masih belum mengkhawatirkan dan

masih dalam batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia. Namun demikian perbankan wajib tetap hati-hati dalam menyalurkan kreditnya untuk menekan munculnya kredit non lancar baru.



Grafik 3.9 Perkembangan Kredit Bank Umum dan Rasio NPLs

Grafik 3.10. Perkembangan Nominal NPLs Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

TABEL 3.3.
RASIO NPLs PER SEKTOR EKONOMI

Sektor Ekonomi	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08
Pertanian	2.22	3.06	3.67	2,96	2,53
Pertambangan	0.68	0.72	1.03	0,65	0,56
Industri	4.76	5.70	5.03	3,72	3,26
Listrik, Gas, & Air	6.65	5.45	3.54	5,64	0,34
Konstruksi	3.94	6.09	5.12	3,42	1,79
PHR	3.89	4.11	3.94	3,69	2,69
Pengangkutan	3.88	3.80	3.61	3,26	2,53
Jasa Dunia Usaha	2.37	3.13	2.31	2,31	7,21
Jasa Sosial Masy.	2.55	2.55	1.99	1,91	1,10
Lainnya	1.35	1.39	1.22	1,16	1,09

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Kredit kepada sektor jasa dunia usaha memiliki NPLs tertinggi (Tabel 3.3). Sejalan dengan besarnya NPLs menurut jenis penggunaan yang didominasi oleh jenis kredit investasi dan kredit modal kerja, NPLs kredit menurut sektor ekonomi

yang dibiayai juga terkait dengan kedua jenis penggunaan di atas. Secara sektoral, NPLs terbesar didominasi oleh sektor jasa dunia usaha, yang nilainya di atas 5%. Namun demikian secara umum NPLs per sektor dalam triwulan IV-2008 mengalami penurunan di banding triwulan-triwulan sebelumnya.

TABEL 3.4.
RASIO NPLs JENIS KREDIT MODAL KERJA PER SEKTOR EKONOMI

(%)

Sektor Ekonomi	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08
Pertanian	2.17	2.79	3.48	2,82	2,41
Pertambangan	1.51	1.12	1.64	0,85	0,71
Industri	5.16	5.89	5.19	3,77	3,22
Listrik, Gas, & Air	0.00	0.00	0.29	1,51	0,35
Konstruksi	4.16	6.53	5.41	3,66	1,94
PHR	3.94	4.18	4.01	3,80	2,71
Pengangkutan	6.41	6.14	5.43	5,29	4,08
Jasa Dunia Usaha	2.69	2.78	1.86	1,69	4,97
Jasa Sosial Masy.	2.85	3.20	2.57	1,59	1,44
Lainnya	2.54	3.16	2.51	1,77	2,88
Total NPLs KMK	4.11	4.56	4.22	3,56	2,97

Sumber : LBU, Bank Indonesia

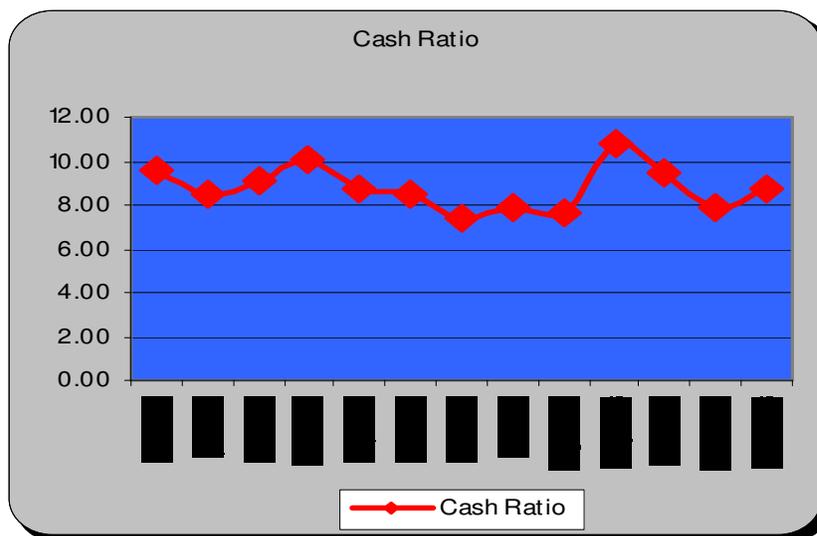
Secara umum risiko kredit perbankan di Jawa Tengah cukup rendah dan diperkirakan sedikit meningkat pada semester I-2009. Hal ini terlihat dari NPLs perbankan yang sampai dengan saat ini masih di bawah level aman menurut Bank Indonesia. Meskipun pertumbuhan kredit terbilang cukup ekspansif, yaitu pada kisaran 27,86% (yoy), perbankan tetap mampu mengamankan eksposur kreditnya sehingga tidak menjadi macet. Hal ini dikarenakan bank-bank telah menjalankan *prudential banking* dengan lebih baik. Ke depan, perbankan tetap harus mencermati potensi meningkatnya kredit non lancar. Faktor dampak krisis keuangan global yang saat ini masih belum diketahui kapan berakhirnya dan faktor gejolak kurs nilai rupiah terhadap *US Dollar*, akan menjadi pemicu utama tersendatnya angsuran kredit perbankan. Perusahaan yang bergerak dibidang export dan perusahaan yang *import content*-nya tinggi, paling merasakan dampak krisis keuangan global ini. Penyaluran kredit kepada sektor konsumtif seperti kredit perumahan dan kendaraan bermotor juga perlu diwaspadai.

3.3 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas bank umum di Jawa Tengah masih rendah. Pengelolaan likuiditas yang baik akan terlihat pada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bila likuiditas tidak dikelola dengan baik, bank akan dihadapkan pada risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Risiko likuiditas sendiri didefinisikan sebagai risiko dimana bank tidak akan dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

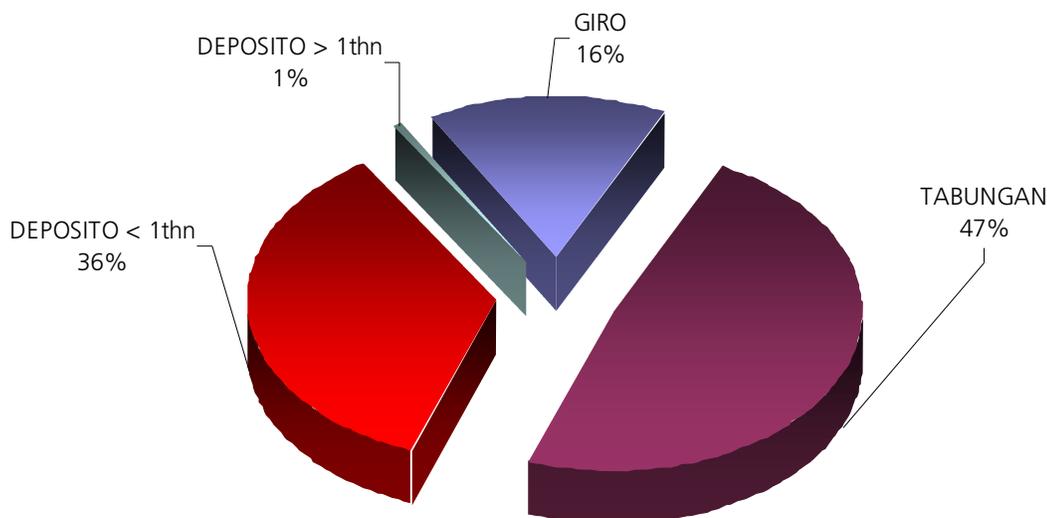
Terkait dengan adanya krisis keuangan global yang saat ini masih berlangsung, pengetatan likuiditas yang melanda perbankan nasional tidak begitu terasa di perbankan Jawa Tengah. Indikator likuiditas perbankan masih baik meski menurun. DPK masih tumbuh cukup bagus, demikian pula dengan kredit yang diberikan, meskipun ditandai dengan pelambatan pertumbuhan pada triwulan IV. Meskipun demikian, dampak krisis ini sudah mulai mengganggu likuiditas perbankan. Hal ini ditandai dengan semakin mengecilnya rasio kas bank (*cash ratio*) yaitu dari 10,85% (2006), 9,61% (2007), menjadi 8,77% pada 2008 (**Grafik 3.11**). Secara sederhana, *cash ratio* diukur dari penjumlahan kas, giro bank di Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain, dibagi jumlah DPK yang dihimpun.

**GRAFIK 3.11
CASH RATIO**



Dilihat dari segi waktu, hampir seluruh DPK bank umum di Jawa Tengah adalah dana jangka pendek. Komposisi DPK secara berurutan dari terbesar adalah simpanan tabungan (47%), simpanan deposito (38%), dan simpanan giro (16%). Bila

dirinci lagi, simpanan deposito dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun sebesar 36%, sehingga secara keseluruhan struktur pendanaan jangka pendek bank umum sebesar 99,5%.



GRAFIK 3.12.
Komposisi DPK Bank Umum Triwulan IV-2008

Melihat struktur pendanaan bank umum di Jawa Tengah, menjadikan perbankan cukup berhati-hati dalam menanamkan dananya dalam *earning assets*, khususnya kredit yang diberikan. Kehati-hatian perbankan di Jawa Tengah ini tercermin dari dominasi penyaluran kredit oleh kredit modal kerja yang berjangka pendek. Penyaluran kredit konsumsi juga cukup besar, atau terbesar kedua setelah kredit modal kerja, karena dianggap relatif lebih aman. Sementara itu kredit investasi yang porsinya cukup kecil, pertumbuhannya juga relatif lamban, karena sifatnya yang jangka panjang dan memiliki *risk exposure* yang lebih besar, serta berpotensi menimbulkan *mismatch*.

Dengan melihat struktur liabilitas yang didominasi dana jangka pendek, maka struktur aset secara tidak langsung harus menyesuaikan struktur liabilitas, dimana kredit didominasi oleh kredit jangka pendek. Kualitas *earning assets* juga relatif baik, dan tidak adanya dominasi nasabah inti, maka secara keseluruhan risiko likuiditas perbankan di Jawa Tengah relatif masih terjaga.

3.4 Risiko Pasar

Risiko pasar bank umum di Jawa Tengah relatif rendah. Risiko pasar adalah risiko yang berpengaruh terhadap bank yang disebabkan oleh pergerakan arah yang berlawanan dari tingkat bunga atau harga pasar (suku bunga, nilai tukar / kurs, atau harga komoditas / saham).

Perbankan lebih diuntungkan dengan relatif fleksibelnya suku bunga DPK, dalam arti lebih cepat menyesuaikan apabila terdapat penurunan suku bunga SBI. Sementara suku bunga kredit relatif lebih sulit untuk turun, tapi sangat fleksibel untuk naik. Kondisi tersebut menjadikan bank relatif lebih aman dalam memelihara *spread* marginnya, mengingat *spread* bunga saat ini masih cukup tinggi. Dengan kondisi tersebut maka fluktuasi suku bunga secara keseluruhan masih dapat dihadapi oleh bank. Kemungkinan risiko yang terjadi, hanya berkurangnya margin keuntungan bank.

Perbankan di Jawa Tengah relatif jarang memiliki eksposur valuta asing yang besar dan juga belum intensif memasarkan produk-produk derivatif. Transaksi pasar uang yang terjadi biasanya dilakukan di kantor pusat masing-masing bank, yang umumnya berlokasi di Jakarta. Hal ini mengakibatkan risiko yang terkait dengan perubahan kurs, relatif cukup terkendali atau rendah. Dengan kondisi di atas maka risiko pasar perbankan Jawa Tengah relatif rendah.

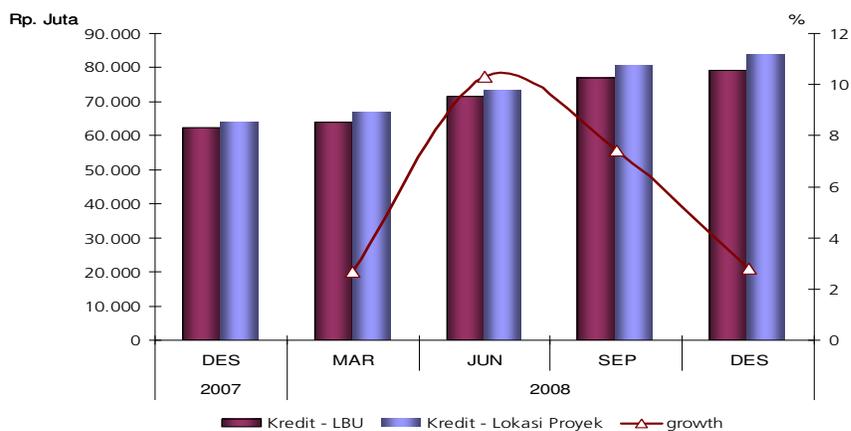
3.5. Kredit UMKM (Lokasi Proyek)

Berbeda dengan kredit yang disebut sebelumnya berdasarkan Laporan Bank Umum (LBU) dan Laporan Bank Perkreditan Rakyat (LBPR), kredit berdasarkan lokasi proyek lebih melihat penyaluran kredit kepada debitur yang ada di wilayah Jawa Tengah, meskipun kreditnya berasal dari bank yang berlokasi di provinsi lain.

Secara umum di Jawa Tengah, kredit berdasarkan proyek memiliki *outstanding* yang lebih besar dari kredit berdasarkan laporan bank. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah menerima kredit dari bank-bank lain yang berlokasi di luar Jawa Tengah. Pada 2007 kredit berdasarkan LBU tercatat sebesar Rp. 62,333 miliar, meningkat menjadi Rp79.331 miliar pada 2008. Pada posisi yang sama, kredit berdasarkan proyek masing-masing sebesar Rp. 63,946 miliar dan Rp. 84,064 miliar. Bila dilihat pertumbuhannya, kredit berdasarkan proyek pada 2008 tumbuh sebesar 31,46%, sedangkan kredit berdasarkan LBU sebesar 27,26%.

LDR kredit berdasarkan proyek juga lebih tinggi dibandingkan dengan kredit berdasarkan LBU. Pada 2008 LDR-proyek tercatat sebesar 99,83%, sedangkan LDR-LBU sebesar 92,16%. **(Grafik 3.12)**

Grafik 3.13. Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek



3.6 Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat Di Jawa Tengah

Perkembangan bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah pada 2008 meningkat meski sedikit melambat pada triwulan IV-2008 (Tabel 3.5). Terdapat dua bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah yaitu PT Bank Jateng dan PT Bank Purbadanarta. Total aset kedua bank tersebut tercatat sebesar Rp. 13,534 miliar atau meningkat sebesar 8,38% dibanding Desember 2007. Namun apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami penurunan aset sebesar - 4,57%. Kondisi ini menyebabkan *share*-nya terhadap total aset bank umum di Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan yaitu dari 14,44% pada 2007 menjadi 13,02% pada 2008. Dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya juga terlihat menurun yaitu dari 14,18% (triwulan III) dan 14,05% (triwulan II).

TABEL 3.5.
PERKEMBANGAN BANK UMUM
YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA TENGAH

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. a. Total Aset	12.487	12.997	12.908	14.183	13.534	8,38	-4,57
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	14,44	14,86	14,05	14,18	13,02	-	-
2. a. Dana Pihak Ketiga	9.979	11.089	10.683	11.089	9.599	-3,80	-13,4
- Giro	3.763	4.478	3.706	3.643	3.334	-11,4	-8,48
- Tabungan	2.998	2.339	2.607	2.773	3.340	11,4	20,44
- Deposito	3.218	4.272	4.370	4.674	2.925	-9,10	-37,4
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	14,23	15,86	14,49	14,57	11,90	-	-
3. a. Penyaluran Kredit	7.665	8.175	9.216	9.791	9.871	28,78	0,81
b. <i>Share thd BU Jateng (%)</i>	13,44	13,98	14,09	13,85	13,54	-	-
4. LDR (%)	76,81	73,72	86,26	88,29	102,84	-	-
5. NPL (%)	0,44	0,50	0,53	0,47	0,26	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

DPK yang berhasil dihimpun pada Desember 2008 ini tercatat sebesar Rp. 9,599 miliar, atau menurun -3,8% (yoy) dibanding 2007 dan -13,43% (qtq) dibanding triwulan III-2008. Penurunan DPK ini terutama terjadi pada Bank Jateng, disebabkan adanya peralihan sebagian dana pemerintah daerah kepada bank pemerintah lainnya. Penurunan DPK juga karena adanya penarikan dana-dana pemerintah daerah untuk merealisasikan anggarannya di akhir tahun. Sementara itu, kredit yang disalurkan tetap mengalami peningkatan, yaitu sebesar 28,78% (yoy) dan 0,81% (qtq). Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK yang negatif, menjadikan LDR bank meningkat dari 76,81% (2007) dan 88,29% (triwulan III-2008) menjadi 102,84% pada Desember 2008.

Ke depan, peran Bank Jateng dalam turut serta membangun Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Sebagai *regional agent of development bank*, Bank Jateng yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi sangat vital. Dukungan pembiayaan Bank Jateng terhadap program-program pembangunan daerah khususnya program **Bali Deso Mbangun Ndeso** mutlak sangat dibutuhkan.

3.6 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR di Jawa Tengah terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan bank umum. Meskipun BPR memiliki kegiatan operasional yang sama dengan bank umum, namun BPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum. BPR memiliki prosedur pemberian kredit yang lebih sederhana dan lebih cepat, dan BPR

lebih mengutamakan pendekatan personal. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, BPR di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagian BPR di Jawa Tengah dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

TABEL 3.6.
PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR BPR
DI JAWA TENGAH

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Aset	6.776	6.864	7.278	7.493	7.889	16,42	5,28
2. DPK	4.746	4.856	5.054	5.127	5.459	15,04	6,47
a.Tabungan	1.947	1.946	2.058	2.085	2.340	20,18	12,23
b.Deposito	2.798	2.910	2.997	3.042	3.119	11,47	2,53
3. Kredit	5.316	5.520	5.991	6.442	6.424	20,84	-0,27
4. LDR (%)	112,06	113,66	118,52	125,64	117,66	-	-
5. NPLs (%)	11,55	11,52	10,36	9,78	9,26	-	-
6. Jumlah BPR	339	326	311	317	298	-12,1	-5,99

Sumber : LBPR Bank Indonesia

Total aset BPR pada triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp. 7,889 miliar, meningkat sebesar 5,28% dibanding dengan triwulan III-2008, atau meningkat 16,42% dibanding triwulan IV pada tahun sebelumnya (Tabel 3.6). Peningkatan tersebut banyak di-support oleh peningkatan DPK, yang pada posisi yang sama meningkat sebesar 15,04% (yoy) dan 6,47% (qtq) sehingga menjadi Rp. 5,459 miliar. Sementara itu kredit yang diberikan tumbuh sebesar 20,84% (yoy) dan -0,27 (qtq), sehingga pada Desember 2008 menjadi Rp. 6,424 miliar. Peningkatan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan DPK ini menjadikan LDR BPR meningkat dari 112,06% pada triwulan IV-2007 menjadi 117,66% pada triwulan IV-2008. Namun menurun jika dibandingkan dengan triwulan III-2008, mengingat pada triwulan tersebut LDR BPR sebesar 125,64%. Pengaruh krisis keuangan global juga dirasakan oleh BPR. BPR lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya mengingat kondisi sektor riil yang masih *wait and see*.

Jumlah BPR di Jawa Tengah menurun secara signifikan dalam kurun waktu setahun ini. Pada triwulan IV-2007 jumlah BPR yang ada di Jawa Tengah tercatat sebanyak 339 BPR, turun menjadi 298 BPR pada triwulan IV-2008. Penurunan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat yang menggabungkan BPR

miliknya, yang semula ada di setiap kecamatan, digabung (merger) menjadi satu hanya di tingkat kabupaten/kota.

3.7 Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Aset perbankan syariah dari triwulan ke triwulan selalu menunjukkan peningkatan meskipun sempat sedikit menurun pada triwulan ke I-2008. Total aset perbankan syariah pada triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp. 2,417 miliar. Aset tersebut meningkat sebesar 48,28% dibandingkan triwulan IV-2007 atau meningkat 4,54% dibanding triwulan sebelumnya. DPK yang dihimpun perbankan syariah juga meningkat 36,95% (yoy) menjadi Rp1.701 miliar, dan pembiayaan yang disalurkan naik 58,48% (yoy) menjadi Rp2.027 miliar. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan perbankan syariah di Jawa Tengah cukup menggembirakan, meskipun *share* aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan daerah masih sebesar 2,33%.

Porsi aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan di Jawa Tengah, dari waktu ke waktu juga menunjukkan peningkatan, meskipun relatif lambat. Pada triwulan IV-2007 porsi aset perbankan syariah masih tercatat 1,75%, kemudian meningkat menjadi 2,33% pada triwulan IV-2008. Perkembangan ini masih cukup jauh bila dibandingkan dengan target Bank Indonesia untuk mencapai *share* 5% secara nasional.

TABEL 3.7.
PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Total Aset	1.630	1.624	1.866	2.312	2.417	48,28	4,54
Share thd tot.perbankan	1.75	1.72	1.88	2,15	2,33	-	-
2. DPK	1.242	1.288	1.462	1.550	1.701	36,95	9,74
Share thd tot. perbankan	1.66	1.72	1.85	1,90	2,11	-	-
3. Pembiayaan	1.279	1.304	1.620	1.873	2.027	58,48	8,22
Share thd tot. Perbankan	2.05	2.04	2.26	2,42	2,78	-	-
4. FDR (%)	102.97	101.24	110.80	101,24	119,12	-	-
5. NPLs (%)	3.56	4.83	4.12	4,83	2,43	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

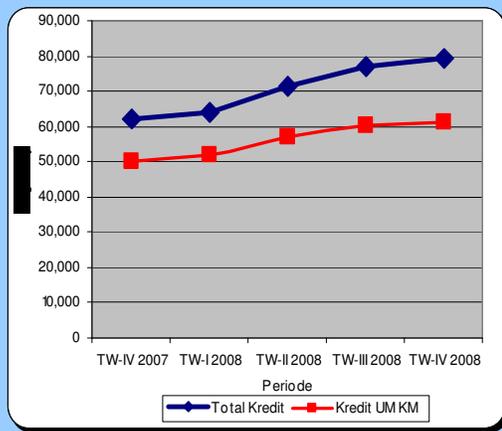
Sementara itu fungsi intermediasi yang dilakukan perbankan syariah di Jawa Tengah juga berjalan dengan baik. *Financing deposits ratio (FDR)*

perbankan syariah hampir selalu di atas 100%. Hal ini membuktikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun dari masyarakat, seluruhnya disalurkan kembali kepada masyarakat. Rasio FDR pada triwulan IV-2008 sebesar 119,12%, meningkat dibandingkan triwulan IV-2007 sebesar 102,97%. Meskipun cukup ekspansif, kredit rasio *Non Performing Financing (NPF)* perbankan syariah masih relatif rendah, terlihat dari rasio NPF perbankan syariah sampai dengan triwulan IV-2008 masih di bawah 5%, yaitu 2,43%.

3.8 Kredit UMKM

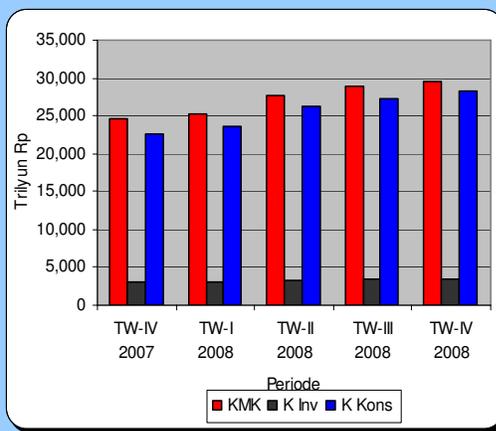
Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM di Jawa Tengah terus meningkat meski dengan pertumbuhan yang terus melambat. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV-2008 mengalami peningkatan sebesar 22,03% dibandingkan triwulan IV-2007 sehingga menjadi Rp. 61,241 miliar. Peningkatan kredit UMKM tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap meningkatnya kredit perbankan, mengingat kontribusinya pada triwulan ini mencapai 77,19% dari total kredit perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah (**Grafik 3.13**) Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 27,598 miliar atau 48,15% merupakan kredit modal kerja, sisanya sebesar 46,15% dan 5,70% merupakan kredit konsumsi dan investasi (**Grafik 3.14**).

Sesuai data statistik BPS, di Jawa Tengah diperkirakan terdapat 7,88 juta unit UMKM. Banyaknya jumlah UMKM ini tercermin dari tingginya penyaluran kredit kepada UMKM. Sebutan sebagai *heart of small medium enterprises* memang layak disandang oleh Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan keberadaan UMKM yang cukup besar ini.



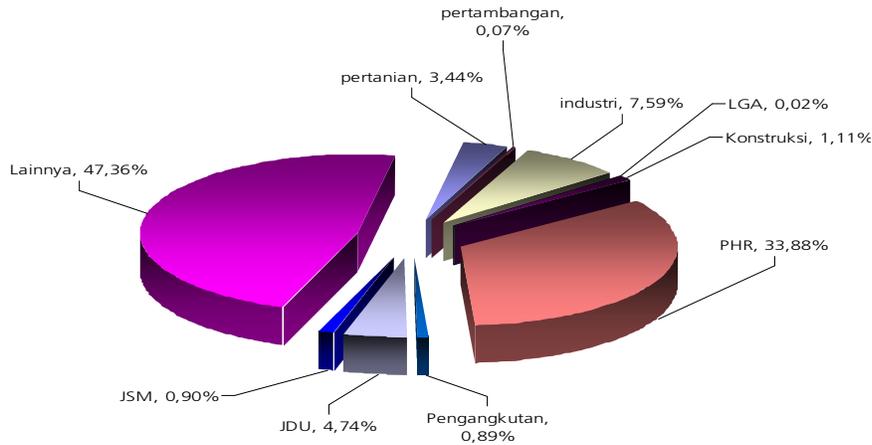
Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 3.14 Perkembangan Kredit UMKM dan Total Kredit

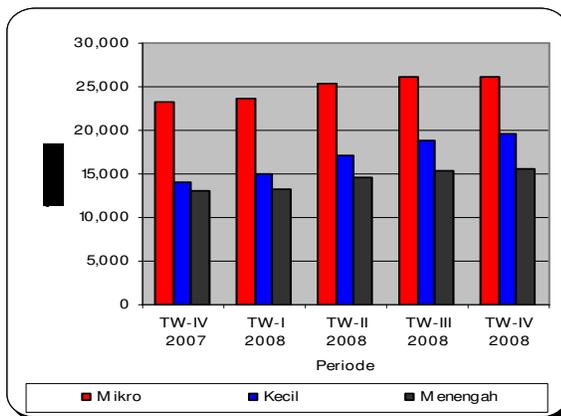


Sumber : LBU, Bank Indonesia

Grafik 3.15 Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Penggunaan



Grafik 3.16 Komposisi Kredit UMKM berdasar Sektor Ekonomi Triwulan IV-2008



Grafik 3.17 Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Skala Usaha

Sejalan dengan struktur perekonomian Jawa Tengah yang utamanya disumbang oleh tiga sektor utama yaitu sektor PHR, sektor industri, dan sektor pertanian, maka penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut. Pada triwulan IV-2008, kredit UMKM pada sektor PHR tercatat sebesar Rp. 20,751 miliar atau 33,88% dari total kredit UMKM. Sementara itu kredit UMKM untuk sektor industri dan sektor pertanian masing-masing sebesar Rp. 4,649 miliar (7,59%) dan Rp. 2,107 miliar (3,44%).

Pangsa kredit skala mikro masih mendominasi kredit UMKM. Meskipun pertumbuhannya melambat, pangsa kredit untuk skala mikro masih mendominasi pemberian kredit kepada UMKM di Jawa Tengah. Pada triwulan IV-2008 ini pangsa kredit skala mikro punya andil sebesar 42,76% terhadap total UMKM, menurun dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang memiliki andil sebesar 46,17%. Pangsa skala mikro ini diambil oleh kredit kepada skala kecil yang porsinya meningkat dari 27,83% pada triwulan IV-2007 menjadi 31,88% pada triwulan IV-2008. Sementara itu rasio kredit bermasalah atau NPLs UMKM perbankan di Jawa Tengah triwulan IV-2008 cukup bagus, yaitu sebesar 2,82%.

Upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM tetap dilakukan dalam kerangka bantuan teknis (*technical assistance*) dalam bentuk pelatihan dan penyediaan informasi. Pelatihan ditujukan kepada perbankan (Bank Umum dan BPR) maupun Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) sebagai upaya tidak langsung Bank Indonesia untuk mendorong kredit bagi UMKM melalui perbankan. Berikutnya, dalam upaya untuk penyediaan informasi, Bank Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan antara lain melaksanakan kegiatan penelitian/survei yang terkait dengan UMKM (*Baseline Economic Survey*), Survei Profil UMKM ([Lihat Boks](#), Penelitian Potensi Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Soropadan Provinsi Jawa Tengah), penyelenggaraan bazar intermediasi perbankan/bursa kredit UMKM dll. Di samping kebijakan bantuan teknis, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahun 2008 sebagai implementasi dari *refocusing* kegiatan bidang moneter Kantor Bank Indonesia, antara lain :

- Program Pengembangan Klaster

Program ini dilakukan KBI Semarang di dua tempat yaitu di klaster mebel rotan Transan, Sukoharjo kerjasama antara KBI Semarang, GTZ RED dan ASMINDO Komda Surakarta dan pada klaster grafika kerjasama antara Jaringan Rumah Usaha (JRU), KADIN Jawa Tengah, dan Balai Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan

(BP Dikjur) Jateng (**Lihat Boks**).

- Pelaksanaan Program Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPED) bekerjasama dengan Dinas, perbankan dan *stakeholders* lainnya. Kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM kepada perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya ini dilakukan Bank Indonesia Semarang bagi peternak sapi dan pengusaha konveksi. Fasilitas bagi peternak sapi potong dan sapi perah di Kabupaten Grobogan dan Kab Semarang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Peternakan, Balai Besar Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) Propinsi Jawa Tengah, Bank Jateng dan Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan fasilitas tersebut telah terealisasi kredit sebesar Rp.10,8 miliar bagi peternak di kedua kabupaten tersebut melalui skim kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Fasilitas akses pembiayaan bagi UMKM pada industri konveksi di Tingkir, Salatiga, dilakukan bekerjasama dengan Bank Mandiri, dengan realisasi kredit awal sebesar Rp. 70 juta (**Lihat Boks**).

3.9. Perkembangan Realisasi PMA/PMDN

Perkembangan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank di Jawa Tengah masih belum dapat ditampilkan. Data pembiayaan di luar perbankan seperti perusahaan leasing, koperasi, pegadaian, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya, lack-nya cukup jauh. Untuk itu yang dapat disajikan hanya perkembangan data realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Tengah.

TABEL 3.8
PERKEMBANGAN REALISASI NILAI INVESTASI PMA/PMDN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun	PMA		PMDN
	USD (ribu)	Rp Miliar	Rp Miliar
2004	504,630	-	1.900
2005	550,512	-	5.757
2006	51,934	3.011	5.067
2007	66,832	375	349
2008	39,224	589	880

Sumber : BPM Provinsi Jawa Tengah

Realiasi investasi dari PMA pada 2008 sebesar USD 39,223.86 ribu dan Rp. 588,7 miliar, menurun dibandingkan dengan realisasi investasi pada 2007 yang sebesar USD 66,832.32 ribu dan Rp. 374,9 miliar. Namun untuk PMDN mengalami peningkatan dari Rp. 348,9 miliar (2007) menjadi Rp. 880,4 miliar (2008). Secara keseluruhan tingkat realisasi investasi Jawa Tengah yang berasal dari PMA dan PMDN meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam memperkenalkan proyek-proyek unggulan di masing-masing kabupaten/kota kepada calon investor, baik investor asing maupun investor lokal.

BOKS

TFPPED KBI SEMARANG 2008: "SINERGI PERWUJUDAN *ACCESS TO FINANCE* BAGI PETERNAK SAPI DAN INDUSTRI KONVEKSI"

Kegiatan FPPED (Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah) yang dilaksanakan oleh KBI Semarang, merupakan salah satu wujud tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Jawa No. 077/04440 dan No. 10/DpG/DKM/SKB tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Deputy Gubernur BI, Hartadi A. Sarwono dan Gubernur Jawa Tengah, Ali Mufiz. Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi (1) Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor riil, (2) Koordinasi peningkatan daya saing daerah bidang ekonomi terkait globalisasi dan penguatan fungsi internasional, (3) Koordinasi pemantauan dan pengendalian harga di Jawa Tengah, (3) Pertukaran data, informasi dan kajian/ penelitian perekonomian dan (5) Kegiatan lain dalam pengembangan ekonomi Jawa Tengah.

Dalam rangka pelaksanaan butir pertama atau terkait program FPPED, KBI Semarang memulainya dengan menginventarisir daftar komoditas unggulan hasil penelitian bersama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga yaitu "Penelitian Dasar Potensi Ekonomi Daerah (*Baseline Economic Survey*) dalam rangka Pengembangan Komoditas/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) UMKM" di eks-Karesidenan Semarang.

No	Jenis Komoditas	Bank	Realisasi Kredit (Rp)
1	Sapi perah	PT. Bank Jateng Cabang Ungaran	3.350 juta
		PT. BRI Cabang Ungaran	2.750 juta
2	Sapi potong	PT. Bank Jateng Cabang Ungaran	818 juta
		PT. BRI Cabang Ungaran	3.800 juta
		PT. BRI Cabang Purwodadi	200 juta
3	Industri Konveksi	PT. Bank Mandiri Cabang Semarang	70 juta
TOTAL			10.988 juta

Sebagai tindak lanjutnya, KBI Semarang melakukan fasilitasi *access to finance* kepada peternak sapi potong dan sapi perah di kabupaten Semarang dan kabupaten Grobogan, serta kepada pelaku industri konveksi di Tingkir, kota Salatiga. Upaya tersebut dilakukan dalam koridor bantuan teknis, bekerjasama dengan Dinas Peternakan, Disperindagkop, Balai Besar Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) Jawa

Tengah, CEMSED FE UKSW Salatiga, PT. BRI , PT. Bank Jateng dan PT. Bank Mandiri. Identifikasi, sosialisasi dan intervensi yang dilakukan bersama dinas dan perbankan membuahkan hasil cukup signifikan, yaitu terealisirnya kredit kepada para peternak dan pelaku industri konveksi sebesar Rp.10,98 Milyar dengan rincian seperti pada tabel di atas.

Selanjutnya, untuk meningkatkan performance kredit dari para pelaku sekaligus intervensi untuk mengatasi *bottleneck* dalam kelompok, dilakukan beberapa fasilitasi bekerjasama dengan *stakeholders* terkait. Fasilitasi bagi peternak sapi antara lain : (1) Pelatihan Penguatan Kelompok Peternak Sapi Potong dan Sapi Perah bekerjasama Dinas Peternakan, BPTP Jawa Tengah, UPT Dinas Pertanian Boyolali dan CV. Bionat Boyolali, dan (2) Studi Banding pengelolaan usaha ternak sapi perah dan sapi potong serta pengolahan pasca panen yang lebih maju di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Melalui beberapa kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan teknis tersebut, telah menciptakan *multiplier effect* selain kredit yang diperoleh dari perbankan. Pertama, pembuatan instalasi biogas dari BISMA-SR KBI Semarang bersama-sama dengan peternak dan Dinas Peternakan. Dampak lanjutannya, BRI Grobogan memberikan kredit mikro kepada 6 (enam) anggota kelompok peternak untuk pengadaan kompor gas dan jaringan pipa guna memanfaatkan potensi biogas yang masih belum digunakan. Kedua, pemberian kredit Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BRI Ungaran untuk membangun instalasi biogas skala kecil peternak penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), yang apabila rencana ini berhasil dengan baik termasuk tingkat pengembalian kreditnya, maka model pemberian kredit dengan skim gabungan KKPE + PKBL akan dikembangkan oleh BRI. Bahkan, saat ini BRI Ungaran telah mengajukan plafon KKPE sebesar Rp 20 milyar untuk tahun 2009. Ketiga, bantuan kepada enam kelompok peternak nasabah PT BRI Ungaran dari Dinas Peternakan Kabupaten Semarang dan BPTP Provinsi Jawa Tengah berupa sarana produksi untuk meningkatkan usahanya, yaitu 32 (tiga puluh dua) unit *Milkcane*, 1 (satu) unit *Cooling Unit* kapasitas 1000 liter, 2 (dua) unit alat Uji Berat Jenis Susu, 20 (dua puluh) ekor Sapi Perah, 1 (satu) buah kandang koloni dan 7 (tujuh) buah instalasi biogas.

Adapun hasil penting lainnya adalah peningkatan wawasan, pengetahuan dan motivasi serta perubahan paradigma berpikir dari para peserta studi banding bahwa usaha ternak sapi perah maupun sapi potong di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan *benchmark* dari Jawa Timur, mengingat potensi kedua daerah tersebut relatif sama bahkan lebih baik dalam penyediaan sarana produksi dibandingkan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Di samping itu peternak juga semakin percaya bahwa usaha sapi mampu menjadi

sumber pendapatan utama bagi keluarga peternak. Berdasarkan pengamatan PT BRI Ungaran ternyata pemberian kredit kepada kelompok peternak mampu mengurangi tingkat urbanisasi masyarakat desa ke kota.

Bagi para pelaku industri konveksi di Tingkir, berdasar hasil FGD bersama pelaku, disepakati bahwa langkah strategis yang dapat dilakukan KBI Semarang dalam memfasilitasi peningkatan akses kredit kepada perbankan adalah meningkatkan akses kepada sumber bahan baku berkualitas tapi murah, mengembangkan teknologi proses dan merevitalisasi *show room* yang telah ada. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi akses kepada perbankan dengan mengidentifikasi dan menginformasikan kelayakan individual UMKM di Tingkir kepada perbankan
2. Peningkatan *competitiveness* produk melalui peningkatan aksesibilitas bahan baku dengan studi banding ke sentra konveksi di Pekalongan untuk mempelajari teknologi proses dan revitalisasi *showroom* serta ke pasar bahan baku di Cirebon dan Bandung untuk peningkatan aksesibilitas dan jejaring kepada sumber bahan baku berkualitas dan murah.

Berdasarkan hasil fasilitasi bagi kelompok peternak dan industri konveksi tersebut terdapat beberapa *lesson learnt* yang dapat direkomendasikan yaitu:

A. Fasilitasi kelompok peternak :

- Model program FPPED yang dilakukan KBI Semarang dapat direplikasikan dan/atau dimodifikasi oleh pihak bank penyalur KKPE di wilayah lain melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan setempat ataupun pihak lainnya
- Untuk mengantisipasi pemberian kredit yang semakin besar pada tahun 2009, perlu diupayakan untuk mengimpor sapi dari luar negeri, terutama sapi perah,
- Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi para peternak sapi untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan usahanya sehingga mampu menjadikannya sebagai usaha utama bukan usaha sampingan/sampingan,
- Kerjasama di antara peternak sapi perah, koperasi dan industri pengolahan susu perlu lebih diperkuat dengan prinsip transparansi dan saling menguntungkan. Jika memungkinkan Koperasi atau industri pengolahan susu tersebut bisa menjadi avalis kredit bagi peternak,
- Usulan solusi bagi peternak yang tidak memiliki jaminan kredit, dapat diatasi dengan cara memberikan kredit secara berkelompok dengan jaminan dari beberapa anggota yang memiliki, atau melalui skim kredit dimana plafon yang diberikan dengan mengikutsertakan biaya pensertifikatan tanah.

B. Fasilitasi pengusaha konveksi

- Diperlukan kegiatan pertemuan untuk mendiseminasikan hasil studi banding kepada semua pengusaha konveksi di Tingkir, sekaligus menyusun rencana

pengembangan industri konveksi di sentra ini dengan difasilitasi CEMSED FE UKSW Salatiga,

- Diperlukan kajian lanjutan mengenai berbagai kemungkinan pengembangan sentra industri/klaster konveksi Tingkir termasuk ketersediaan sarana dan fasilitas yang dimiliki Pemda Kota Salatiga yang dapat menunjang pengembangan klaster tersebut dengan biaya yang seefisien mungkin,
- Diperlukan pembinaan lanjutan kepada pelaku usaha konveksi Tingkir agar kebersamaan yang terwujud selama studi banding dapat diimplementasikan untuk meningkatkan Modal Sosial dalam klaster tersebut

Keterlibatan KBI Semarang dalam melaksanakan program TFPED merupakan hasil sinergi dari semua pihak yang terlibat. Diharapkan sinergi ini akan menjadi pondasi jalinan rantai kerjasama yang lebih kuat di masa mendatang. Jika rantai kerjasama berbagai pihak ini telah terbentuk dengan kokoh, pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang semakin maju, sistematis dan berkesinambungan.



BOKS

PROGRAM INKUBASI WIRAUSAHA UNGGULAN

Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor riil, Bank Indonesia melaksanakannya dalam koridor bantuan teknis dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan sehingga Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani sektor riil yang *feasible* untuk dapat akses ke sumber pembiayaan. Dalam implementasinya, program-program pemberdayaan sektor riil yang dilakukan di daerah masih dihadapkan pada kendala koordinasi yang belum sinergis. Untuk menjembatani kendala-kendala dalam percepatan pertumbuhan sektor riil di daerah diperlukan berbagai upaya terobosan yang lebih koordinatif, sinergis dan implementatif, antara lain melalui Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) maupun program pengembangan klaster. Salah satu implementasi program pengembangan klaster adalah dengan memfasilitasi komunitas baru klaster grafika yang akan dibentuk bersama-sama dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Propinsi Jawa Tengah (BP Dikjur Jawa Tengah), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Prop Jateng bersama Jaringan Rumah Usaha (JRU). JRU (www.jaringanrumahusaha.com), merupakan kumpulan beberapa usaha yang bisnisnya tergabung dalam satu klaster dan bertujuan untuk pembangkitan kesadaran jiwa kewirausahaan baik usaha kecil maupun mikro.

Program yang dilakukan untuk membangkitkan klaster grafika di kota Semarang ini adalah Program Pendidikan Wirausaha Unggulan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengakselerasi perkembangan sektor riil dan UMKM serta meningkatkan akses UMKM terhadap perbankan di Jawa Tengah. Peluncuran program tersebut dilakukan oleh PBI Semarang, M. Zaeni Aboe Amin, pada tanggal 23 Desember 2008 di KBI Semarang. Kerjasama ini merupakan implementasi pula dari kerjasama dalam rangka Program Ayo Ke Bank, antara KBI Semarang dan Kadin Jateng No.10/8/BKr/TPP/Sm dan No.001/KDN-JTG/MOU/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM Di Wilayah Jawa Tengah. Kerjasama ini diarahkan pada akselerasi perkembangan sektor riil dan UMKM serta peningkatan akses UMKM terhadap perbankan di Jateng.

Salah satu wujud nyatanya adalah pelatihan kewirausahaan kepada klaster UMKM yang bergerak dalam bidang Grafika di Semarang ini. Pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada keterampilan berwirausaha saja namun juga berupaya untuk membentuk karakter wirausaha unggul. Peserta dididik dalam kurikulum yang sistematis, secara klasikal maupun praktek lapangan riil, untuk menjadi seorang

wirausaha muda yang berkarakter unggul, berkompeten dan amanah. Kegiatan ini murni bebas biaya, bahkan di akhir program yang berlangsung selama 1 (satu) tahun, seluruh Wiramuda akan mendapat pendampingan usaha berkelanjutan dari Jaringan RumahUSAHA lengkap dengan dukungan pembiayaannya. Disamping dari JRU, terdapat pula perbankan yang telah bersedia untuk membantu akses pembiayaan bagi wiramuda ini pasca pendidikan.

Berdasarkan hasil seleksi terhadap ratusan pelamar di Jawa Tengah, telah terpilih 12 (dua belas) orang yang harus tinggal dan bermukim di asrama Pendidikan Wiramuda yang disediakan secara cuma-cuma di kompleks BP. DIKJUR sebagai salah satu bentuk kontribusinya dalam program ini. Selama 12 (dua belas) bulan Wiramuda akan dididik untuk mengenali potensi diri dan keterampilan grafika. Pembentukan mental dan pendampingan pasca pendidikan merupakan kelebihan dari program ini sehingga diharapkan akan memunculkan wiramuda baru yang trampil berkreasi namun juga tangguh dalam menghadapi permasalahan.

BOKS

PROFIL UMKM PESERTA JATENG FAIR 2008

LATAR BELAKANG SURVEI

Dalam rangka memberikan bantuan teknis berupa penyediaan informasi untuk mengembangkan UMKM berbasis penelitian, Kantor Bank Indonesia Semarang melakukan Survei Database UMKM dengan responden peserta Jateng Fair 2008 yang bertempat di PRPP (Pusat Promosi dan Pameran Pembangunan) pada tanggal 25 Juli – 18 Agustus 2008 bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Survei ini dilakukan atas dasar permasalahan pada tingkat hulu yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang melakukan ekspor, yaitu banyaknya UMKM (91%) yang melakukan kegiatan ekspornya melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara, hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri. Selain itu terdapat permasalahan pembiayaan UMKM oleh perbankan yang disebabkan oleh kurangnya informasi UMKM yang potensial untuk dibiayai perbankan.

Berdasar latar belakang permasalahan tersebut, dan untuk semakin meningkatkan peranan UMKM, muncul kebutuhan akan adanya suatu profil database produk UMKM, yang diperlukan oleh pelaku UMKM, pembeli/importir, maupun pihak perbankan. Survei ini dilaksanakan selama diselenggarakannya Jateng Fair 2008 dengan responden yang terdiri dari 29 peserta kabupaten dan 6 peserta kota. Masing-masing kabupaten/kota menaungi rerata 3 UMKM binaan, sehingga total responden sebanyak 105 pelaku. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung di lapangan dengan berpedoman pada instrumen penelitian berupa kuesioner.

KARAKTERISTIK UMKM PESERTA JATENG FAIR

Sektor Usaha

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), mayoritas UMKM peserta (65,71%) Jateng Fair 2008 bergerak di sektor industri pengolahan dengan produk utamanya kerajinan dari kayu, logam, besi, bahan lain; meubel, garmen dan dari kuningan, pakaian, meubel interior dan eksterior. Bentuk badan usaha sebagian besar berbentuk badan perorangan (92,38%) dengan dinas/institusi pembina utamanya adalah Disperindag Kabupaten/kota (65,71 %). Bentuk pembinaan yang telah dilakukan adalah sebagian besar (45,38%) pada peran promosi yaitu melalui fasilitasi pameran dan bantuan untuk akses pemasaran produk/jasa.

Aspek Pasar

Mayoritas responden memproduksi karena adanya permintaan dari pasar (*by demand*) dengan jenis produknya sebagian besar (42,86%) berupa kerajinan yang berasal dari kayu, batu, kaleng, aluminium, dan *shuttle kock*. Wilayah pemasaran produk UMKM sebagian besar (70,48%) di propinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemasaran ke luar negeri hanya 2,52 % yang mampu mengaksesnya. UMKM yang telah melakukan pemasaran ke luar negeri tersebut, 60% UMKM memakai jasa eksportir untuk mengirim produk ke luar negeri. Kondisi rerata penjualan yang dilakukan UMKM tiap harinya adalah Rp.5.000.000,00 dengan sistem penjualan yang dilakukan sebagian besar responden (43,81%) melalui kombinasi penjualan langsung ke konsumen akhir atau retail dan melalui pedagang perantara. Sistem pembayaran penjualan sebagian besar (63,81%) adalah tunai.

Aspek Produksi

Dari 69 perusahaan UMKM yang bergerak di sektor industri pengolahan dan industri serta industri makanan dan minuman, sebagian besar (56,52%) kapasitas produksinya lebih besar dibandingkan dengan kapasitas yang telah dipergunakan. Pemasok bahan baku sebagian besar (59,42%) dipasok dari perusahaan yang ada di propinsi Propinsi Jawa Tengah. Adapun sistem pembayaran bahan baku yang dilakukan sebagian besar responden (76,81%) adalah tunai.

Aspek Hukum dan Manajemen

Dari sisi hukum, sebagian besar responden (45,71%) hanya memiliki satu macam perijinan, dalam arti belum semuanya perijinan dimiliki. Berkaitan dengan pengalaman berwirausaha, sebagian besar (61,90%) pelaku UMKM telah memiliki pengalaman bekerja sebelumnya sebagai wirausaha dalam jenis usaha yang lain maupun sebagai karyawan. Adapun tingkat pendidikan pemilik sebagian besar (48,6%) berpendidikan SMA/SMK atau yang setara. Jumlah tenaga kerja tetap yang dimiliki oleh setiap UMKM paling sedikit satu orang dan yang paling banyak adalah 120 orang, dengan tingkat pendidikan sangat bervariasi mulai dari SD/MI sampai dengan Sarjana.

Aspek Keuangan

Dilihat dari rerata investasi yang dimiliki responden, investasi dalam bentuk tanah tercatat sebesar Rp.184.142.857,00, bangunan sebesar Rp.164.727.273,00, mesin dan peralatan sebesar Rp.33.374.383,00, kendaraan sebesar Rp. 43.327.160,00. Adapun rerata utang jangka panjangnya sebesar Rp.58.144.737,00. Kondisi modal kerja yang dimiliki UMKM sangat bervariasi. Rerata modal kerja UMKM dalam bentuk kas dan bank sebesar Rp.30.522.222,00, persediaan sebesar Rp.48.686.543,00, piutang dagang sebesar Rp.30.990.816,00, piutang lainnya

sebesar Rp.18.833.333,00. Sedangkan rerata utang yang mereka miliki adalah sebesar Rp.24.999.130,00, dan utang lancar lainnya sebesar Rp. 52.000.000,00.

Sebagian besar (61%) sumber dana UMKM berasal dari modal sendiri, dan hanya sebagian kecil (39%) yang berasal dari modal pinjaman. Berkaitan dengan modal pinjaman tersebut, sebagian kecil (11%), diberi agunan proyek itu sendiri, dan sebagian besar (53%) diberi agunan berupa jaminan tambahan diluar proyek yang memerlukan pendanaan. Pinjaman yang diperoleh UMKM paling lama berjangka 10 tahun dan yang terpendek adalah 10 bulan. dengan masa tenggang yang diperoleh paling sedikit 6 bulan dan paling lama 1 tahun, suku bunga pinjaman paling murah 0,12% perbulan, dan paling mahal adalah 3% perbulan. Sebagian besar (44%) agunan berupa tanah dan bangunan, dengan nilai aset paling besar sebesar Rp.3.500.000.000,00 dan yang terendah sebesar Rp.40.000.000,00. Nilai aset bergerak yang dijadikan agunan mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 dan nilai aset bergerak terendah yang dijadikan agunan adalah sebesar Rp.5.000.000,00.

Rencana Pengembangan UMKM

Berkaitan dengan rencana pengembangan usaha, sebagian besar UMKM (90%) memiliki rencana pengembangan usaha untuk membuka pasar dan ekspansi pasar terutama pasar luar negeri. Namun, karena akses pada sumber pembiayaan yang terbatas, maka sebagian besar responden (54%) akan membiayai kebutuhan investasinya dengan modal sendiri, sedangkan modal kerja untuk rencana pengembangannya sebagian besar (57,34%) juga masih akan dibiayai dengan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM peserta Jateng Fair 2008 merencanakan pengembangan untuk investasi dan modal kerja dengan modal sendiri, hanya sebagian kecil yang berkeinginan dibiayai dari pihak perbankan.

KESIMPULAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal sbb :

1. Perlunya pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif seiring dengan menurunnya kompetisi sektor industri dan teknologi informasi bagi negara maju karena perkembangannya telah beralih ke negara berkembang seperti China, dan India.
2. Bagi pemerintah daerah/pembina UMKM dapat direkomendasikan beberapa hal sbb:
 - a. Terkait dengan masih kurangnya kemampuan UMKM dalam berhubungan langsung dengan importir/buyer LN, maka hal ini memberi peluang bagi

- dinas/instansi untuk melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan penguasaan bahasa asing, teknik bernegosiasi, teknik memasarkan produk melalui internet, teknik penggunaan jasa perbankan dalam transaksi internasional, dan cara memanfaatkan jejaring internasional.
- b. Dengan adanya UMKM yang hanya memiliki satu macam perijinan, dalam arti belum semuanya perijinan dimiliki, maka hal ini perlu adanya pembinaan dari instansi terkait akan arti pentingnya perijinan, terlebih mengingat kepemilikan perijinan badan usaha ini merupakan hal yang penting karena seringkali hal ini menjadi syarat utama untuk mengakses pihak perbankan maupun pasar.
 - c. Perlunya untuk membantu pemasaran produk agar tidak terjadi kekosongan pada kapasitas yang dimiliki dengan media yang sesuai. Misalkan: bagi perusahaan yang berupaya untuk berorientasi ekspor maka sebaiknya dapat menggunakan media pameran dengan audiens buyer dari LN. Mengingat karakteristik Jateng Fair lebih berorientasi pada hiburan masyarakat dan tidak terlalu berorientasi untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan jejaring bisnis, eksportir maupun pembeli dari luar negeri maka pelaku yang dilibatkan sebaiknya yang berorientasi ke pasar dalam negeri.
3. Bagi perbankan dapat direkomendasikan beberapa hal sbb:
- a. Peluang bagi perbankan masih terbuka luas untuk mendorong peningkatan penggunaan jasa perbankan bagi pelaku UMKM terkait dengan kebutuhan responden untuk optimalisasi kapasitas produksi. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa UMKM kesulitan dalam mengakses perbankan karena keterbatasan sumber daya padahal sebagian besar UMKM memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha.
 - b. Diperlukannya komitmen bersama dalam upaya untuk menyederhanakan persyaratan, prosedur dan jaminan pengajuan kredit bagi UMKM untuk selanjutnya disosialisasikan kepada pengusaha UMKM melalui dinas terkait maupun perbankan.

Bab 4

Keuangan Daerah

4.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, **realisasi pendapatan APBD triwulan IV 2008** yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melaksanakan berbagai realisasi pembangunan **dari Januari 2008 hingga Desember 2008 mencapai Rp. 5,27 triliun atau meningkat 102,65 % dari target yang ditetapkan**. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2007, terjadi peningkatan sebesar Rp. 903,7 miliar (20,71 %). Secara rinci realisasi APBD triwulan IV 2008 tercantum dalam table 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Realisasi APBD Desember 2007- Desember 2008 (Rp Juta)

NO	URAIAN	APBD Perub *) 2008	REALISASI			PERUBAHAN	
			Dec-07	2008	% APBD-08	(Rp JT)	%
A	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.598.520,12	2.932.805,17	3.762.755,52	104,56	829.950,34	28,30
	- Pendapatan Pajak Daerah	2.952.500,00	2.422.799,02	3.068.130,11	103,92	645.331,10	26,64
	- Pendapatan Retribusi Daerah	341.923,20	301.213,53	345.651,28	101,09	44.437,75	14,75
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	131.234,44	95.682,66	141.471,95	107,80	45.789,29	47,86
	- Lain-Lain PAD Yang Sah	172.862,48	113.109,96	207.502,17	120,04	94.392,21	83,45
2	DANA PERIMBANGAN	1.532.287,18	1.419.342,56	1.504.184,02	98,17	84.841,46	5,98
	- Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	478.795,31	361.564,93	450.692,15	94,13	89.127,22	24,65
	- Dana Alokasi Umum	1.053.491,87	1.050.732,00	1.053.491,87	100,00	2.759,87	0,26
	- Dana Alokasi Dana Khusus	-	-	-	-	-	-
	- Dana Penyes. Tunj. Pendidikan	-	-	-	-	-	-
	- Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	-	7.045,63	-	-	(7.045,63)	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	229,97	11.364,86	229,98	100,00	(11.134,89)	-97,98
	- Hibah	-	11.364,86	-	-	-	-
	- Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	229,97	-	229,98	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	5.131.037,27	4.363.512,60	5.267.169,51	102,65	903.656,92	20,71

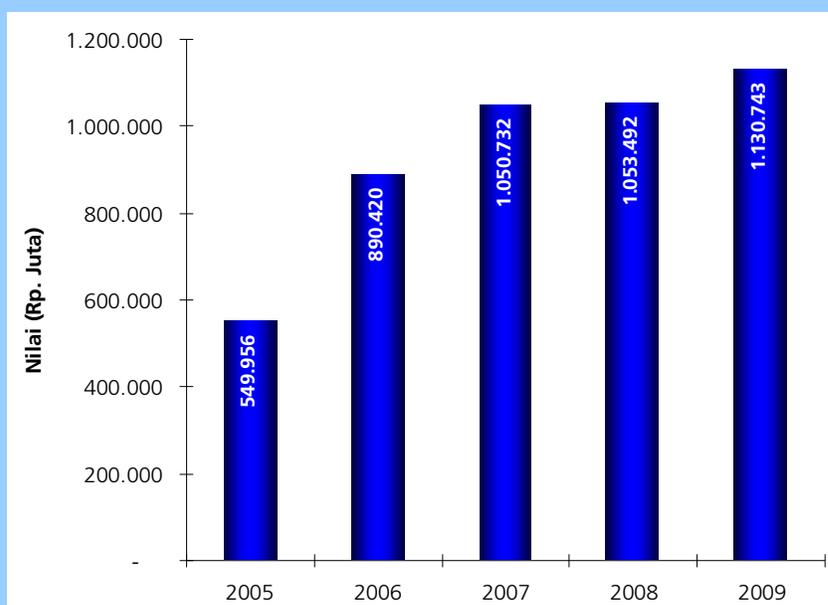
Sumber : Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : *) Data Sementara

Untuk komponen pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga triwulan IV 2008, realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 3,76 triliun atau meningkat sebesar 104,56 % dari target awal yang sebesar Rp. 3,6 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2007,

tercatat peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 814,9 miliar atau meningkat sebesar 27,64 %. Dari sisi nilai pemasukan, Pajak Daerah masih memberikan sumbangan nilai terbesar yang senilai Rp. 3,07 triliun atau meningkat sebesar 27,64 % dari triwulan IV tahun 2007. Dilihat dari pencapaian tiap komponen yang melebihi 100 %, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam mengelola berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta mampu dalam membiayai pembangunan daerah. Mengingat pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi daerah, maka sudah seharusnya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan program – program intensifikasi pajak.

Pada 2008, Dana Perimbangan yang direalisasikan juga mengalami peningkatan sebesar 5,98 % jika dibanding realisasi pada tahun 2007. komponen Dana Perimbangan yang mengalami peningkatan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp. 1,5 triliun atau 100 % dari target. Perkembangan alokasi DAU dari tahun 2005 hingga 2009 menunjukkan peningkatan dari sisi nilai DAU. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan berbagai kebutuhan masyarakat yang harus dapat difasilitasi oleh pemerintah, meskipun peningkatan nilai DAU tersebut tidak terlalu besar, karena pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.

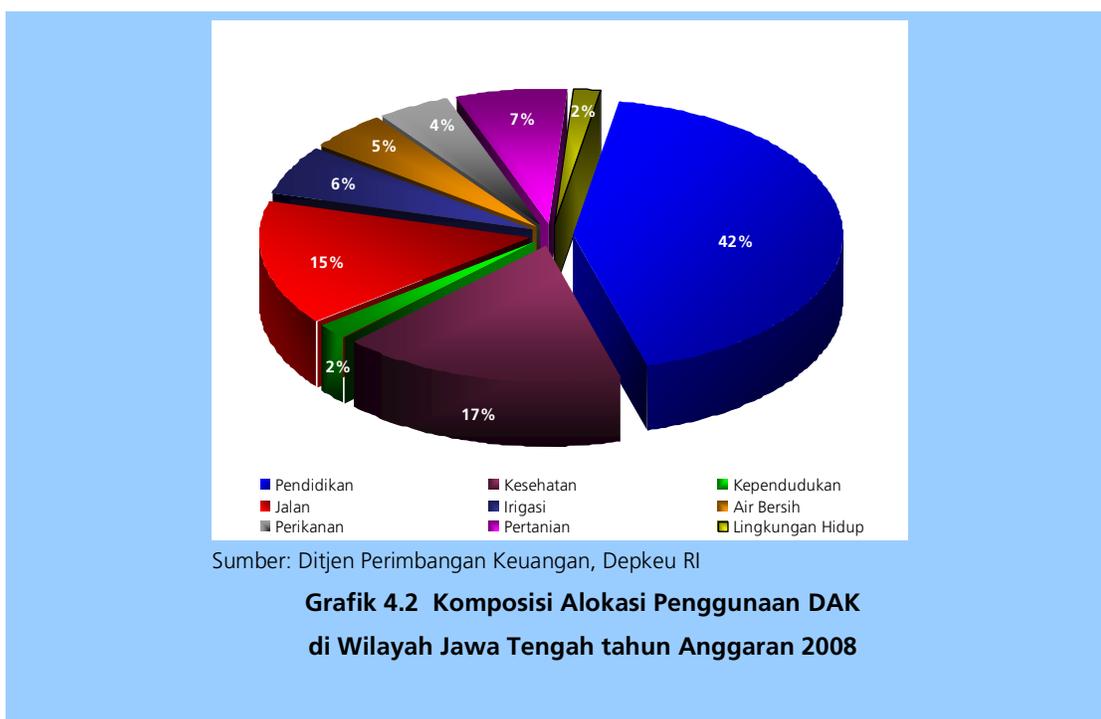


Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu RI

Grafik 4.1 Alokasi DAU Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2005-2009

Untuk komponen Dana Alokasi Khusus (DAK), pengelolaan langsung diserahkan kepada kabupaten/kota. Demikian juga dengan penyaluran DAK yang langsung

diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan usulan kegiatan daerah dalam bentuk rencana proyek yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Pada sebagian besar daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah, 42 % alokasi DAK digunakan untuk peningkatan struktur dan infrastruktur di bidang Pendidikan, 17 % di alokasikan untuk bidang Kesehatan dan 15 % untuk struktur dan infrastruktur pendukung Jalan. Sedangkan sisa alokasi DAK (26 %) terbagi ke dalam beberapa bidang diantaranya Kependudukan, Irigasi, Air Bersih, Perikanan, Pertanian dan Lingkungan Hidup. Penentuan bidang penerima alokasi DAK disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



Sumber lain yang menjadi pendapatan daerah adalah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Komponen yang termasuk didalam sumber pendapatan ini antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lain sesuai perundangan yang berlaku. **Untuk tahun 2008, penerimaan dari sisi Lain-lain Pendapatan Yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 229,98 juta.** Sedangkan pada tahun 2007, terdapat dana hibah sebesar Rp. 11,36 miliar, sehingga jika dibanding tahun 2007, dari sisi nilai terjadi penurunan pendapatan daerah tahun 2008 dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah senilai Rp. 11,13 miliar atau turun - 97,98 %.

4.2. BELANJA DAERAH

Peranan keuangan daerah terhadap perekonomian daerah Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2008. Hal ini tercermin dari realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 yang sudah terealisasi sebesar 91,01% dari APBD-P 2008 sedikit lebih baik dibanding tahun 2007 yang sebesar 89,29%. Peningkatan penyerapan anggaran belanja daerah tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik dari pemerintah daerah pada tahun ini, yang berarti adanya peningkatan dorongan dari sisi fiskal pemerintah daerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah lesunya sektor industri dan ekspor akibat krisis global. Bila dibandingkan dengan realisasi sampai triwulan sebelumnya yang hanya 57,72 %, terlihat bahwa penyerapan anggaran pada triwulan ini mencapai 33,29%, lebih besar dibanding ketiga triwulan sebelumnya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya terjadi penumpukan realisasi belanja pada triwulan IV yang terkesan hanya untuk mengejar target anggaran.

Tabel 4.2 Realisasi Belanja APBD Desember 2007- Desember 2008 (Rp Juta)

NO	URAIAN	APBD 2008 stlh perub	REALISASI			PERUBAHAN	
			2007	2008	% APBD-08	(Rp JT)	%
B	BELANJA	5.660.202,57	3.905.223,50	5.151.135,43	91,01	1.245.911,93	31,90
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.672.147,87	2.458.441,30	3.360.542,69	91,51	902.101,39	36,69
	Belanja Pegawai	951.389,30	789.702,14	876.807,23	92,16	87.105,09	11,03
	Belanja Bunga	4,70	1,65	0,99	21,06	(0,66)	-40,00
	Belanja Hibah	472.986,75	2.625,24	385.489,98	81,50	382.864,74	14583,99
	Belanja Bantuan sosial	459.355,98	352.270,70	412.423,15	89,78	60.152,45	17,08
	Belanja Bagi Hasil	1.108.765,48	865.593,44	1.058.172,72	95,44	192.579,28	22,25
	Belanja Bantuan Keuangan	659.645,63	501.337,22	626.139,79	94,92	124.802,57	24,89
	Belanja Tidak Terduga	20.000,00	5.910,90	1.508,81	7,54	(4.402,09)	-74,47
2	BELANJA LANGSUNG	1.988.054,70	1.446.782,19	1.790.592,74	90,07	343.810,55	23,76
	Belanja Pegawai	274.665,31	262.242,18	243.331,35	88,59	(18.910,83)	-7,21
	Belanja Barang dan Jasa	1.123.543,13	811.302,91	1.018.236,62	90,63	206.933,71	25,51
	Belanja Modal	589.846,25	373.237,10	529.024,76	89,69	155.787,66	41,74
	SURPLUS (DEFISIT)	(529.165,30)	458.289,09	116.034,07	-21,93	-	-
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
	- Penerimaan Daerah	850.666,51	431.233,89	784.986,83	92,28	353.752,94	82,03
	- Pengeluaran Pembiayaan	321.501,21	559.736,76	299.607,06	93,19	(260.129,70)	-46,47
	PEMBIAYAAN NETTO	529.165,30	(128.502,87)	485.379,77	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN	-	329.786,22	601.413,84	-	-	-

Sumber : Biro Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun ini realisasi belanja mencapai Rp 5,15 triliun, meningkat cukup signifikan sebesar Rp 1,42 triliun atau 31,90% dibandingkan tahun lalu. Pada akun pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 82,03% atau Rp 353 miliar menjadi Rp. 784 miliar. Hampir setengah dari penerimaan tersebut disebabkan adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp. 370 miliar, sisanya lebih banyak disumbang oleh penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 329 miliar. Sedangkan pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah minus 46,47%, yang disebabkan tidak dianggarkannya pembentukan dana cadangan pada tahun ini.

1. Belanja Tidak Langsung :

Realisasi Belanja tidak langsung tahun 2008 tercatat sebesar 91,51% dan tumbuh sebesar 36,69% dibandingkan tahun 2007 dari Rp. 2,45 triliun menjadi Rp. 3,36 triliun. Peningkatan belanja tidak langsung ini disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat signifikan pada pos belanja hibah hingga sebesar 14.583,99%, disamping belanja-belanja lainnya.

2. Belanja Langsung :

Realisasi Belanja Langsung tahun 2008 sebesar 90,07 % meliputi pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Pertumbuhan belanja langsung sebesar 23,76%, dari Rp. 1,44 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 1,79 triliun. Adapun rincian pertumbuhan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal secara berturut-turut sebesar -7,21%, 25,51%, dan 41,74%. Peningkatan Belanja Langsung ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor riil mengingat anggaran belanja modal merupakan investasi Pemerintah Daerah untuk membiayai sektor riil, sehingga dorongan fiskal pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam menjaga momentum perekonomian daerah tetap tumbuh ditengah-tengah krisis keuangan global yang mengancam.

Halaman Ini sengaja dikosongkan

Bab 5

Perkembangan Sistem Pembayaran

Dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas perekonomian di Jawa Tengah, Bank Indonesia senantiasa mengupayakan kelancaran sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman. Transaksi pembayaran tersebut dapat berupa transaksi tunai dan transaksi non tunai. Dalam transaksi tunai, Bank Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang cukup serta layak edar. Pada transaksi pembayaran non tunai, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan Sistem Kliring Nasional (SKN) dan RTGS (Real Time Gross Settlement).

Perkembangan sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 secara umum mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah aliran uang masuk (inflow) mengalami peningkatan, namun aliran uang keluar (outflow) di KBI Semarang, KBI Solo dan KBI Purwokerto mengalami penurunan. Transaksi kliring secara nominal dan jumlah transaksi mengalami penurunan. Demikian pula transaksi pembayaran melalui BI-RTGS, nilai transaksi maupun volumenya mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

5.1.1 Kliring lokal

Perkembangan transaksi pembayaran non tunai melalui kliring lokal di wilayah kerja KBI Semarang, KBI Solo dan KBI Purwokerto, baik secara nominal maupun volume mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara yoy menunjukkan pertumbuhan positif meskipun melambat. Penurunan aktivitas transaksi kliring tersebut disatu sisi terkait dengan siklus tahunan pasca hari raya keagamaan dan disisi lain karena imbas krisis keuangan yang berdampak pada perlambatan pada kegiatan dunia usaha. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan IV-2008, secara umum kegiatan usaha menunjukkan penurunan, atau melemah sebesar 1,37 poin dibanding dengan hasil SKDU Triwulan III-2008 (dari SBT 15,16% pada triwulan III-2008 menjadi SBT 13,43% pada triwulan IV-2008). Rata-rata nilai transaksi pembayaran melalui sistem kliring sebesar Rp 1.290 triliun, turun sebesar 0,05% (qtq) atau naik 0,38% (yoy). Sementara rata-rata volume transaksi kliring mencapai 37.097 warkat per bulan di wilayah kerja KBI Semarang pada triwulan IV-2008 turun sebesar 0,04% (qtq) atau naik 0,16%

(yoy). Berdasarkan wilayah kerja, total nilai transaksi kliring rata-rata per bulan di wilayah kerja **KBI Semarang** pada triwulan IV-2008 turun sebesar 0,06% (qtq) yaitu dari Rp 920 triliun menjadi Rp 861 triliun, sedangkan secara yoy tumbuh positif sebesar 0,52%, sedangkan jumlah transaksi kliring juga turun sebesar 0,08% (qtq) namun naik 0,17% (yoy) menjadi 23.492 warkat. Di wilayah kerja **KBI Solo** nominal transaksi rata-rata nominal transaksi kliring pada triwulan IV-2008 naik sebesar 0,07% (qtq), namun turun 0,81% (yoy), sedangkan jumlah warkat yang dikliringkan sebanyak 1.680 atau naik 0.02% (qtq) namun turun 0,82% (yoy). Sementara di **KBI Purwokerto**, nilai transaksi sebesar Rp 73 triliun per bulan atau turun 0,21% (qtq) namun naik 0,12% (yoy), sedangkan jumlah transaksi kliring 2.707 warkat per bulan atau turun 0,24% (qtq) dan 0,03% (yoy).

TABEL 5.1.
PERKEMBANGAN TRANSAKSI KLIRING LOKAL
RATA-RATA PER BULAN DI JAWA TENGAH (RP TRILIUN)

WILAYAH	2007		2008				Pertumbuhan	
	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	QTQ	YOY
JAWA TENGAH								
Nominal	1,360	936	828	1,073	1,360	1,291	(0.05)	0.38
Volume (lembar)	38,965	32,094	29,585	34,002	38,577	37,097	(0.04)	0.16
SEMARANG								
Nominal	764	565	464	695	920	861	(0.06)	0.52
Volume (lembar)	26,393	20,048	17,855	22,285	25,404	23,492	(0.08)	0.17
SOLO								
Nominal	259	305	34	17	54	58	0.07	(0.81)
Volume (lembar)	9,544	9,243	1,507	1,173	1,652	1,680	0.02	(0.82)
PURWOKERTO								
Nominal	65	65	61	60	92	73	(0.21)	0.12
Volume (lembar)	3,028	2,803	2,585	2,502	3,553	2,707	(0.24)	(0.03)

Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo dan Purwokerto

5.1.2 Real Time Gross Settlement (RTGS)

Nominal transaksi melalui RTGS di Jawa Tengah mengalami penurunan secara qtq, namun secara yoy meningkat. Meskipun transaksi melalui BI-RTGS mempunyai keunggulan dalam kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian transaksi dan resiko settlement-nya dapat diperkecil, namun demikian seiring dengan lesunya iklim usaha di Jawa Tengah turut berpengaruh pada masyarakat pengguna layanan transaksi melalui BI-RTGS. Dalam triwulan IV-2008 perkembangan transaksi rata-rata RTGS di KBI Semarang mengalami penurunan sebesar 59,67% (qtq) yakni semula Rp 35.082 miliar turun menjadi sebesar Rp 14.149 miliar transaksi per bulan, sedangkan transaksi RTGS KBI Purwokerto secara triwulanan turun 15,49% (qtq) menjadi sebesar Rp 2.340 miliar. Namun demikian untuk KBI Solo transaksi RTGS

pada triwulan IV-2008 naik sebesar 52,41% (qtq) menjadi Rp 3.254 miliar dari semula sebesar Rp 2.135 miliar.

TABEL 5.2
PERKEMBANGAN TRANSAKSI RTGS DI JAWA TENGAH

Wilayah Jawa Tengah Nominal transaksi (Miliar Rp)	2007	2008				Pert (%)	
	IV	I	II	III	IV	yoy	qtq
Semarang	23,866	24,563	24,546	35,082	14,149	-40.71	-59.67
Purwokerto	6,738	4,168	3,206	2,769	2,340	-65.27	-15.49
Solo	928	1,988	1,518	2,135	3,254	251	52.41
Total	7,666	6,156	4,724	39,986	19,743	144.66	(22.75)

Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo dan Purwokerto

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

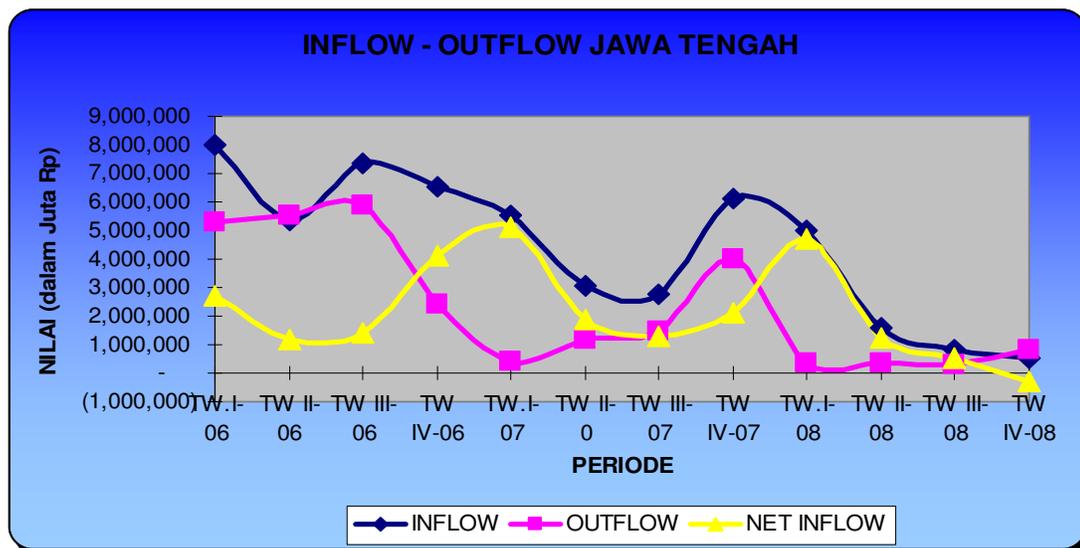
5.2.1 Aliran Uang Masuk dan Keluar (*Inflow/Outflow*)

Sebagaimana triwulan sebelumnya, perkembangan aliran uang kartal pada triwulan IV-2008 di wilayah kerja KBI Semarang, Solo dan Purwokerto tetap mengalami net inflow atau jumlah aliran uang yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah aliran uang keluar. Aliran uang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah aliran uang yang keluar. Jumlah uang kartal yang masuk (inflow) di Jawa Tengah (KBI Semarang, KBI Purwokerto dan KBI Solo) pada triwulan IV-2008 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2008 kas inflow ke Bank Indonesia tercatat sebesar Rp 7.574 miliar, atau meningkat 198% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp 2.544 miliar. Peningkatan inflow pada triwulan IV-2008 di Jawa Tengah tersebut merupakan siklus tahunan setelah masyarakat merayakan hari Raya Idul Fitri, sehingga aliran kas kembali ke sistem perbankan. Selain itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan uang di Bank Indonesia serta optimalisasi manajemen kas perbankan telah berjalan dengan baik. Sedangkan aliran kas outflow dari KBI di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 sebesar Rp 2.278 miliar atau turun sebesar (52,94) % dibandingkan dengan outflow triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan uang di Bank Indonesia serta optimalisasi manajemen kas perbankan telah berjalan dengan baik.

Kegiatan transaksi sistem pembayaran tunai di Jawa Tengah terutama didominasi transaksi di wilayah kerja KBI Semarang. Pada triwulan IV-2008, KBI Semarang mengalami net inflow sebesar Rp 2.783 miliar. Aliran uang kas masuk di KBI Semarang pada triwulan IV-2008 tercatat sebesar Rp 4.124 miliar atau naik 253,39% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan aliran kas keluar

KBI Semarang pada triwulan yang sama tercatat sebesar Rp 1.341 miliar atau turun sebesar (53,52)% dibandingkan triwulan sebelumnya.

GRAFIK 5.1.
PERKEMBANGAN INFLOW DAN OUTFLOW UANG KARTAL
DI JAWA TENGAH



Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo dan Purwokerto

Pada triwulan IV-2008, jumlah uang kertas dan uang logam yang masuk ke Bank Indonesia Semarang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara nominal, uang kertas yang masuk ke Kantor Bank Indonesia Semarang sebesar Rp 8249 miliar atau meningkat 253,43% dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan uang kertas masuk yang tinggi tersebut, terkait dengan siklus pasca liburan dan Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu uang logam yang masuk ke KBI Semarang Rp 66 juta atau turun sebesar (77,38)% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Turunnya jumlah uang logam yang masuk ke Bank Indonesia karena penyediaan jumlah uang logam outflow dari Bank Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

TABEL 5.3.
PERKEMBANGAN INFLOW UANG KERTAS DAN UANG LOGAM
MELALUI KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG

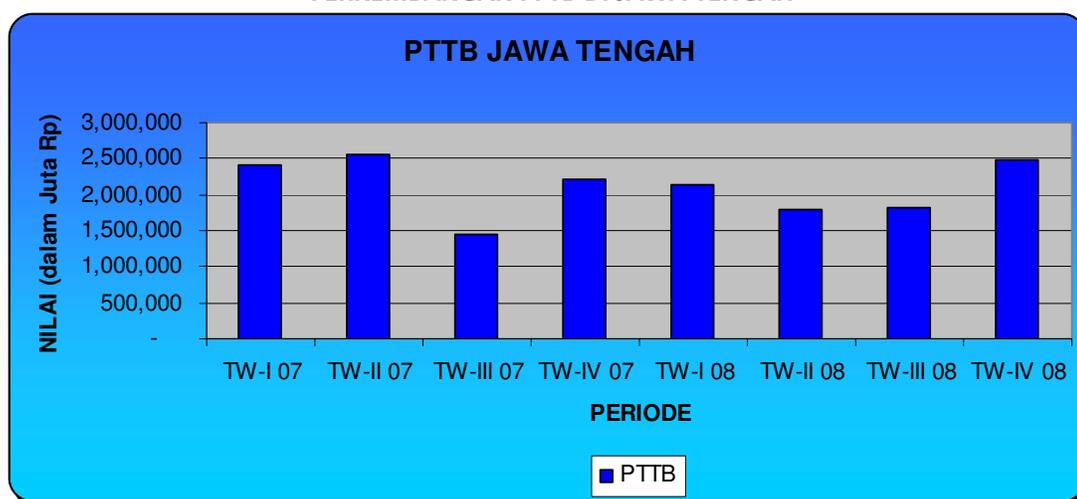
PECAHAN	2006				2007				2008		
	TW I-06	TW II-06	TW III-06	TW IV-06	TW I-07	TW II-07	TW III-07	TW IV-07	TW I-08	TW II-08	TW III-08
	(dalam jutaan Rupiah)				(dalam jutaan Rupiah)				(dalam jutaan Rupiah)		
Total UK	3,558,105	2,417,264	2,344,541	3,080,946	2,687,041	1,665,062	1,563,561	3,637,833	2,609,492	1,578,733	1,166,944
100,000	1,456,802	1,018,938	1,009,336	1,372,575	1,182,498	770,433	664,689	1,892,139	1,113,155	555,319	464,525
50,000	1,756,130	1,216,718	1,183,031	1,446,694	1,230,442	677,157	732,688	1,467,341	1,214,982	811,152	550,481
20,000	130,613	94,495	79,326	122,776	108,632	93,223	78,968	116,319	110,093	77,791	65,952
10,000	56,831	34,800	35,390	73,452	83,310	65,048	47,829	85,309	85,492	61,527	46,407
5,000	76,562	36,735	27,813	44,462	52,464	40,865	29,065	53,335	55,644	52,909	31,575
1,000	31,569	15,330	9,569	20,867	29,566	18,275	10,281	23,356	30,100	20,020	7,989
500	49,585	234	73	115	124	57	39	33	24	14	15
100	13	14	3	5	5	4	2	1	2	1	-
Total UL	14,037	9,250	2,049	6,475	11,805	7,237	1,944	5,153	8,781	85	145
1,000	919	476	35	315	621	240	14	170	500	25	11
500	9,679	7,111	1,826	5,896	9,923	6,058	1,919	4,973	8,180	48	113
200	1,194	885	170	204	954	669	7	4	97	10	19
100	2,243	774	18	60	303	268	4	6	4	2	2
50	2	4	-	-	4	2	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,572,142	2,426,514	2,346,590	3,087,421	2,698,846	1,672,299	1,565,505	3,642,986	2,618,273	1,578,818	1,167,089

Sumber : Bank Indonesia Semarang

5.2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan transaksi pembayaran secara tunai bertujuan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*fit for circulation*). Pada triwulan IV-2008, jumlah PTTB di KBI se-Jawa Tengah tercatat sebesar 2.476 miliar, mengalami atau meningkat sebesar 36.53% dibandingkan triwulan III-2008.

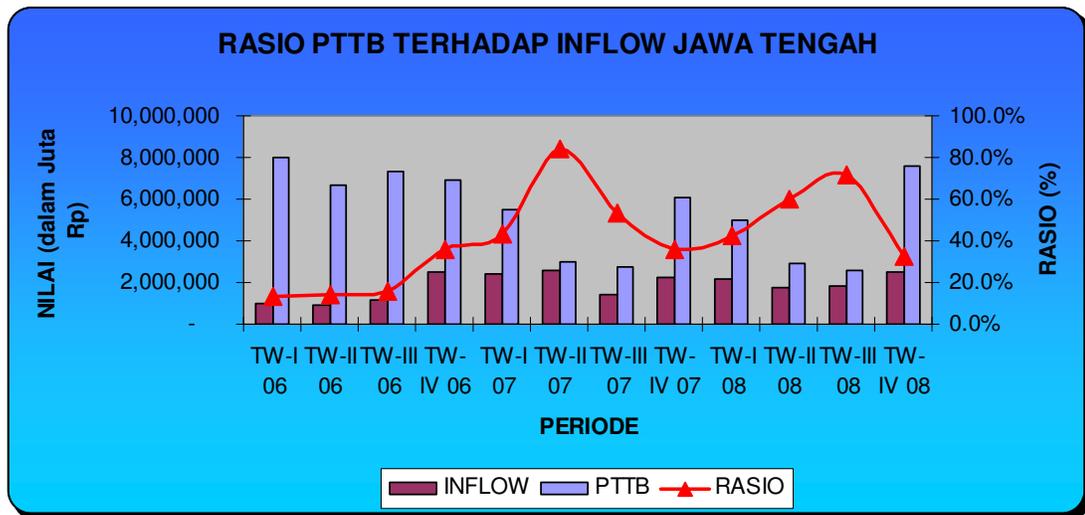
GRAFIK 5.2.
PERKEMBANGAN PTTB DI JAWA TENGAH



Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo dan Purwokerto

Sementara itu, rasio PTTB terhadap *cash inflow* Kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 sebesar 32.7%. (Grafik 5.3)

GRAFIK 5.3.
PERKEMBANGAN KAS INFLOW DAN PTTB DI JAWA TENGAH

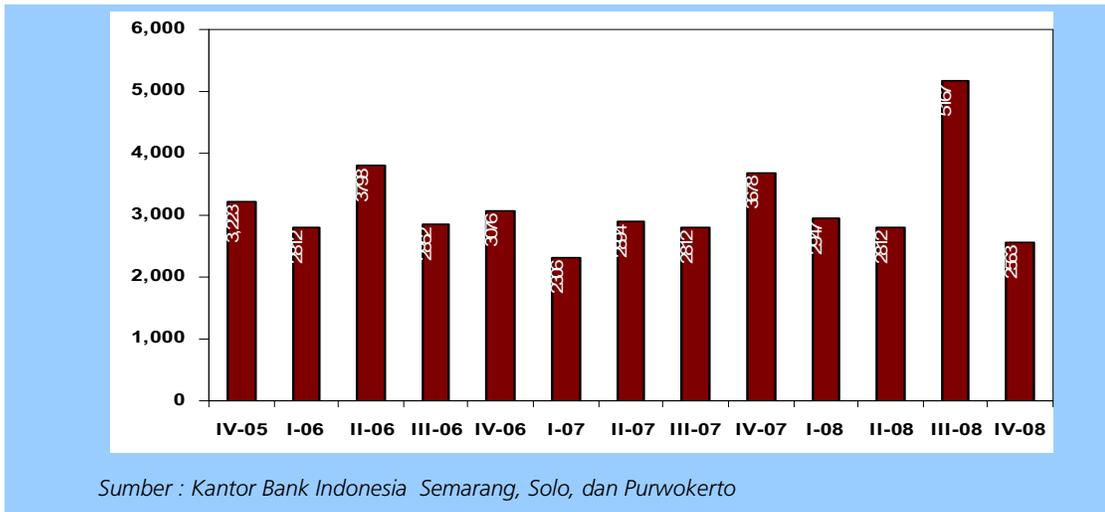


Sumber: Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo dan Purwokerto

5.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Jumlah temuan uang rupiah palsu (UPAL) yang tercatat di Kantor Bank Indonesia dalam triwulan IV-2008 tercatat sebanyak 2.563 lembar atau mengalami menurun cukup signifikan dibandingkan triwulan yang lalu sebanyak 5.167 lembar.

GRAFIK 5.4.
PERKEMBANGAN UPAL DI WILAYAH KERJA KKBI SEMARANG



Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang, Solo, dan Purwokerto

Namun demikian, dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar, jumlah temuan uang palsu ini persentasenya sangat kecil. Rata-rata temuan UPAL dalam triwulan laporan sebanyak 854 lembar/bulan, lebih rendah dari triwulan III-2008 sebanyak 943 lembar/bulan. Pecahan Rp50.000,00 adalah jenis uang yang terbanyak

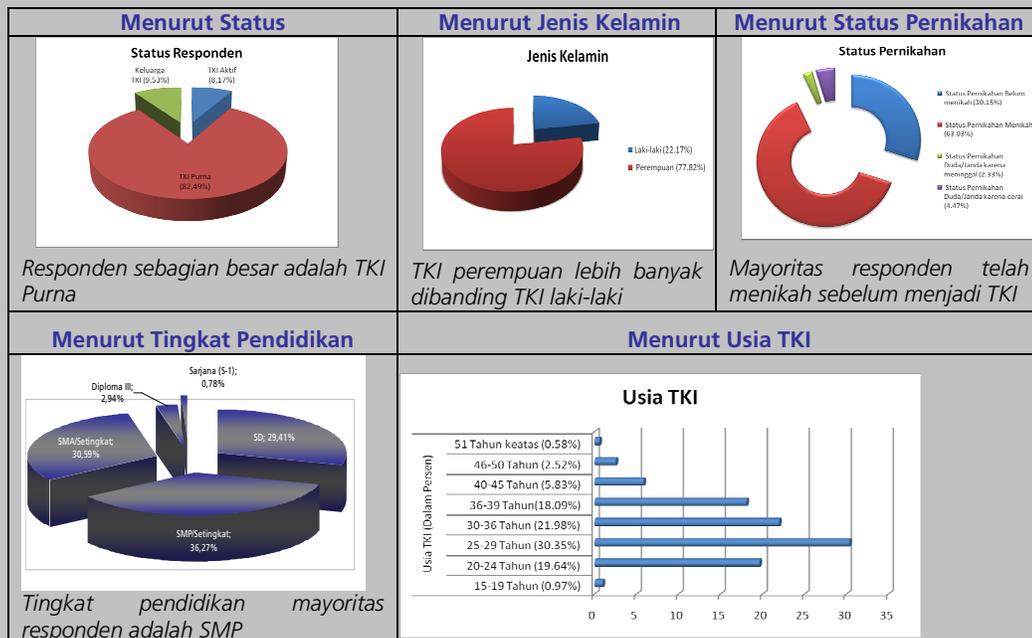
dipalsu atau 29,54% dari total UPAL, disusul pecahan Rp100.000,00 sebanyak 21,02% dari total`

BOKS

SURVEI POLA REMITANSI TKI PROPINSI JAWA TENGAH 2008

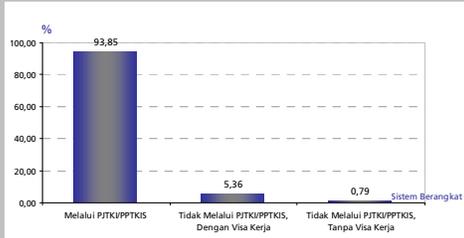
Dalam beberapa studi ditemukan bahwa remitansi memiliki dampak yang besar terhadap kondisi makroekonomi, seperti efeknya terhadap pendapatan nasional di negara berkembang hingga mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bagi Bank Indonesia, penelitian tentang *Worker's Remittance* (WR) TKI terus dilakukan dalam rangka menyempurnakan statistik penghitungan dan pencatatan WR di dalam Neraca Pembayaran Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai TKI di Jawa Tengah dan *worker's remittance* yang dihasilkannya, Kantor Bank Indonesia telah menyelenggarakan survei pola remitansi TKI 2008. Survei dilakukan terhadap TKI, TKI purna dan keluarga TKI penerima remitansi. Jumlah responden sebanyak 514 orang dengan komposisi figur responden sebagai berikut:



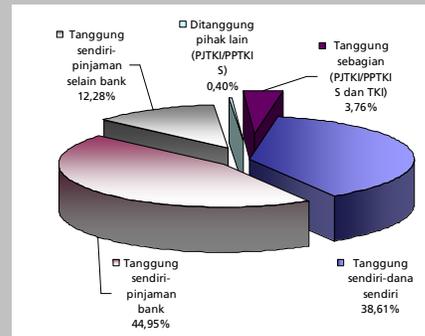
Mayoritas responden (40,27%) tidak bekerja sebelum menjadi TKI, sedangkan sebanyak 59,73% responden telah memiliki pekerjaan sebelumnya. Menjadi TKI merupakan salah satu alternatif lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia yang belum bekerja. Disamping itu, dengan penghasilan mayoritas responden (47%) yang berada pada kisaran Rp250 ribu s.d. Rp750 ribu dibandingkan dengan penghasilan

TKI yang mayoritas (63,64%) berada pada kisaran Rp750 ribu s.d. Rp3 juta menjadikan TKI sebagai tujuan untuk meningkatkan penghasilan/kesejahteraannya bagi yang sudah bekerja.



Mayoritas responden (93,85%) berangkat melalui PJTKI/PPTKIS. Dengan permasalahan yang dihadapi antara lain: terlalu lama berada di penampungan, keberangkatan yang tertunda, kepengurusan visa terlalu lama, kekurangan uang saku, banyak calo di bandara, dan biaya mahal.

Sebagian besar responden berangkat dengan biaya sendiri, dengan rincian melalui pinjaman bank (44,95%), pinjaman bukan bank (12,28%) dan dana sendiri (38,61%). Sementara itu, beberapa responden berangkat atas biaya sendiri dan sebagian lain dibayarkan oleh PJTKI (3,76%), dan hanya sebagian kecil responden (0,40%) yang berangkat atas tanggungan penuh pihak lain (PJTKI/PPTKIS).



Embarkasi keberangkatan responden TKI Jawa Tengah mayoritas melalui embarkasi Soekarno-Hatta Jakarta (67,25%). Adapun yang melalui embarkasi Ahmad Yani Semarang, Adi Sucipto Yogyakarta, dan Adi Sumarmo Solo berturut-turut sebanyak 8,38%, 6,82%, dan 5,07%. Negara tujuan mayoritas responden adalah Malaysia (43,38%) dan Singapura (13,61%).

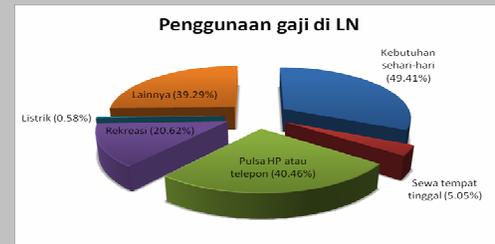
Bidang pekerjaan responden TKI mayoritas (62,35%) masih berada di sektor informal (a.l.: PRT, pengasuh anak, perawat orang jompo, dan pengemudi).

Tingkat Pendidikan	Pekerjaan TKI											
	PRT	Pngsh anak	Perawat Org Jompo	Penge mudi	Pekerja pertanian	Pekerja Pabrik	Pekerja toko, resto,	Pekerja konstruksi	Awak kapal	Perawat	Tidak jelas	Active Margin
SD	22,75	0,39	1,18	0,20	1,57	1,57	0,98	0,78	0,00	0,00	0,00	29,41
SMP	24,31	1,37	1,76	0,00	1,18	4,31	0,59	0,98	0,20	0,39	1,18	36,27
SMA	8,82	0,59	0,59	0,20	0,98	14,71	1,57	2,16	0,20	0,59	0,20	30,59
Diploma	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,76	0,20	0,59	0,00	0,20	0,00	2,94
Sarjana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,78
Active Margin	55,88	2,35	3,73	0,39	3,73	22,55	3,33	5,10	0,39	1,18	1,37	100,00

Dengan pendidikan mayoritas responden adalah SMP, bidang pekerjaan yang dapat mereka penuhi adalah pembantu rumah tangga (55,88%) dengan tingkat penghasilan berada pada kisaran Rp750 ribu s.d. Rp3 juta.

Jenis Pekerjaan TKI	Gaji per Bulan					Active Margin
	Rp750 rb-Rp3 juta	Rp3-5 juta	Rp5-7,5 juta	Rp7,5-10 juta	Rp10-12 juta	
Pembantu RT	45,58	9,63	0,59	0	0	55,80
Pengasuh anak	1,38	0,98	0,00	0	0	2,36
Perawat Org Jompo	0,79	2,36	0,59	0	0	3,73
Pengemudi	0,39	0	0	0	0	0,39
Pekerja pertanian	3,73	0	0	0	0	3,73
Pekerja Pabrik	12,18	2,95	3,54	2,36	1,77	22,79
Pekerja toko, resto,	2,95	0,20	0,20	0	0	3,34
Pekerja konstruksi	3,54	0,98	0,20	0,20	0	4,91
Awak kapal penangkap	0	0,39	0	0	0	0,39
Perawat	0,39	0,59	0,20	0	0	1,18
Lainnya	0,98	0,20	0,20	0	0	1,38
Total	71,91	18,27	5,50	2,55	1,77	100,00

Penghasilan yang diperoleh responden TKI sebagian besar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari 49,41% dan pembelian pulsa HP/telepon (40,46%). Pengeluaran yang dilakukan responden mayoritas (88,24%) berada pada kisaran < Rp1,5 juta sebulan.



Gaji per Bulan range	Belanja per Bulan					Active Margin
	<Rp 1,5 juta	Rp 1,5 juta - Rp 3,0 juta	Rp 3,0 juta - Rp 4,5 juta	Rp 4,5 juta - Rp 6,0 juta	Rp 6,0 juta - Rp 7,5 juta	
Rp750 rb - Rp3,0 juta	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
Rp3,0 juta - Rp5,0 juta	20,32	2,67	0,27	0,00	0,00	23,26
Rp5,0 juta - Rp7,5 juta	3,21	4,01	0,00	0,00	0,00	7,22
Rp7,5 juta - Rp10,0 juta	0,80	1,60	1,07	0,00	0,00	3,48
Rp10,0 juta - Rp12,0 juta	0,27	1,34	0,27	0,27	0,27	2,41
Active Margin	88,24	9,63	1,60	0,27	0,27	100,00



Terkait dengan remitansi, mayoritas responden (52,14%) mengirim uang tidak secara rutin, dan sebanyak 38,91% mengirim uang secara rutin. Pengiriman dilakukan mayoritas responden (60,70%) sebanyak sekali dalam setahun terutama menjelang lebaran.

Moda pengiriman uang sebagian besar masih melalui bank meski dengan beberapa kendala yang dihadapi antara lain: lebih rumit, lebih mahal (biaya transfer dan selisih kurs), dan jauh dari lokasi kerja. Waktu pengiriman antara 1 – 3 hari.

Meskipun demikian, moda pengiriman uang juga semakin berkembang. Selain bank, responden juga melakukan pengiriman melalui perusahaan pengiriman uang, money changer, agen/toko yang menyediakan jasa pengiriman uang dengan berbagai bonus/hadiah, atau menggunakan jasa penitipan teman yang akan kembali ke Indonesia. Hal yang menjadi pertimbangannya adalah prosedur yang sederhana, murah, cepat sampai, dan mudah dijangkau/lebih dekat dengan lokasi kerja, serta selisih kurs.

Besarnya kiriman uang yang dilakukan mayoritas responden (82,58%) adalah sebesar Rp1 juta s.d. Rp15 juta per tahun yang terutama dilakukan oleh responden berpenghasilan Rp750 ribu s.d. Rp3 juta.

Gaji per Bulan range	Total kiriman setahun						Active
	<Rp 1 juta	Rp 1 juta - Rp15 juta	Rp 15 juta - Rp 30 juta	Rp 30 juta - Rp 45 juta	Rp 45 juta - Rp 60 juta	> Rp 60 juta	Margin
Rp750 rb - Rp3,0 juta	2,25	62,91	6,15	0,00	0,00	0,00	71,31
Rp3,0 juta - Rp5,0 juta	0,61	13,11	3,48	1,23	0,20	0,00	18,65
Rp5,0 juta - Rp7,5 juta	0,41	3,28	0,61	1,02	0,20	0,00	5,53
Rp7,5 juta - Rp10,0 juta	0,00	1,84	0,20	0,41	0,00	0,20	2,66
Rp10,0 juta - Rp12,0 juta	0,00	1,43	0,00	0,20	0,20	0,00	1,84
Active Margin	3,28	82,58	10,45	2,87	0,61	0,20	100,00

Faktor yang berperan besar dalam Kiriman Uang Rutin adalah Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan. Responden wanita mengirimkan uang lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup laki-laki di luar negeri cukup tinggi. Sedangkan wanita mempunyai biaya hidup lebih rendah karena sebagian besar wanita bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang tinggal bersama pemberi kerja (majikan). Ongkos kirim tidak berpengaruh pada kiriman uang rutin.

Faktor yang berperan dalam kiriman uang tidak rutin adalah Tabungan, Gaji per Bulan dan Belanja per Bulan. Kiriman uang tidak rutin akan mengurangi jumlah tabungan karena pada umumnya TKI mengumpulkan uang dalam tabungan terlebih dahulu sampai jumlahnya cukup untuk dikirimkan ke Indonesia.

Kiriman uang yang diterima oleh penerima (keluarga) di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk tabungan (19,41%), biaya hidup sehari-hari (17,51%), membangun/memperbaiki rumah (16,34%), modal berdagang (14,39%), usaha rumah tangga (6,03%), dan biaya sekolah (5,83%).

Dengan menjadi TKI, responden merasakan tingkat kehidupan khususnya yang menyangkut ekonomi menjadi lebih baik (77,24%), sedangkan sebanyak 14,79% responden merasakan kehidupannya relatif tetap/sama. Adapun sebanyak 7,98% responden merasakan tingkat hidupnya malah mengalami penurunan.

Hasil Focus Group Discussion

Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi dengan pihak-pihak terkait penempatan TKI adalah sebagai berikut:

A. Aspek Perlindungan TKI

- Salah satu ketentuan dalam UU Perlindungan TKI adalah penempatan TKI akan dilakukan di negara yang sudah menerapkan UU Ketenagakerjaan. Masalahnya, untuk negara seperti Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah yang merupakan negara tujuan sebagian besar TKI belum menerapkan UU tersebut. Untuk mengatasi hal itu, penempatan TKI lebih difokuskan pada perjanjian G to G sehingga apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara bilateral. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penempatan TKI atas dasar perjanjian G to G ini pun banyak menemui kendala. (contoh kasus TKI di Malaysia).
- Tahapan yang harus dilalui calon TKI dalam rangka lebih memperoleh aspek perlindungan hukum cukup banyak (13 tahapan) sehingga sering tidak menjadi perhatian utama TKI.
- Keterampilan bahasa sangat diperlukan dan sangat menentukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TKI. Sebagian kasus konflik terjadi karena masalah bahasa/komunikasi.
- Monitor terhadap TKI yang berasal dari daerah sulit dilakukan jika TKI daerah berangkat melalui Jakarta.
- Satuan tugas TKI di suatu negara berkewajiban memberikan informasi kepada TKI pihak yang harus dihubungi apabila ada masalah yang dihadapi sehingga dapat segera dimonitor dan ditindaklanjuti.
- Visa kerja bisa diperoleh TKI (formal dan informal) melalui agen di negara penempatan TKI. Perbedaan persepsi mengenai kriteria legal atau tidak legal ini dapat saja berbeda antara di Indonesia dan negara penempatan. Hal ini menimbulkan kerawanan dalam memberikan perlindungan kepada TKI karena keberadaannya menjadi tidak bisa dimonitor (jika perolehan visa tidak melalui jalur resmi).
- Proses pemberangkatan sampai dengan kepulangan TKI melibatkan banyak hal dan banyak pihak terkait sehingga terjadi ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas aspek perlindungan TKI.

B. Aspek Administrasi TKI

- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang berlaku sejak Maret 2008 memberikan kenyamanan bagi TKI. Perolehannya melalui prosedur khusus, dan dengan KTKLN, TKI tidak perlu membayar fiskal dan tidak memerlukan rekomendasi.
- Pembekalan pelatihan baik yang dilakukan oleh PJTKI maupun melalui BLK dan keharusan memiliki sertifikasi keahlian sebelum berangkat diharapkan dapat memenuhi kualifikasi yang diminta pemberi kerja. Infrastruktur BLK yang memadai akan sangat menunjang pemenuhan kualifikasi TKI.
- Biaya keberangkatan oleh sebagian besar TKI dianggap mahal sehingga diharapkan ada dana talangan dari pemerintah daerah (baik melalui APBD atau kerja sama dengan perbankan daerah) dengan bunga rendah untuk pembiayaan penempatan TKI tersebut. Saat ini PJTKI harus menunggu rata-rata sampai dengan 11 bulan untuk pengembalian dana dalam rangka penempatan TKI yang berasal dari pemotongan gaji.
- Pengiriman uang TKI selain melalui bank, sebagian juga dilakukan melalui broker dengan pertimbangan biaya dan selisih kurs yang relatif lebih murah dari bank. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang mendukung penciptaan sistem pengiriman uang TKI yang relatif cepat, murah, dan mudah.
- Perolehan data remitansi bagi BP3TKI memerlukan kerjasama dengan Bank Indonesia, khususnya kewajiban perbankan untuk menyampaikan data penerimaan remitansi kepada BP3TKI secara lengkap, akurat, dan kontinyu. Kewajiban TKI untuk membuka rekening pada perbankan domestik menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh data remitansi yang akurat.

C. Aspek Pembinaan TKI Purna

- Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kegiatan usaha para TKI Purna (seperti alumni Kensushei) yang memiliki potensi modal, telah dilakukan upaya membina kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi terkait seperti KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Berbagai pelatihan seperti kewirausahaan, manajemen keuangan serta akses perbankan akan sangat membantu pengembangan usaha TKI Purna.
- Pembentukan koperasi oleh TKI Purna seperti di Wonosobo baik untuk membantu membuka usaha bagi sesama mantan TKI maupun untuk pembiayaan keberangkatan calon TKI dirasakan sangat membantu kebutuhan

modal mantan TKI. Keterbatasan dana yang dikumpulkan oleh para anggota koperasi menyebabkan perkembangan koperasi belum optimal. Skala keanggotaan koperasi yang diperluas tidak saja hanya meliputi satu desa namun dikordinir oleh dinas tenaga kerja/dinas koperasi kabupaten/kota dapat dijadikan salah satu alternatif ke depan.

Bab 6

Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kondisi perekonomian di Jawa Tengah diukur dari perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

6.1 Ketenagakerjaan

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 menunjukkan perkembangan yang positif. **Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2008** yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dari 24,4 juta penduduk usia kerja di wilayah Jawa Tengah, 16,69 juta jiwa digolongkan sebagai angkatan kerja dan 7,72 juta jiwa tidak termasuk angkatan kerja. Yang dimaksudkan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas.

TABEL 6.1
PENDUDUK USIA KERJA DI JAWA TENGAH MENURUT KEGIATANNYA

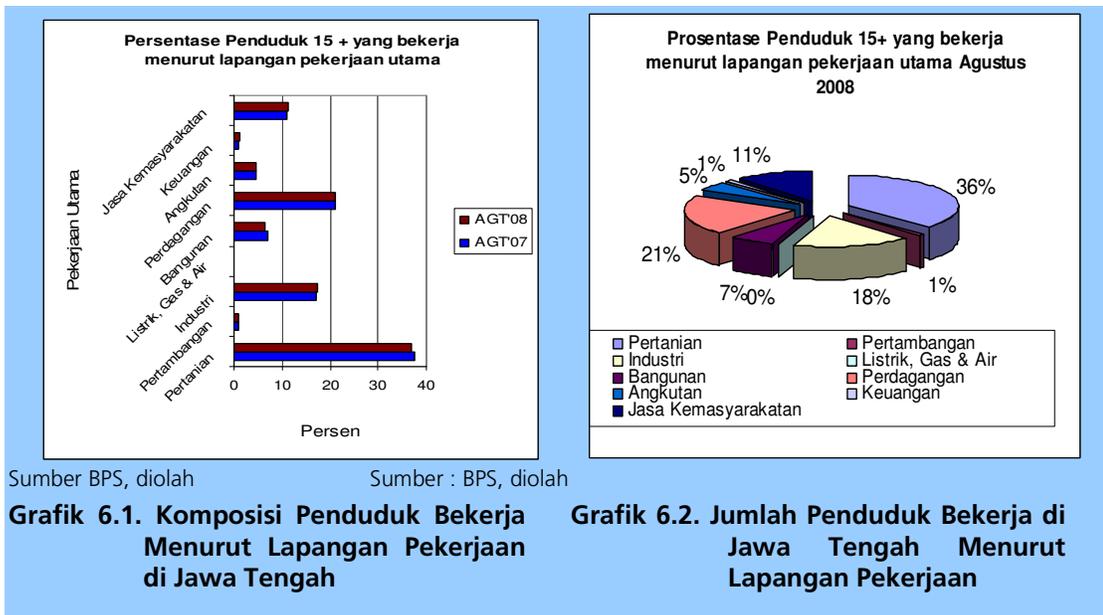
	2006	2007	2008**
Angkatan Kerja	17,350,112	17,737,595	16,690,966
Bekerja	15,927,856	16,300,707	15,463,658
Pengangguran	1,422,256	1,436,888	1,227,308
Bukan Angkatan Kerja	7,051,286	7,167,210	7,720,635
Sekolah	2,039,041	2,086,347	1,867,882
Mengurus RT	3,483,424	3,715,485	4,328,235
Lainnya	1,528,821	1,365,378	1,524,518
Total Penduduk di atas usia 15 th	24,401,398	24,904,805	24,411,601
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.10%	71.22%	68.37%
Tingkat Pengangguran Terbuka	8.20%	8.10%	7.35%

Sumber : BPS, diolah

Dari data tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja atau ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja adalah sebesar 68,37%. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2006 dan tahun 2007. Hal tersebut diperkirakan terbatasnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Sementara itu tingkat pengangguran terbuka atau angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran yang masuk kategori angkatan kerja tercatat sebesar 7,35% atau sejumlah 1,227 juta jiwa. Besarnya tingkat pengangguran terbuka apabila ditinjau dari jumlah dan prosentase posisi tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif (penurunan prosentase pengangguran). Penurunan tingkat pengangguran tersebut diduga banyaknya tenaga kerja yang beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor informal seiring dengan datangnya musim kemarau. Hal tersebut tercermin dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) triwulan IV-2008, indeks saldo bersih tertimbang (SBT) pada sektor bangunan tumbuh sebesar 0,94 dan sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 0,29.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebesar 36,8% penduduk bekerja di Jawa Tengah. Namun demikian, jumlah pekerja di sektor pertanian selama 2 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Secara persentase daya serap sektor pertanian pada Agustus 2008 menurun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2007 (Grafik 6.1). Penurunan pekerja di sektor ini kemungkinan disebabkan lahan pertanian yang semakin berkurang akibat pengalihan lahan pertanian untuk perumahan dan prasarana umum.



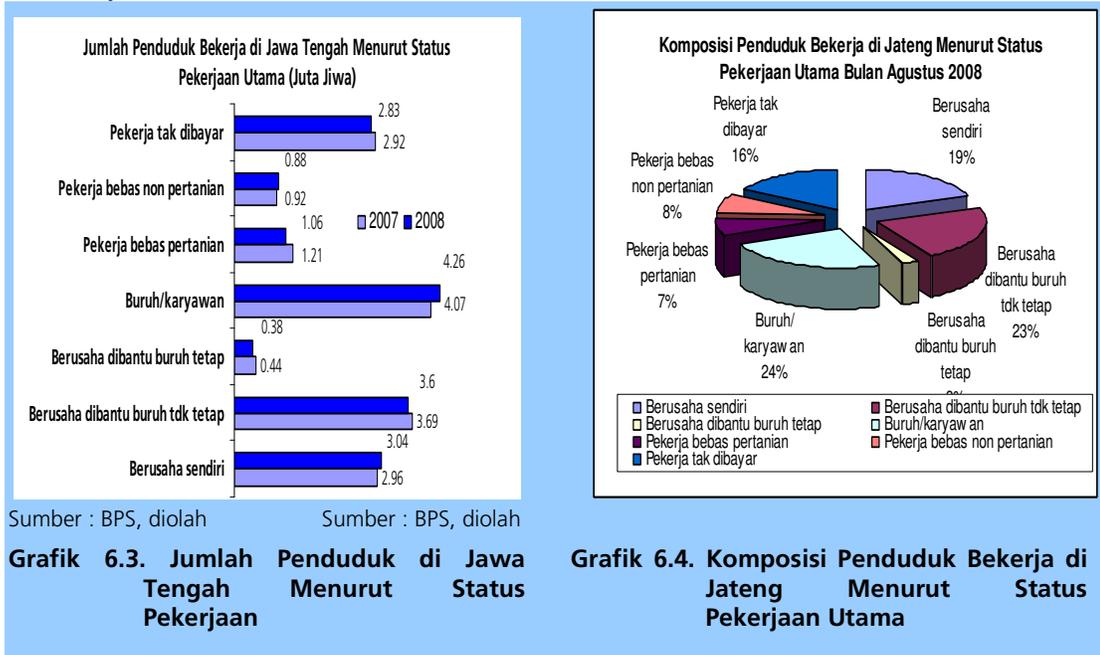
Sektor ekonomi lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 21,0%. Penyerapan tenaga kerja pada Sektor

perdagangan karena cirinya yang informal sehingga memudahkan orang untuk beralih profesi untuk mencari penghasilan atau pendapatan.

Sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,5% atau tumbuh 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan disebabkan beberapa industri manufaktur yang berbasis ekspor di Jawa Tengah mengurangi jumlah produksinya terkait berkurangnya jumlah pesanan komoditas ekspor ke Amerika dan Eropa sebagai akibat krisis keuangan global.

Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan menyerap tenaga kerja sebesar 11,4% atau naik sebesar 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2007. Jumlah penduduk bekerja di Jawa Tengah selama Agustus 2007 hingga Agustus 2008 terutama didorong oleh penyerapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut.

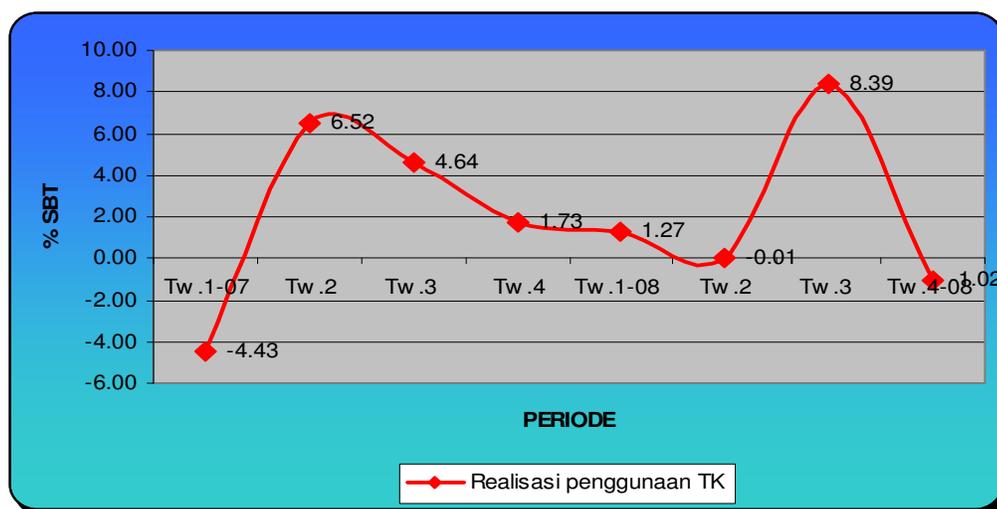
Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja di Jawa Tengah berstatus sebagai buruh/karyawan (24,4%), status berusaha sendiri (19,1%), dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (22,6%) (Grafik 6.2). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja di Jawa Tengah bekerja pada sektor informal (dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal meliputi kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan). Hal tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa mayoritas pekerja di Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, yang pada umumnya masih bersifat informal.



Tingginya pekerja di sektor informal di Jawa Tengah juga sejalan dengan besarnya persentase kelompok pekerja tak dibayar, yaitu sebesar 16.4% atau sekitar 2.5 juta jiwa (Gambar 6.2). Mereka yang masuk pada kelompok pekerja tidak dibayar tersebut pada umumnya membantu usaha yang dilakukan oleh keluarga mereka atau dengan tingkat produktivitas yang rendah dan tidak mendapatkan gaji/upah yang memadai. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja di Jawa Tengah masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan bahwa pada triwulan IV-2008 telah terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Hasil survei yang dilakukan KBI Semarang, mengindikasikan bahwa pada beberapa sektor telah terjadi penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja diantaranya adalah di sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

GRAFIK 6.5
PERKEMBANGAN REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH



Sumber : Surevi SKDU KBI. Semarang

6.2. Tingkat Kemiskinan

6.2.1. Kemiskinan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 6,19 juta orang, mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar -

5,6% apabila dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2007 yang tercatat sejumlah 6,56 juta orang. Namun demikian pada periode triwulan IV-2008 diperkirakan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sedikit meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa perusahaan manufaktur yang berbasis ekspor merumahkan pegawainya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data dari Dinakertransduk Jateng per 31 Desember 2008, terdapat kasus PHK sebesar 4.207 orang dari 27 perusahaan di 14 Kabupaten/Kota. Selain melakukan PHK pegawai, terdapat pula perusahaan yang merumahkan pegawainya, yaitu sebesar 5.311 orang pegawai dari 15 perusahaan. Selain alasan efisiensi dan kebangkrutan perusahaan, menurunnya permintaan pasar baik pasar domestik maupun pasar ekspor disinyalir sebagai salah satu alasan pengurangan pegawai.

Krisis keuangan global yang telah mulai dirasakan dampaknya telah menyebabkan target penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan terhambat. Di tingkat nasional, tingkat kemiskinan yang semula ditargetkan 11,5% di awal 2010, diperkirakan meningkat menjadi 13,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 8,3% sampai 8,9%, berada di atas target sebesar 7,4%.

Dalam menyusun APBN 2009, pemerintah mengalokasikan berbagai anggaran yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program tersebut antara lain :

1. Peningkatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
 - Anggaran pendidikan Rp 207,4 triliun
 - Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 7,2 triliun
 - Bantuan Tunai Bersyarat Rp 1,75 triliun
 - BLT untuk 2 bulan Rp 3,7 triliun.
2. Peningkatan subsidi pertanian menjadi Rp 33,4 triliun dari Rp 27,9 triliun. Subsidi pertanian untuk pangan Rp 12,9 triliun, pupuk Rp 17,1 triliun, benih Rp 1,4 triliun dan KUR Rp 1,4 triliun.
3. Peningkatan subsidi perumahan menjadi Rp 1,8 triliun dari Rp 800 miliar.

Selain itu, dalam menyikapi krisis ekonomi global, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan stimulan yang dialokasikan pada departemen/ dinas terkait di level regional. Berdasarkan informasi dari Disnakertransduk Jawa Tengah telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 64 miliar dari pemerintah pusat untuk program padat karya produktif. Anggaran tersebut akan disalurkan pada 15 kabupaten/kota dan mekanisme penggunaannya diserahkan pada masing-masing daerah.

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2009 yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat antara lain pembangunan prasarana fisik jalan berupa pembuatan jalan tol Semarang-Solo yang dimulai pada awal tahun 2009 sepanjang 3,525 km yang diperkirakan akan menelan biaya kurang lebih Rp 411 miliar. Pembangunannya direncanakan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, dan proyek pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Sementara itu, investasi dari Proyek PT. Semen Gresik untuk mendirikan pabrik di Sukolilo, Pati senilai lebih kurang Rp 4 triliun, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja kesejahteraan masyarakat setempat jika dapat direalisasikan pada tahun 2009 ini.

6.2.2. Kesejahteraan Petani

Kondisi kesejahteraan petani di Jawa Tengah pada triwulan IV-2008 mengalami penurunan dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator dari kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil survei BPS Jawa Tengah terhadap perkembangan harga-harga di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, NTP bulan November 2008 tercatat sebesar 101,65 atau turun 1,62% dibandingkan angka NTP pada bulan September 2008 sebesar 102,27 (Tabel 6.1). Menurunnya kondisi kesejahteraan petani pada triwulan IV-2008 disebabkan telah berlalunya musim panen raya yang berlangsung bulan September 2008. Selain itu, awal musim tanam petani yang telah dimulai pada triwulan IV-2008 terkendala oleh kelangkaan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga murah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saprodi, petani membeli pupuk pada pengecer dengan harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Kesejahteraan petani di Jawa Tengah apabila ditinjau per sub sektor ekonomi mengalami penurunan hampir pada semua sub sektor, kecuali sub sektor peternakan, perikanan dan tanaman perkebunan yang kesejahteraannya meningkat. Penurunan kesejahteraan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura disebabkan meningkatnya harga kebutuhan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan, sedangkan harga jual hasil pertanian rendah, sehingga petani mengalami kerugian.

**TABEL 6.2. NILAI TUKAR PETANI DI JAWA TENGAH
BULAN SEPTEMBER DAN NOVEMBER 2008**

NO.	SEKTOR, KELOMPOK & SUB KELOMPOK	SEP 08	NOV 08	PERTUMB. (%)
1	Indeks harga yang diterima petani	116.49	116.25	(0.21)
2	Indeks harga yang dibayar petani	113.90	114.36	0.40
	2.1 Konsumsi rumah tangga	114.96	115.12	0.14
	- Bahan makanan	117.35	115.86	(1.27)
	- Makanan jadi	110.55	112.90	2.13
	- Perumahan	117.44	118.94	1.28
	- Sandang	111.38	112.10	0.65
	- Kesehatan	109.71	110.51	0.73
	- Pendidikan, rekreasi & Olah raga	111.01	111.99	0.88
	- Transportasi & komunikasi	116.01	117.54	1.32
	2.2 Biaya produksi & Penambahan barang modal	110.31	111.69	1.25
	- Bibit	107.73	108.37	0.59
	- Obat-obatan & pupuk	109.21	111.48	2.08
	- Sewa lahan, pajak & lainnya	113.87	114.40	0.47
	- Transportasi	119.77	120.60	0.69
	- Penambahan barang modal	110.63	112.06	1.29
	- Upah buruh tani	107.92	108.71	0.73
3	Nilai tukar petani (NTP)	102.27	101.65	(0.61)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Sementara itu, membaiknya kesejahteraan petani di sub sektor peternakan disebabkan adanya kebutuhan daging yang meningkat seiring dengan perayaan hari Raya Qurban dan banyaknya masyarakat yang melaksanakan hajatan serta perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah bahwa kebutuhan susu sapi dari Industri Pengolahan Susu di Jawa Timur untuk bahan baku *susu full cream milk* cukup besar, pemenuhan bahan baku tersebut yang semula dilakukan melalui impor sejak tahun 2007 dapat dipenuhi dari peternak sapi lokal di Jawa Tengah, sehingga kesejahteraan petani sapi perah meningkat. (Tabel 6.2).

**TABEL 6.3.
NILAI TUKAR PETANI PER SUB SEKTOR DI JAWA TENGAH
BULAN SEPTEMBER DAN NOVEMBER 2008**

No	Sub Sektor	Sep 08	Nov 08	%
1	Tanaman Pangan (Padi Palawija)	116.49	113.50	(2.57)
2	Hortikultura	105.43	103.73	(1.61)
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	142.46	143.71	0.88
4	Peternakan	125.43	130.65	4.16
5	Perikanan	118.33	120.16	1.55
6	Indeks yang diterima petani	116.49	116.25	(0.21)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menggerakkan perekonomian di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah mencanangkan program “Bali Ndeso Mbangun Deso” untuk tahun 2008 sd 2013. Program tersebut antara lain menitikberatkan pada pengembangan di sektor pertanian dalam arti luas, koperasi dan UKM serta pelayanan dasar masyarakat. (lihat **Box**).

BOKS

IMPLEMENTASI PROGRAM “BALI NDESO MBANGUN DESO”

Provinsi Jawa Tengah kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, sumber daya tersebut belum sepenuhnya dikelola dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut antara lain terlihat dari masih banyaknya penduduk miskin, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan gerakan **“Bali Ndeso Mbangun Deso”** yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal.

Misi program *“Bali Ndeso Mbangun Deso”* yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Tengah Yang semakin Sejahtera. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Gerakan *“Bali Ndeso Mbangun Deso”* yang diarahkan untuk :

1. Menitikberatkan orientasi pembangunan ke pedesaan yang bersifat menyeluruh, terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, alam, lingkungan, sosial, politik dan kewilayahan.
2. Mendorong segenap potensi masyarakat Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, teknologi informasi untuk ditularkan kepada masyarakat pedesaan. Demikian pula bagi mereka yang memiliki kekayaan atau modal yang besar dapat memberikan bantuan modal usaha atau bertindak sebagai bapak angkat guna melindungi, memasarkan dan mengembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat pedesaan.

Implementasi gerakan *“Bali Ndeso Mbangun Deso”* ditujukan untuk mencapai visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu : Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, yang ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur;
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan Sapta Usaha Tani, pemberdayaan UMKM dan industri padat karya;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) tahapan pembangunan, yaitu :

1. Tahap konsolidasi dan persiapan (2008-2009) meliputi :
 - a. Penyusunan konsep "*Bali Ndeso Mbangun Deso*"
 - b. Penyusunan prioritas pembangunan yang mencakup : Pertanian dalam arti luas, koperasi dan UMKM dan pelayanan dasar masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, maka prioritas Bidang Pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya didukung berbagai bidang lainnya.
 - c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 dilanjutkan dengan penjabaran dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Tahapan Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya Secara Lestari, dan Pelayanan Prima dalam E-government
3. Tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi.

Sedangkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan serta kehutanan.
2. Bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pembangunan bidang koperasi dan UMKM.
3. Bidang pelayanan dasar masyarakat, serta berbagai bidang lainnya, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketiga prioritas pembangunan tersebut yaitu (1) pariwisata; (2) ketenagakerjaan; (3) Sosial; (4) pemberdayaan masyarakat dan desa; (5) perumahan rakyat; (6) pertanahan; (7) lingkungan dan energi; (8) pemerintahan; (9) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (10) penataa ruang; (11) perencanaan pembangunan; (12) penanaman modal; (13) perdagangan; (14) kesatuan bangsa; (15) kepemudaan dan olah raga (16) kebudayaan.

Dalam upaya mensukseskan sasaran strategis dari gerakan "*Bali Ndeso Mbangun Deso*" tersebut peranan perbankan dan pihak lainnya sangat diharapkan agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat Jawa Tengah.

Sumber : Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada acara Pertemuan Tahunan Perbankan 2009 di KBI Semarang

Bab 7

Prospek Perekonomian

7.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2008, yaitu dalam kisaran 4,8-5,3%. Perlambatan pertumbuhan tahun 2009 tersebut terutama masih dipengaruhi oleh melambatnya kegiatan ekspor ke luar negeri, disebabkan lesunya permintaan dari negara AS dan Eropa seiring dengan masih terjadinya krisis keuangan global. Investasi swasta diperkirakan juga mengalami perlambatan, karena sikap investor yang masih berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha. Adapun investasi pemerintah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan direalisasikan berbagai proyek infrastruktur seperti Jalan Tol Semarang-Solo, dan pelaksanaan program stimulus bagi sektor riil di Jawa Tengah.

Sementara itu, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Peningkatan konsumsi masyarakat tahun 2009 didorong oleh adanya pesta pemilu pada bulan April 2009, yang sedikit banyak akan meningkatkan pengeluaran masyarakat dalam hal sandang, makanan, transportasi dan perhotelan. Selain itu, pengeluaran biaya pendidikan di pertengahan tahun juga diharapkan menjadi pendorong konsumsi masyarakat.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2009 diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 4,0% - 5,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan triwulan I-2009 tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan kegiatan ekspor. Investasi melambat sejalan dengan permintaan internasional dan domestik yang melemah. Kegiatan ekspor yang melambat dipengaruhi oleh permintaan pasar dunia yang melemah. Indikasi dari perlambatan kedua kegiatan ekonomi tersebut adalah telah dilakukannya PHK ataupun dirumahkannya sebagian karyawan di beberapa perusahaan yang berorientasi ekspor.

Faktor pendorong pertumbuhan triwulan I-2009 diperkirakan adalah konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Konsumsi masyarakat diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan daya beli yang sedikit meningkat, pasca penurunan harga BBM pada Desember 2008 dan awal Januari 2009. Meskipun penurunan tarif angkutan di Jawa Tengah rata-rata hanya sekitar 7%, namun penurunan harga BBM tersebut mampu menahan penurunan daya beli masyarakat setelah harga beberapa barang kebutuhan pokok mengalami penurunan harga. Hal itu, terlihat dari deflasi

yang terjadi pada Desember 2008 dan Januari 2009. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan masih minimnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada di triwulan I.

7.1.1. Sektoral

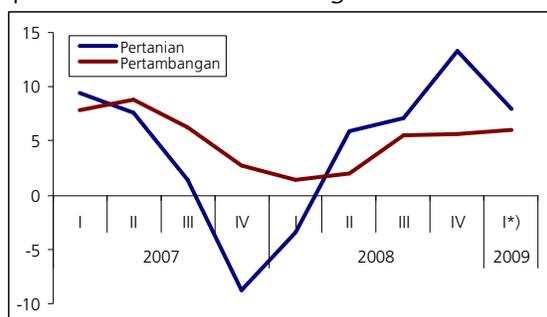
Perlambatan pertumbuhan permintaan domestik terutama dipengaruhi oleh daya beli yang melemah dan ekspektasi kondisi perekonomian yang masih pesimis. Di sisi eksternal, krisis keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia diperkirakan cukup berdampak pada ekspor Jawa Tengah, khususnya ekspor TPT (tekstil dan produk tekstil) dan mebel.

Kajian sektoral ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (a) sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan, (b) sektor sekunder mencakup sektor industri, sektor listrik dan sektor bangunan, serta (c) sektor tersier yang terdiri dari sektor PHR, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa.

a. Sektor Primer

Sektor pertanian diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang meningkat pada triwulan I-2009 mengingat pada periode tersebut pada sebagian kecil daerah akan melakukan panen raya pada bulan Maret. Sebagian besar daerah melakukan panen raya pada bulan April-Mei. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh dalam kisaran 6%-8% (yoy)

Adapun **sektor pertambangan** diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang sedikit meningkat pada triwulan mendatang disebabkan oleh naiknya permintaan barang tambang dan galian, khususnya pasir, seiring dengan naiknya daya beli sebagian masyarakat yang menyebabkan kembali terjadi peningkatan pembangunan properti residensial. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh pelaksanaan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan tol Semarang-Solo serta perbaikan jalan raya dan jembatan yang rusak di beberapa daerah. Sektor pertambangan diperkirakan tumbuh 5%-6%.

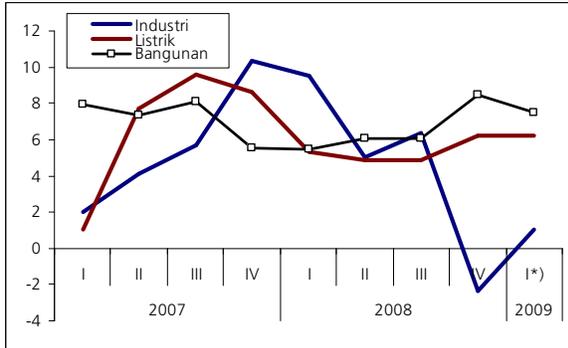


b. Sektor Sekunder

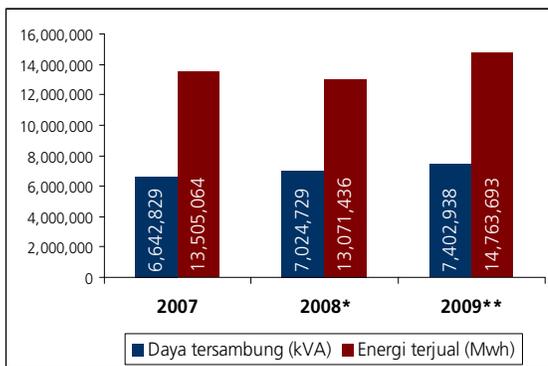
Pertumbuhan sektor industri akan didorong oleh peningkatan produksi sub sektor industri migas yang diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi di triwulan mendatang dibandingkan triwulan laporan. Adapun sub sektor industri non migas diperkirakan akan sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan sub sektor industri terutama disebabkan oleh turunnya produksi TPT dan produk kayu, khususnya yang memiliki pasar ekspor

di AS dan Eropa. Adapun industri non migas lain seperti industri makanan dan minuman, rokok, elektronik dan industri kerajinan diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, sektor industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh di kisaran 1%-2%, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan laporan yang mengalami kontraksi sebesar -2,37% (yoy).



Sektor bangunan diperkirakan tumbuh melambat (6%-7%), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya sebesar 8,44%. Perkiraan perlambatan tersebut terjadi seiring dengan masih belum banyaknya proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah, karena masih awal tahun. Namun demikian,



perlambatan agak tertahan oleh peningkatan pembangunan properti residensial sejalan dengan turunnya suku bunga BI rate dan turunnya beberapa komoditas bahan bangunan seiring dengan turunnya harga komoditas internasional. **Sektor listrik** diperkirakan tumbuh relatif tetap dalam kisaran 5,5%-6,5%, sejalan dengan meningkatnya penggunaan listrik oleh

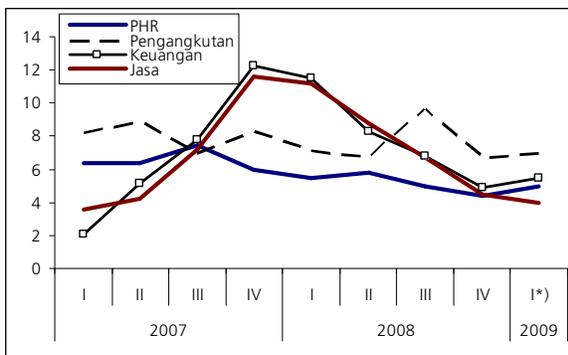
perusahaan di sektor perdagangan, hotel & restoran, serta industri. Selain itu, bertambahnya jumlah pelanggan rumah tangga yang menjadi target PLN juga ikut meningkatkan nilai tambah sektor listrik.

b. Sektor Tersier

Sektor PHR diperkirakan akan tumbuh sedikit meningkat pada triwulan mendatang (dalam kisaran 5%-5,5%). Sektor ini masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, karena kontribusinya terhadap PDRB sekitar 23%. Peningkatan konsumsi masyarakat pada triwulan ini terjadi

pada akhir Januari 2009 terkait dengan perayaan tahun baru imlek, serta mulai meningkatkan belanja partai politik, calon legislatif dan calon presiden menjelang pelaksanaan Pemilu pada bulan April 2009. Di samping itu, adanya beberapa kali

long weekend pada bulan Januari dan Maret 2009 ikut mendorong volume perdagangan, hotel dan restoran. Dengan maraknya kegiatan masyarakat pada triwulan I-2009 tersebut, pertumbuhan **sektor jasa-jasa** khususnya subsektor jasa swasta diperkirakan akan meningkat. Namun, subsektor jasa pemerintahan diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan belum banyaknya proyek yang dilakukan oleh pemerintah karena pada triwulan I masih dalam tahap persiapan. Dengan berdasarkan perkiraan tersebut, pertumbuhan sektor jasa-jasa triwulan mendapat diproyeksikan melambat dalam kisaran 4-5%.



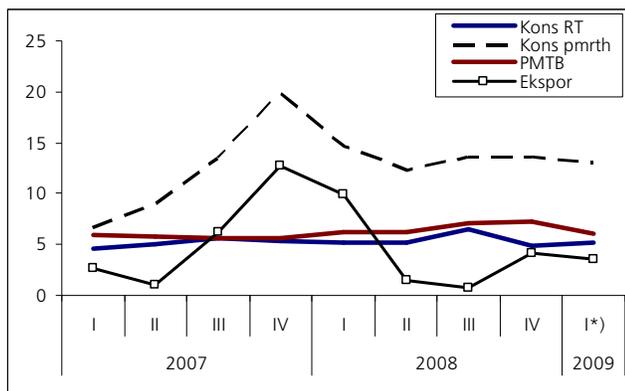
Sementara itu, pertumbuhan **sektor pengangkutan** diperkirakan akan relatif sama dengan triwulan sebelumnya dalam kisaran 6-7%. Hal tersebut disebabkan oleh masih berlanjutnya penurunan aktivitas sektor industri serta kegiatan ekspor-impor di pelabuhan, sebagai salah satu dampak krisis keuangan global. Namun, penurunan harga BBM di bulan Januari 2009 diperkirakan akan memberikan dampak positif berupa naiknya nilai tambah ekonomi dalam sektor ini.

Sektor keuangan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan meskipun masih relatif lamban, disebabkan oleh mulai terjadinya peningkatan pembiayaan oleh sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya di triwulan mendatang. Sektor ini diperkirakan tumbuh sekitar 5-6%, lebih tinggi dari triwulan laporan sebesar 4,91%. Secara keseluruhan pertumbuhan sektor keuangan tahun 2009 diperkirakan akan tumbuh relatif tinggi. Hal ini terkait dengan target penyaluran kredit perbankan dalam kisaran 18-20%, sedangkan lembaga pembiayaan memasang target pertumbuhan sekitar 50-60%. Terdapat 2 faktor pendorong tingginya target pertumbuhan pembiayaan tersebut, yaitu penurunan harga BBM dan penurunan level BI Rate.

7.1.2. Sisi Penggunaan

Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan didorong oleh konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi pemerintah. Meskipun pertumbuhan **konsumsi RT** triwulan mendatang diperkirakan mengalami sedikit peningkatan, namun daya beli masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, berbagai kegiatan menjelang Pemilu di bulan April 2009, perayaan hari raya imlek pada Januari 2009 serta cukup banyaknya *long weekend* di bulan Januari dan Maret 2009 diperkirakan ikut mendorong konsumsi RT di triwulan I-2009. Konsumsi RT diproyeksikan tumbuh 5,0% - 5,5%, sedikit lebih tinggi dari triwulan IV-2008 sebesar 4,95%.

Sementara itu, pertumbuhan **konsumsi pemerintah** diperkirakan tumbuh moderat sejalan dengan masih minimnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada di triwulan I. Pengeluaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai dan biaya pemeliharaan masih bersifat rutin. Adapun untuk belanja modal dan belanja barang diperkirakan baru akan mengalami peningkatan signifikan pada triwulan III. Pendorong konsumsi pemerintah triwulan I-2009 diperkirakan juga berasal dari pengeluaran untuk persiapan penyelenggaraan pesta Pemilu 2009, yang mulai meningkat pada bulan Februari-Maret 2009. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah realisasi beberapa proyek infrastruktur seperti Jalan tol Semarang-Solo yang telah dimulai sejak Februari 2009. Konsumsi pemerintah triwulan I-2009 diprediksi berada dalam kisaran 12-13% (yoy), lebih rendah dari triwulan laporan sebesar 13,06%.



Kegiatan investasi pada triwulan I-2009 diperkirakan sedikit melambat, dengan laju pertumbuhan sekitar 5%-6%, sedikit turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,24%. Perlambatan ini terkait dengan kondisi perekonomian nasional dan internasional yang masih melemah, ekspektasi dunia usaha terhadap prospek perekonomian yang masih belum membaik, serta iklim investasi yang masih perlu perbaikan. Sementara itu, investasi pemerintah pada triwulan I-2009 diperkirakan akan mengalami perlambatan karena masih dalam tahap persiapan di awal tahun, meskipun beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah sudah mulai berjalan di triwulan I seperti pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan perbaikan beberapa jalan raya yang mengalami kerusakan akibat hujan dan banjir.

Aktivitas **ekspor** pada triwulan I-2009 diperkirakan akan tumbuh melambat yang dipengaruhi oleh permintaan dunia yang masih menurun, sementara itu pasar dalam negeri belum terlalu cukup kuat sejalan dengan masih terjadi penurunan daya beli masyarakat. Namun demikian, aktivitas ekspor ke provinsi di luar Jawa Tengah diperkirakan akan sedikit meningkat, khususnya untuk produk di sektor pertanian seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan. Beberapa komoditas sektor ini selama ini menjadi pemasok bagi daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan. **Impor** diperkirakan juga tumbuh lebih melambat yang dipengaruhi oleh turunnya impor beberapa bahan baku, disebabkan turunnya aktivitas industri karena permintaan yang menurun dan relatif mahalanya bahan baku impor karena nilai tukar rupiah yang sedang tertekan.

7.2. Inflasi

Tekanan inflasi Jawa Tengah triwulan I-2009 diperkirakan mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, dan diproyeksikan akan berada dalam kisaran 7,5%–8,5% (yoy). Perkiraan optimis akan berada dalam angka kisaran 7,5% - 8,00%, sedangkan perkiraan pesimis berada dalam kisaran 8,0% - 8,5%. Tekanan inflasi triwulan I-2009 diperkirakan mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM pada bulan Januari 2009, serta pasokan bahan makanan khususnya beras yang memadai pada bulan Maret 2009 setelah adanya masa panen raya di beberapa daerah.

Tekanan inflasi pada triwulan I-2009 diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari dan Maret 2009, namun dengan perkiraan laju inflasi yang relatif rendah dalam kisaran 0,2% - 0,6% (mtm). Faktor pemicu terjadinya tekanan inflasi triwulan I-2009 adalah kemungkinan terjadinya gangguan pasokan beberapa komoditas karena terjadinya banjir atau longsor di beberapa daerah, seperti Brebes, Pekalongan, Demak, Kebumen, Cilacap, Kudus, Pati, Solo, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen. Di samping itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan berupa tingginya pembuatan berbagai atribut untuk melaksanakan Pemilu pada bulan April 2009 diperkirakan juga mulai meningkat pada bulan Februari dan Maret 2009.

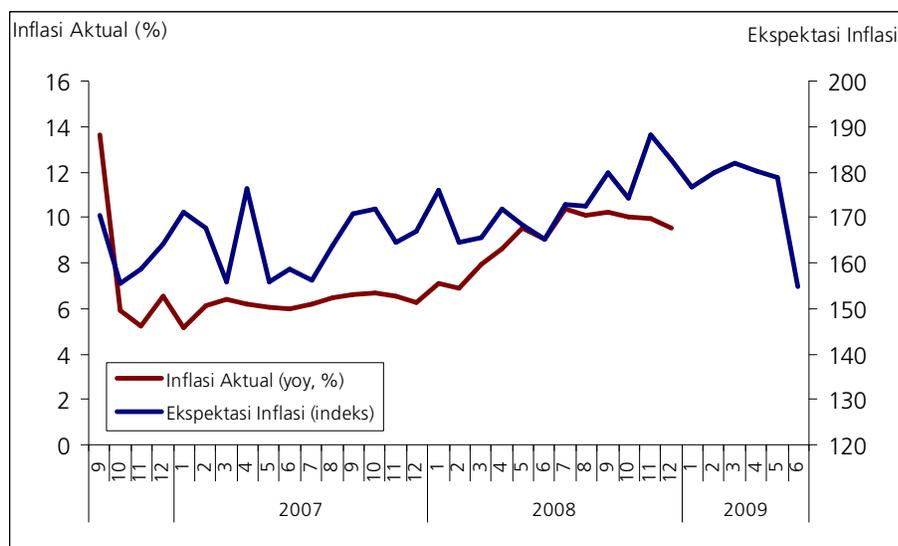
Perkembangan harga komoditas internasional yang saat ini mengalami kecenderungan menurun diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan laju inflasi Jawa Tengah selama tahun 2009. Kondisi itu tentu diharapkan dapat mengarahkan laju inflasi ke arah yang lebih rendah, dan diharapkan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan akan semakin optimis. Di sisi lain, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN/APBD pada triwulan I-2009 yang masih relatif rendah diperkirakan juga akan menjadi salah satu faktor penahan laju inflasi. Sementara itu, sumbangan inflasi dari faktor moneter

diperkirakan akan menurun sejalan dengan kurs rupiah yang diperkirakan stabil dalam kisaran Rp11.000,00 s.d. Rp11.500,00 per USD.

Faktor pemicu inflasi yang perlu diwaspadai adalah munculnya *shock* pada *volatile foods*. Masuknya masa panen di bulan Maret-Mei diharapkan dapat meminimalkan munculnya *supply shock* pada kelompok bahan makanan khususnya beras. Sementara itu, pasokan komoditas bahan makanan lain seperti daging, ikan dan sayuran juga perlu dijaga terkait dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada triwulan I-2009, yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas hasil panen dan merusak infrastruktur distribusi. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi akan memicu tekanan harga di kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi pada triwulan mendatang.

Tekanan inflasi dari ekspektasi masyarakat diperkirakan mengalami penurunan hingga akhir tahun. Dengan demikian, di tengah aktivitas ekonomi yang cenderung melambat, laju inflasi triwulan I-2009 hingga akhir tahun 2009 diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan inflasi tahun 2008. Terdapat beberapa faktor positif yang diharapkan dapat menyebabkan berkurangnya tekanan harga secara umum. Beberapa faktor positif tersebut antara lain berupa: (a) berlanjutnya penurunan harga BBM internasional dan penurunan harga beberapa komoditas di pasar internasional, seperti kedelai, gandum dan CPO, (b) ketersediaan stok barang kebutuhan pokok yang masih mencukupi, misalnya stok beras di Perum Bulog Jawa Tengah mencukupi hingga 6 bulan ke depan, (c) ketersediaan pupuk yang mencukupi hingga Maret 2009 diharapkan dapat menekan biaya produksi petani, dan (d) relatif rendahnya tekanan dari sisi permintaan.

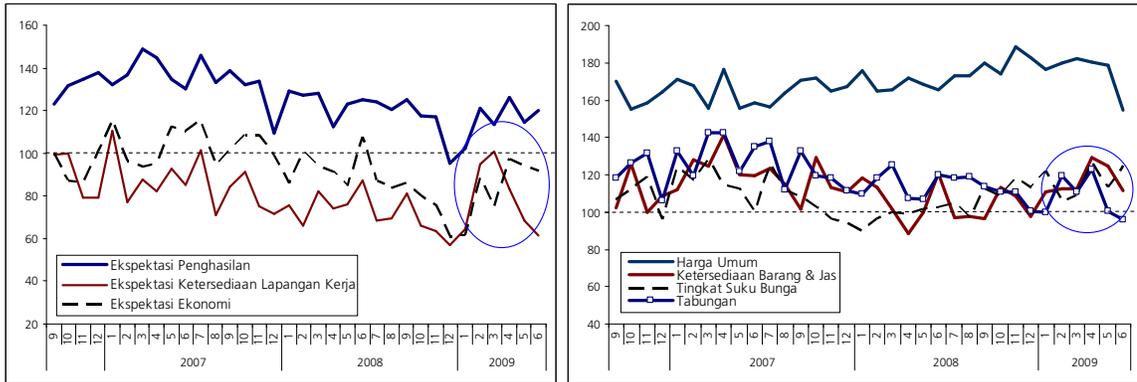
Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran, responden mengekspektasikan bahwa harga di tingkat pedagang pada triwulan I-2009 mendatang diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan triwulan laporan. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang sebagian besar mengekspektasikan terjadinya penurunan harga barang dan jasa (lihat Grafik 7.1).



GRAFIK 7.1.
PRAKIRAAN INFLASI HASIL SURVEI KONSUMEN DAN LAJU INFLASI IHK AKTUAL (YOY)

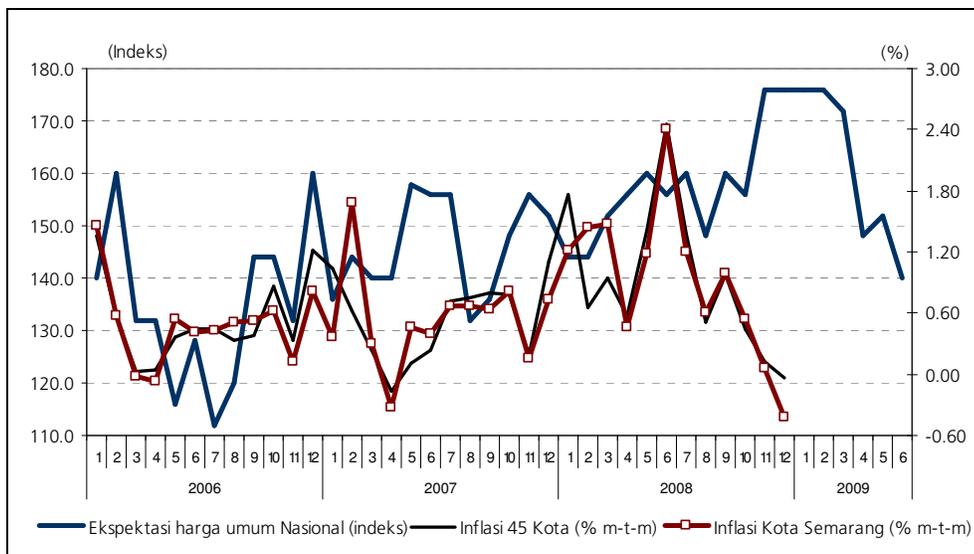
Berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh KBI Semarang, ekspektasi masyarakat kota Semarang dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan optimisme dalam hal ekspektasi penghasilan. Namun, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi ekonomi masih dalam level pesimis. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi secara umum dan ketersediaan lapangan kerja masih dalam level pesimis. Hal itu terkait dengan perkiraan responden bahwa beberapa perusahaan masih menghadapi persoalan rendahnya order karena perekonomian yang lesu, sehingga terpaksa melakukan PHK atau merumahkan sebagian karyawannya.
- b. Ekspektasi penghasilan yang cenderung meningkat dalam level optimis, juga perlu disikapi dengan lebih bijak
- c. Ekspektasi masyarakat terhadap harga secara umum sangat positif, yaitu bahwa 3 bulan dan 6 bulan harga akan semakin rendah.
- d. Ekspektasi masyarakat mengenai ketersediaan barang dan jasa sedikit menunjukkan optimisme sejak awal tahun 2009 hingga 6 bulan ke depan.
- e. Ekspektasi masyarakat terhadap tingkat suku bunga cukup optimis bahwa suku bunga akan berada dalam level yang *acceptable*.
- f. Namun, ekspektasi masyarakat terhadap tabungan cenderung pesimis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan konsumsi dengan menggunakan tabungan yang selama ini disimpan.



GRAFIK 7.2
EKSPEKTASI MASYARAKAT ENAM BULAN KE DEPAN BERDASARKAN SURVEI KONSUMEN

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KBI Semarang, mayoritas responden memperkirakan harga secara umum pada 3 bulan dan 6 bulan mendatang akan mengalami penurunan. Secara *net balance*, indeks ekspektasi harga pada Desember 2008 untuk 3 dan 6 bulan mendatang rata-rata berada pada level 140, jauh menurun dari September 2008 yang berada dalam level 172. Hal itu menunjukkan ekspektasi responden terhadap kenaikan harga secara umum semakin menurun, atau responden melihat ke depan bahwa inflasi akan relatif lebih rendah dari triwulan laporan (lihat Grafik 5.4).



GRAFIK 7.3.
EKSPEKTASI PEDADANG UNTUK ENAM BULAN KE DEPAN BERDASARKAN SURVEI PENJUALAN ECERAN

Berdasarkan hasil estimasi dan berbagai survei tersebut di atas yang menghitung ekspekasi masyarakat, pengusaha dan pedagang, laju inflasi Jawa Tengah triwulan I-2009 diperkirakan akan berada dalam kisaran 7,5%-8,5% (yoy). Tabel 5.1. menunjukkan angka perkiraan laju inflasi Jawa Tengah triwulan I-2009 menurut estimasi KBI Semarang.

TABEL 7.1.
ESTIMASI LAJU INFLASI JAWA TENGAH HINGGA AKHIR TAHUN 2008
MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (YOY, PERSEN)

NO	KELOMPOK BARANG & JASA	I-08	II-08	III-08	IV-2008	I-2009*)
1	Bahan Makanan	13.36	17.33	16.71	12.91	13 – 14
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Temb.	10.69	9.74	13.17	12.90	14 – 15
3	Perumh., Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	5.34	9.73	12.77	13.46	12 – 13
4	Sandang	9.69	9.13	8.78	7.06	7 – 8
5	Kesehatan	5.50	6.40	6.13	7.68	6 – 7
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	7.31	8.54	4.44	4.93	3 – 4
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keu.	1.18	11.20	11.92	7.14	2 – 3
UMUM		6.24	9.01	10.21	9.55	7.5 – 8.5

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: *) merupakan estimasi KBI Semarang



Lampiran Data

Halaman Ini sengaja dikosongkan

**PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH (BANK UMUM & BPR)**

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Total Aset	93.197	94.342	99.100	107.486	111.811	19,97	4,02
2. DPK	74.845	74.783	78.761	81.185	86.075	15,00	6,02
a.Giro	12.304	12.772	12.971	11.789	12.296	-0,06	4,30
b.Tabungan	35.072	33.938	36.219	36.512	40.067	14,24	9,73
c.Deposito	27.469	28.073	29.571	32.884	33.712	22,72	2,51
3. Kredit	62.333	64.040	71.397	77.110	79.331	27,26	2,88
4. LDR (%)	83,28	85,63	90,65	94,98	92,16	-	-
5. NPLs (%)	3,73	4,13	2,80	3,24	2,95	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

**PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM
PER SEKTOR EKONOMI**

Sektor Ekonomi	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08
Pertanian	2,002	1,864	1,952	1.969	2.056
Pertambangan	31	44	41	78	79
Industri	9,439	9,499	10,750	12.889	13.749
Listrik, Gas, & Air	9	11	13	10	9
Konstruksi	903	789	1,121	1.236	990
PHR	17,186	17,765	19,580	20.413	21.230
Pengangkutan	214	229	274	292	372
Jasa Dunia Usaha	1,725	1,787	1,996	2.332	2.311
Jasa Sosial Masy.	400	377	428	426	417
Lainnya	366	381	577	693	613
Total KMK	32,275	32,745	36,732	40.337	41.826

Sumber : LBU, Bank Indonesia

RASIO NPLs JENIS KREDIT MODAL KERJA PER SEKTOR EKONOMI (PERSEN)

Sektor Ekonomi	IV-07	I-08	II-08	III-08	IV-08
Pertanian	2.17	2.79	3.48	2,82	2,41
Pertambangan	1.51	1.12	1.64	0,85	0,71
Industri	5.16	5.89	5.19	3,77	3,22
Listrik, Gas, & Air	0.00	0.00	0.29	1,51	0,35
Konstruksi	4.16	6.53	5.41	3,66	1,94
PHR	3.94	4.18	4.01	3,80	2,71
Pengangkutan	6.41	6.14	5.43	5,29	4,08
Jasa Dunia Usaha	2.69	2.78	1.86	1,69	4,97
Jasa Sosial Masy.	2.85	3.20	2.57	1,59	1,44
Lainnya	2.54	3.16	2.51	1,77	2,88
Total NPLs KMK	4.11	4.56	4.22	3,56	2,97

Sumber : LBU, Bank Indonesia

PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR BPR DI JAWA TENGAH (RP MILIAR)

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Aset	6.776	6.864	7.278	7.493	7.889	16,42	5,28
2. DPK	4.746	4.856	5.054	5.127	5.459	15,04	6,47
a. Tabungan	1.947	1.946	2.058	2.085	2.340	20,18	12,23
b. Deposito	2.798	2.910	2.997	3.042	3.119	11,47	2,53
3. Kredit	5.316	5.520	5.991	6.442	6.424	20,84	-0,27
4. LDR (%)	112,06	113,66	118,52	125,64	117,66	-	-
5. NPLs (%)	11,55	11,52	10,36	9,78	9,26	-	-
6. Jumlah BPR	339	326	311	317	298	-12,1	-5,99

Sumber : LBPR Bank Indonesia

**PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH (RP MILIAR)**

INDIKATOR USAHA	2007	2008				PERT. DES-08 (%)	
	DES	MAR	JUN	SEP	DES	yoy	qtq
1. Total Aset	1.630	1.624	1.866	2.312	2.417	48,28	4,54
<i>Share thd tot.perbankan (%)</i>	1.75	1.72	1.88	2,15	2,33	-	-
2. DPK	1.242	1.288	1.462	1.550	1.701	36,95	9,74
<i>Share thd tot.perbankan (%)</i>	1.66	1.72	1.85	1,90	2,11	-	-
3. Pembiayaan	1.279	1.304	1.620	1.873	2.027	58,48	8,22
<i>Share thd tot.Perbankan (%)</i>	2.05	2.04	2.26	2,42	2,78	-	-
4. FDR (%)	102.97	101.24	110.80	101,24	119,12	-	-
5. NPLs (%)	3.56	4.83	4.12	4,83	2,43	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

PDRB SEKTORAL HARGA KONSTAN JAWA TENGAH

No	Lapangan Usaha	Triwulanan				
		IV-07	I-08	II-08	III-08*)	IV-08**)
Pertumbuhan Year on Year						
1	Pertanian	-8.78%	-3.43%	5.89%	7.09%	13.35%
2	Pertambangan & Penggalian	2.79%	1.46%	2.03%	5.54%	5.70%
3	Industri Pengolahan	10.37%	9.51%	5.03%	6.39%	-2.37%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	8.65%	5.35%	4.83%	4.86%	6.19%
5	Bangunan	5.56%	5.45%	6.04%	6.08%	8.44%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	5.99%	5.46%	5.76%	4.95%	4.40%
7	Pengangkutan & Komunikasi	8.25%	7.10%	6.67%	9.65%	6.67%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	12.29%	11.49%	8.32%	6.77%	4.91%
9	Jasa-Jasa	11.60%	11.20%	8.80%	6.69%	4.46%
Total PDRB		5.53%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%
Kontribusi terhadap Pertumbuhan						
1	Pertanian	-1.64%	-0.78%	1.25%	1.42%	2.16%
2	Pertambangan & Penggalian	0.03%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%
3	Industri Pengolahan	3.34%	2.91%	1.59%	2.04%	-0.80%
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0.07%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%
5	Bangunan	0.33%	0.30%	0.33%	0.35%	0.51%
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	1.31%	1.15%	1.21%	1.05%	0.96%
7	Pengangkutan & Komunikasi	0.42%	0.35%	0.33%	0.48%	0.35%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	0.44%	0.40%	0.30%	0.25%	0.19%
9	Jasa-Jasa	1.23%	1.10%	0.89%	0.69%	0.50%
Total PDRB		5.53%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%

PDRB PENGGUNAAN HARGA KONSTAN JAWA TENGAH

No	Lapangan Usaha	IV-07	I-08	II-08	III-08*)	IV-08**)
Pertumbuhan Year on Year						
1	Kons. Rumah Tangga	5.29%	5.13%	5.11%	6.51%	4.95%
	a. Makanan	2.92%	2.37%	2.37%	2.97%	2.77%
	b. Non Makanan	8.74%	9.11%	9.02%	11.54%	7.96%
2	Kons. LNP	3.01%	2.65%	2.12%	6.77%	10.27%
3	Kons. Pemerintah	19.83%	14.71%	12.34%	13.65%	13.60%
4	P M T B	5.56%	6.18%	6.14%	7.16%	7.24%
5	Ekspor	12.68%	9.87%	1.46%	0.80%	4.08%
6	Impor	-12.89%	8.81%	1.56%	-5.37%	16.19%
	PDRB	5.53%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%
Kontribusi terhadap Pertumbuhan						
1	Kons. Rumah Tangga	3.48%	3.25%	3.24%	4.14%	3.25%
	a. Makanan	1.14%	0.89%	0.89%	1.11%	1.05%
	b. Non Makanan	2.35%	2.36%	2.36%	3.03%	2.20%
2	Kons. LNP	0.05%	0.04%	0.03%	0.10%	0.15%
3	Kons. Pemerintah	2.47%	1.64%	1.55%	1.78%	1.92%
4	P M T B	1.03%	1.07%	1.07%	1.28%	1.34%
5	Ekspor	10.70%	5.46%	0.79%	0.45%	2.10%
6	Impor	6.68%	3.94%	0.83%	-3.01%	6.71%
	PDRB	5.51%	5.49%	5.96%	6.39%	3.99%

Halaman Ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

administered price

harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

BI Rate

suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

dana pihak ketiga (DPK)

adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.

financing to deposit ratio (FDR) atau loan to deposit ratio (LDR)

rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

fit for circulation

merupakan kebijakan untuk menyediakan uang layak edar.

inflasi IHK

kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

inflasi inti

inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

inflow

adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- (1) pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*.
- (2) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

M1

uang beredar dalam arti sempit, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang kartal dan uang giral.

M2

uang beredar dalam arti luas, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari M1 dan uang kuasi (tabungan dan deposito berjangka dalam rupiah dan valas pada bank umum).

net inflow

uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.